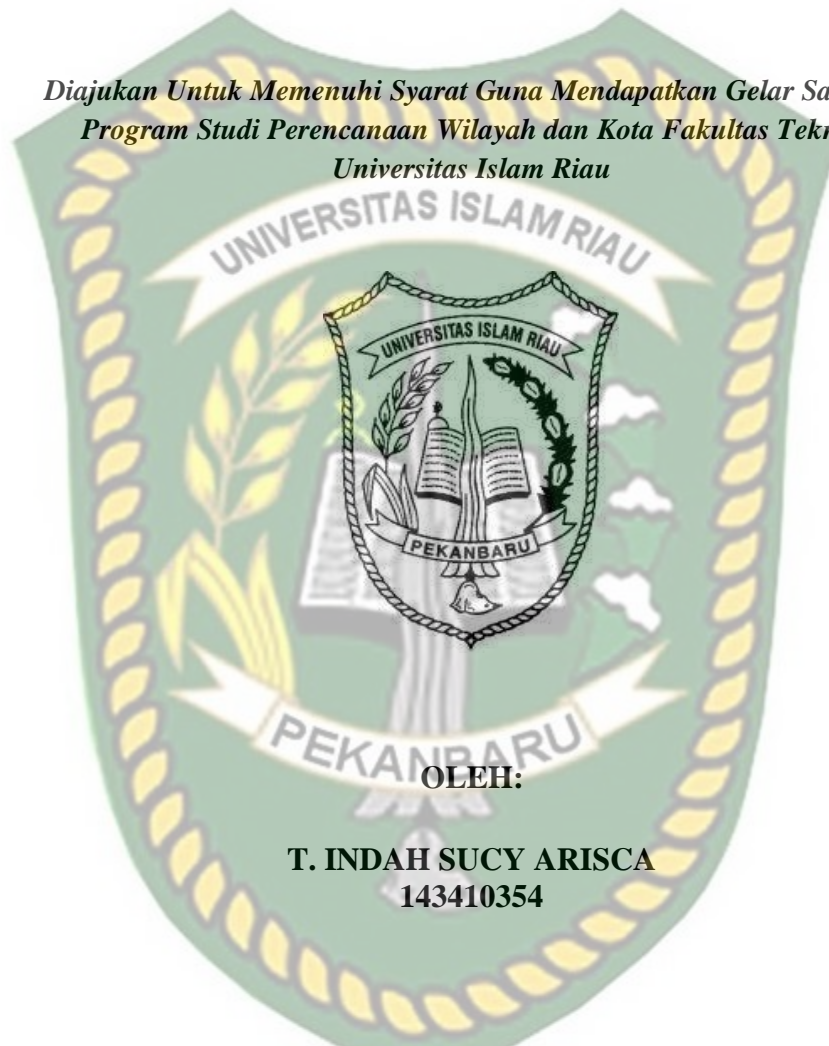


**ANALISIS PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN TERHADAP PERKEMBANGAN
WILAYAH DI KABUPATEN PELALAWAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik
Universitas Islam Riau*



OLEH:

**T. INDAH SUCY ARISCA
143410354**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

**ANALISIS PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN TERHADAP PERKEMBANGAN
WILAYAH DI KABUPATEN PELALAWAN**



NAMA : T. INDAH SUCY ARISCA

NPM : 143410354

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN TERHADAP PERKEMBANGAN
WILAYAH DI KABUPATEN PELALAWAN



TUGAS AKHIR

Disetujui Oleh:

T. INDAH SUCY ARISCA

NPM : 143410354

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING
PEKANBARU

FUJI ASTUTI, ST., MT

Disahkan Oleh :



DEKAN FAKULTAS TEKNIK

KETUA PROGRAM STUDI

ILHAM ABDUL KADUS ZAINI, MT., MS., TR

PIJI ASTUTI, ST., MT

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama · T Indah Sucy Arisca
Tempat/Tgl Lahir Pekanbaru, 13 November 1995
NPM 143410354
Alamat · Jl. Sail GG. AM. I No.7
Kecamatan Tenayan Raya – Kota Pekanbaru

Adalah mahasiswa Universitas Islam Riau yang terdaftar pada
Fakultas Teknik
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang Pendidikan S-1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini adalah Benar dan Asli dengan judul **“Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Terhadap Perkembangan Wilayah di Kabupaten Pelalawan”**

Apabila dikemudian hari ada yang merasa dirugikan dan/atau menuntut karena Tugas Akhir saya ini menggunakan sebagian dari hasil tulisan atau karya orang lain (**Plagiat**) tanpa mencantumkan nama penulisnya, maka saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Agustus 2019



T. Indah Sucy Arisca
143410354

ANALISIS PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN PELALAWAN

T. INDAH SUCY ARISCA

143410354

ABSTRAK

Penentuan pusat pertumbuhan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendukung perkembangan wilayah. Kabupaten Pelalawan mengalami kesenjangan wilayah antar kecamatannya dari segi ketersediaan sarana dan struktur pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan kecamatan-kecamatan yang layak menjadi lokasi pusat-pusat pertumbuhan terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Pelalawan berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi dan kondisi struktur pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan menganalisis kecamatan-kecamatan yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi menggunakan metode skalogram dan indeks sentralitas dan menganalisis kecamatan-kecamatan yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan kondisi struktur pertumbuhan ekonomi menggunakan metode tipologi klassen.

Hasil yang diperoleh dalam menganalisis kecamatan-kecamatan yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi menggunakan metode skalogram dan indeks sentralitas adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai Hirarki I, Kecamatan Ukui dan Kecamatan Pangkalan Kuras Hirarki II, Kecamatan Bandar Sei Kijang dan Kecamatan Langgam sebagai Hirarki III, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pangkalan Lesung sebagai Hirarki IV, dan Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Kuala Kampar, dan Kecamatan Teluk Meranti Hirarki V. Kemudian hasil dari menganalisis kecamatan-kecamatan yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan kondisi struktur pertumbuhan ekonomi menggunakan metode tipologi klassen adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Kerumutan, dan Kecamatan Teluk Meranti termasuk dalam kecamatan berkembang cepat. Selanjutnya Kecamatan Langgam, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Pangkalan Lesung termasuk dalam kecamatan relatif tertinggal.

Kata Kunci : *Kesenjangan wilayah, Ketersediaan Sarana, Perkembangan wilayah, Pusat-pusat pertumbuhan, Struktur ekonomi*

GROWTH CENTERS OF ANALYSIS ON THE DEVELOPMENT OF REGION IN PELALAWAN DISTRICT

T. INDAH SUCY ARISCA

143410354

ABSTRAK

Determination of growth centers aims to reduce disparities between regions and support regional development. Pelalawan Regency experienced regional disparities between sub-districts in terms of the availability of facilities and the structure of economic growth. This study aims to identify and determine the appropriate sub-districts to be the location of growth centers for the development of the region in Pelalawan District based on the availability of socio-economic advice and conditions of the structure of economic growth.

The research approach used is descriptive quantitative by analyzing the sub-districts that can become centers of growth based on the availability of socio-economic facilities using scalogram and index centrality methods and analyzing sub-districts that can become centers of growth based on conditions of economic growth structure using typology methods *klassen*.

The results obtained in analyzing the sub-districts that can become centers of growth based on the availability of socio-economic facilities using the scalogram method and the index of centrality are Pangkalan Kerinci District as Hierarchy I, Ukui District and Pangkalan Kuras Hirarki II District, Bandar Sei Kijang District and Langgam District as Hierarchy III, Kerumutan Subdistrict, Pangkalan Lesung Subdistrict as Hierarchy IV, and Bunut Subdistrict, Pelalawan Subdistrict, Bandar Petalangan Subdistrict, Kuala Kampar Subdistrict, and Teluk Meranti Subdistrict Hierarchy V. Then the results of analyzing sub-districts can become growth centers Based on the condition of the structure of economic growth using the *Klassen* typology method, Pangkalan Kerinci Subdistrict, Bandar Sei Kijang District, Kerumutan Sub-District, and Teluk Meranti Sub-District, including in the sub-district are developing rapidly. Furthermore, Langgam District, Ukui District, Pangkalan Kuras District, Bunut District, Kuala Kampar District, Bandar Pertalangan District, Pelalawan District and Pangakalan Lesung District are relatively underdeveloped.

Kata Kunci : Availability of facilities, Economic structure, *Growth centers*, *Regional development*, *Regional disparities*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Terhadap Perkembangan Wilayah”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi S1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini, mulai dari persiapan sampai penyelesaian penulisan namun dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak, serta tidak lepas dari pertolongan Yang Maha Rahman dan Rahim. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Dipersembahkan khusus kepada orang tua saya tercinta, Ayahanda **T. Sasmirudin** dan Ibunda **Erliza** atas jasa, pengorbanan, dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya sejak penulis masih dalam kandungan sampai berhasil menyelesaikan studi di jenjang Universitas;
2. Adik-adik saya tercinta **T. Riaufa Bukty Tiara**, dan **T. Muharif Danel Tesasmy** atas doa, dukungan, perhatian serta pengertiannya selama proses pengerjaan skripsi ini;

3. Rektor Universitas Islam Riau **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL** beserta seluruh jajarannya;
4. Bapak Dekan Fakultas Teknik Bapak **Ir. H. Abdul Kudus Zaini, MT., MS., TR** memberikan arahan kepada kami selama perkuliahan sampai penyelesaian pendidikan ini;
5. Para Pembantu Dekan, Staf Dosen, dan Staf Administrasi Fakultas Teknik yang telah banyak memberikan bantuan selama menempuh perkuliahan;
6. Ibu **Puji Astuti, ST., MT** selaku ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dan selaku pembimbing yang banyak telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukkan dalam penyusunan skripsi hingga selesai ;
7. Bapak **Muhammad Sofwan, ST., MT** selaku wakil ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota;
8. Bapak **Ir. H. Firdaus, MP** dan Ibu **Rona Muliana, ST., MT Si** selaku penguji yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan dalam penyusunan skripsi hingga selesai;
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan di Universitas Islam Riau;
10. Sahabat-sahabat saya Raiky Pratama, Septy Dwi Rahayu, Nola Revinda, Rahmi Putri Joni, Erza Agusna Aini, Putri Qalbina Aziz dan seluruh teman-teman angkatan saya yang selalu menemani saya dan menjadi pendengar setia saya di dalam maupun di luar bangku kuliah;
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi.

Serta ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu atas dukungan dan doa demi kelancaran penyelesaian penelitian saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik selalu penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga amal baik dari semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Agustus 2019
Penulis

T. Indah Sucey Arisca
143410354

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Sasaran Penelitian.....	7
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
1.7. Ruang Lingkup Penelitian	9
1.7.1. Ruang Lingkup Wilayah	9
1.7.2. Ruang Lingkup Materi	11
1.8. Kerangka Pemikiran Studi.....	12
1.9. Hipotesis Penelitian	14
1.10. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Wilayah	17

2.2.	Perencanaan Pembangunan Wilayah	19
2.3.	Pembangunan Ekonomi Wilayah.....	22
2.4.	Perkembangan Wilayah	23
2.5.	Kesenjangan Wilayah.....	25
2.6.	Pusat Pertumbuhan.....	26
2.6.1.	Definisi dan Pengertian Pusat Pertumbuhan (<i>Growt Pole</i>)...	26
2.6.2.	Teori Tempat Sentral (<i>Central Place</i>).....	28
2.6.3.	Pengaruh Pusat Pertumbuhan.....	35
2.7.	Struktur Hirarki Pusat Pertumbuhan	37
2.7.1.	Analisis Skala Gutman	38
2.7.2.	Metode Skalogram	39
2.7.3.	Metode Analisis Indeks Sentralitas	40
2.7.4.	Metode Sosiogram.....	40
2.7.5.	Metode Biseksional (<i>Bisektor</i>)	41
2.7.6.	Analisis <i>Break Point</i>	42
2.8.	Aspek Sarana Sosial Ekonomi	42
2.9.	Aspek Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	47
2.9.1.	Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	47
2.9.2.	Ukuran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	48
2.10.	Sistem Perkotaan	51
2.11.	Penelitian Terdahulu	53
2.10.	Sintesis Teori.....	60

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Metode Penelitian	64
3.2. Bahan dan Alat Penelitian.....	65
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	65
3.4. Teknik Penelitian	66
3.5. Tahap Persiapan Penelitian	70
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	71
3.7. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	72
3.8. Pelaksanaan Penelitian	74
3.8.1. Identifikasi dan Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Pada Tingkat Kecamatan Terhadap Perkembangan Wilayah	74
3.8.2. Hasil Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Pada Tingkat Kecamatan Terhadap Perkembangan Wilayah ..	75
3.9. Metode Analisis	75
3.9.1. Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas	75
3.9.2. Analisis Struktur Pertumbuhan Ekonomi.....	81
3.10. Desain Survei	86

BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

4.1. Sejarah Kabupaten Pelalawan	88
4.2. Aspek Fisik.....	89
4.2.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	89
4.2.2. Luas Wilayah Administrasi	91

4.3. Aspek Kependudukan	92
4.3.1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk	92
4.3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	94
4.3.3. Sebaran Penduduk	95
4.4. Aspek Ketersediaan Sarana Sosial Ekonomi	98
4.4.1. Sarana Pendidikan	98
4.4.2. Sarana Kesehatan	101
4.4.3. Sarana Peribadatan	104
4.4.4. Sarana Perekonomian	107
4.5. Aspek Perekonomian (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Kabupaten Pelalawan	110
4.6. Struktur Ruang Kabupaten Pelalawan	113
4.6.1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	113
4.6.2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	114
4.6.3. Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK)	115
4.6.4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	116

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Berdasarkan Ketersediaan Sarana Sosial Ekonomi	121
5.1.1. Identifikasi Kecamatan-Kecamatan Yang Menjadi Pusat Pertumbuhan Berdasarkan Ketersediaan Sarana Sosial Ekonomi	122

5.1.2. Analisis Hirarki Pusat Pertumbuhan	143
5.1.3. Perbandingan Hirarki Struktur Ruang RTRW Dengan Hasil Analisis Skalogram Dan Nilai Indeks Sentralis	146
5.2. Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Berdasarkan Kondisi Struktur Ekonomi	150
5.2.1. Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	150
5.2.2. Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi	153
5.2.3. Analisis Tipologi Klassen	154
5.3. Hasil Perbandingan Hirarki dengan Tipologi Kassen dan RTRW di Kabupaten Pelalawan	162
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	164
6.2. Saran	166
DAFTAR PUSTAKA	168

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kriteria Pengelompokan Sarana	43
Tabel 2.2.	Penelitian Terdahulu	58
Tabel 2.3.	Sintesa Teori	60
Tabel 3.1.	Waktu Penelitian.....	66
Tabel 3.2.	Kebutuhan Data Primer Penelitian	68
Tabel 3.3.	Kebutuhan Data Sekunder Penelitian	69
Tabel 3.4.	Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah.....	84
Tabel 3.5.	Desain Survei	87
Tabel 4.1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018	91
Tabel 4.2.	Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan Tahun 2014-2018	93
Tabel 4.3.	Laju Pertumbuhan Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan Tahun 2014 dan 2018	94
Tabel 4.4.	Penyebaran Penduduk Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan Tahun 2018	96
Tabel 4.5.	Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018.....	98
Tabel 4.6.	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Kesehatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018	101
Tabel 4.7.	Jumlah Sarana Peribadatan Menurut Jenis Peribadatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018	104

Tabel 4.8.	Jumlah Sarana Perekonomian Menurut Jenis Perekonomian di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018	107
Tabel 4.9.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2017	112
Tabel 4.10.	Struktur dan Satuan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Pelalawan	118
Tabel 5.1.	Hasil Identifikasi Sarana Pendidikan Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	123
Tabel 5.2.	Hasil Identifikasi Sarana Kesehatan Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	128
Tabel 5.3.	Hasil Identifikasi Sarana Peribadatan Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	134
Tabel 5.4.	Hasil Identifikasi Sarana Perekonomian Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	139
Tabel 5.5.	Hasil Hirarki Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Pelalawan Menggunakan Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas	144
Tabel 5.6.	Perbandingan Hirarki Struktur Ruang RTRW Dengan Hasil Analisis Hirarki Pusat Pertumbuhan Peneliti	147
Tabel 5.7.	PDRB Per Kapita Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014	151
Tabel 5.8.	PDRB Per Kapita Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018	152
Tabel 5.9.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018	153

Tabel 5.10. Perbandingan PDRB Kapita Kecamatan dengan PDRB Kabupaten di Kabupaten Pelalawan	154
Tabel 5.11. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan di Kabupaten Pelalawan.....	155
Tabel 5.12. Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Pelalawan.....	156



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Administrasi Kabupaten Pelalawan.....	10
Gambar 1.2.	Pemikiran Studi	13
Gambar 2.1.	Luas Jangkauan Range dan Threshold	29
Gambar 2.2.	Kronologi Terjadinya Area Pelayanan Heksagonal	30
Gambar 2.3.	Hirarki Tempat-Tempat Sentral yang Kawasan Daya Pengaruhnya Berbeda-beda	31
Gambar 2.4.	Hirarki K=7	32
Gambar 2.5.	Hirarki K=4	33
Gambar 2.6.	Hirarki K=3	33
Gambar 4.1.	Peta Administrasi Kabupaten Pelalawan.....	90
Gambar 4.2.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018	91
Gambar 4.3.	Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan Tahun 2014-2018.....	93
Gambar 4.4.	Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan Tahun 2014-2018.....	95
Gambar 4.5.	Penyebaran Penduduk Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan Tahun 2018.....	96
Gambar 4.6.	Peta Sebaran Penduduk Kabupaten Pelalawan.....	97
Gambar 4.7.	Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018.....	99
Gambar 4.8.	Sarana Pendidikan Kabupaten Pelalawan	99
Gambar 4.9.	Peta Sarana Pendidikan Kabupaten Pelalawan.....	100

Gambar 4.10. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Kesehatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018	102
Gambar 4.11. Sarana Kesehatan Kabupaten Pelalawan.....	102
Gambar 4.12. Peta Sarana Kesehatan Kabupaten Pelalawan	103
Gambar 4.13. Jumlah Sarana Peribadatan Menurut Jenis Peribadatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018	105
Gambar 4.14. Sarana Peribadatan Kabupaten Pelalawan.....	105
Gambar 4.15. Peta Sarana Peribadatan Kabupaten Pelalawan	106
Gambar 4.16. Jumlah Sarana Perekonomian Menurut Jenis Perekonomian di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018	108
Gambar 4.17. Sarana Peribadatan Kabupaten Pelalawan.....	108
Gambar 4.18. Peta Sarana Perekonomian Kabupaten Pelalawan	109
Gambar 5.1. Peta Analisis Skalogram dan Indeks Sentralis	145
Gambar 5.2. Peta Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Pelalawan.....	161



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan wilayah merupakan upaya pembangunan pada suatu wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya teknologi dan prasarana fisik secara efektif, optimal dan berkelanjutan. Dimana tujuannya adalah untuk pemeratakan pertumbuhan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah (Adisasmita, 2008 dalam Rahayu dkk, 2014).

Pembangunan wilayah, secara spasial tidak selalu merata baik antar wilayah pengembangan, sektor, maupun golongan. Ketidakmerataan pembangunan ini seringkali menjadi permasalahan serius yang dihadapi daerah. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang cepat, sementara wilayah yang beragam, kurangnya sumberdaya yang dimiliki, adanya kecenderungan penanam modal (investor) memilih daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan komunikasi, perbankan, asuransi, tenaga kerja terampil, dan lain sebagainya (Rustiadi, 2009).

Pendekatan pembangunan wilayah sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kebijakan pembangunan yang cenderung sentralistik, dan lebih mendorong pembangunan industrialisasi di wilayah perkotaan. Pendekatan pembangunan ini memang berhasil mempercepat pertumbuhan pada wilayah perkotaan dibandingkan wilayah pedesaan. Namun, kebijakan pembangunan ini dapat menimbulkan *urban bias* yang mendorong percepatan urbanisasi, aliran

modal baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Hal tersebut terbukti dari pesatnya pertumbuhan di wilayah perkotaan dibandingkan wilayah pedesaan (*urban bias*), sehingga hubungan antar wilayah telah membentuk interaksi yang saling memperlemah. Wilayah-wilayah *hinterland* menjadi lemah karena eksploitasi sumberdaya yang berlebihan (Rustiadi, 2009).

Menurut Tambunan (2009) salah satu indikator yang dapat digunakan dalam melihat ketimpangan antar wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan indikator tersebut, dapat dilihat adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Todaro (2006) juga menyebutkan, salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah yaitu dengan menggunakan PDRB per kapita. PDRB per kapita yang semakin besar menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Selain dilihat dari tinggi rendahnya pendapatan tersebut, perlu dicermati apakah PDRB per kapita tersebut sudah terdistribusi secara merata atau tidak (Yulianto, 2015).

Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mempercepat pembangunan suatu daerah adalah pendekatan pembangunan pengembangan wilayah dengan menetapkan pusat pertumbuhan. Ditengah-tengah keterbatasan biaya untuk melaksanakan pembangunan, melalui penetapan pusat pertumbuhan maka pemerintah dapat lebih fokus untuk membangun daerah tersebut yang nantinya daerah pusat pertumbuhan itu akan memberikan efek yang menguntungkan kepada daerah belakangnya atau wilayah *hinterland*. Melalui penetapan pusat pertumbuhan dapat memudahkan pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan daerahnya (Nainggolan, 2013).

Pusat pertumbuhan merupakan suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas sosial ekonomi dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan sarana sosial ekonomi yang ada dikota tersebut (Tarigan, 2005). Pusat-pusat pertumbuhan pada awalnya akan banyak menyerap sumber daya wilayah sekitarnya (terjadi *backwash effect*), tetapi dalam jangka panjang penyerapannya makin berkurang seiring makin besarnya penyebaran sumber daya ke wilayah sekitarnya (*spread effect*) Interaksi yang tinggi antara pusat pertumbuhan dengan hinterland pada akhirnya akan membawa kemajuan pada kedua wilayah tersebut manakala diikuti oleh penguatan infrastruktur serta transfer teknologi ke wilayah pendukungnya (Pasaribu, 2015).

Kesenjangan antar wilayah ini juga terjadi antar kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan mempunyai jumlah penduduk pada Tahun 2018 sekitar 449,79 ribu jiwa, meningkat dibandingkan Tahun 2017 sekitar 428,15 ribu jiwa. Kabupaten Pelalawan mempunyai tingkat migrasi yang tinggi karena sebagai pusat ekonomi baru yang sedang tumbuh. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Pelalawan belum diimbangi dengan penyebaran penduduk. Permukiman-permukiman masih terkonsentrasi di ibukota kabupaten dan beberapa kecamatan terdekat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2018).

Kabupaten Pelalawan secara geografis mengalami kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan. Lokasi desa yang jauh dari pusat kota (Pangkalan Kerinci) atau berada di pinggiran wilayah kabupaten memiliki angka kemiskinan yang sangat tinggi. Sebaliknya, desa-desa di pusat kota cenderung memiliki angka kemiskinan rendah. Persentase kemiskinan di

Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 sebesar 10,25 %, dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lain di Provinsi Riau, persentase kemiskinan di Kabupaten Pelalawan berada di urutan 3 teratas setelah Kabupaten Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti. Sementara Garis kemiskinan per kapita penduduk Tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 487.648 dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp. 473.240 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2018).

Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan pedesaan menimbulkan kesenjangan. Hal tersebut terlihat pula dalam PDRB tiap kecamatannya, dimana Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota kabupaten sekaligus pusat kegiatan wilayahnya memiliki nilai PDRB terbesar dari 12 kecamatan yang ada. Ketimpangan ekonomi wilayah juga dikarenakan terkonsentrasinya kegiatan pada wilayah tertentu. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan 2011-2031, PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) di Kabupaten Pelalawan hanya terfokus pada Kecamatan Pangkalan Kerinci yang sekaligus menjadi ibukota kabupaten, sedangkan belum adanya PKL (Pusat Kegiatan Lokal) namun hanya baru mempunyai 2 kecamatan yang menjadi PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) yakni Kecamatan Pangkalan Kuras (Sorek) dan Kecamatan Ukui (Ukui). Maka, perkembangan wilayahnya menjadi kurang efektif dan pusat pertumbuhan yang ada tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah.

Salah satu strategi untuk mengurangi ketimpangan pengembangan wilayah adalah dengan mengembangkan wilayah tertentu menjadi pusat pertumbuhan (*growth pole*) secara menyebar. Karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi sekaligus. Pusat-pusat pertumbuhan baru ini dapat dipacu dan berkembang dengan cepat dan signifikan. Maka kecamatan-

kecamatan yang ada pada Kabupaten Pelalawan dinilai perlu diidentifikasi untuk dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru. Sehingga diharapkan dengan keberadaan pusat-pusat pertumbuhan yang baru, hasil pembangunan serta ekonominya mempunyai efek menyebar dan terjadi pemerataan di setiap kecamatan.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang mendasari penelitian ini diawali dari terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Pelalawan. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang lambat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Riau, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan pemerataan pembangunan (sarana sosial ekonomi) juga terjadi dikarenakan terkonsentrasinya kegiatan pada wilayah tertentu. Saat ini pusat kegiatan di Kabupaten Pelalawan hanya terfokus pada Kecamatan Pangkalan Kerinci yang sekaligus menjadi ibukota kabupaten. Maka, perkembangan wilayahnya menjadi kurang efektif dan pusat pertumbuhan yang ada tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah. Kondisi ini akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan tindakan penentuan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan kondisi tersebut, *problem statement* yang muncul adalah :

- a. Kabupaten Pelalawan salah satu kabupaten yang menjadi prioritas pengembangan di Provinsi Riau, namun saat ini pemerataan sarana sosial ekonomi yang masih belum optimal secara menyeluruh di setiap wilayahnya. Hal tersebut menyebabkan kondisi di Kabupaten Pelalawan

terjadi kesenjangan wilayah yang dimana pusat kegiatan lebih berfokus pada Kecamatan Pangkalan Kerinci atau lebih cenderung kekotaan, hal ini terjadi dikarenakan ketersediaan sarana sosial ekonomi di kecamatan ini lebih memadai dan akses mudah bagi masyarakat yang tinggal di kecamatan ini. Berbeda dengan kecamatan-kecamatan di daerah lain di Kabupaten Pelalawan yang masih cenderung perdesaan dimana akses dan ketersediaan sarana sosial ekonomi masih minim dan sulit di jangkau oleh masyarakat. Untuk menyeimbangkan kondisi tersebut oleh karena itu diperlukan analisis penentuan pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi di Kabupaten Pelalawan dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan dalam hal sarana sosial ekonomi di kabupaten tersebut.

- b. Kabupaten Pelalawan berada pada posisi tiga teratas se-Provinsi Riau dalam permasalahan kemiskinan, yakni dengan 10,25% pada Tahun 2018. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi ketimpangan ekonomi di daerah-daerah wilayah Kabupaten Pelalawan. Walaupun di pusat perkotaan (Pangkalan Kerinci) terbilang cukup maju dan memiliki tingkat pendapatan per kapita yang cukup tinggi berbeda hal nya dengan wilayah atau kecamatan lainnya di Kabupaten Pelalawan ini. Maka dari itu perlu adanya penentuan pusat-pusat pertumbuhan dalam struktur perekonomian di Kabupaten Pelalawan guna menyelaraskan pembangunan dan pendapatan perkapita agar perekonomian merata dan tidak terjadinya ketimpangan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dirumuskan lagi pertanyaan penelitian, pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan-kecamatan apa saja yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi ?
- b. Kecamatan-kecamatan apa saja yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan kondisi struktur pertumbuhan ekonomi ?

1.4. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menentukan kecamatan yang layak menjadi lokasi pusat-pusat pertumbuhan terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Pelalawan.

1.5. Sasaran Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada sub bab sebelumnya, maka ditetapkan beberapa sasaran dari penelitian ini yaitu :

- a. Mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi.
- b. Mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan kondisi struktur pertumbuhan ekonomi.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dan sasaran sebelumnya maka manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritik yaitu berkontribusi terhadap pengembangan bidang ilmu Perencanaan Wilayah dan Ilmu Ekonomi. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan wacana bagi peneliti lain yang tertarik dalam melakukan analisis pusat-pusat pertumbuhan terhadap pengembangan suatu wilayah dalam membentuk wilayah yang berkelanjutan.
- b. Manfaat bagi pemerintah, Kabupaten Pelalawan yaitu penelitian ini dapat dijadikan pengembangan kebijakan terkait pemerataan pembangunan dengan menentukan kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi yang besar menjadi pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah Kabupaten Pelalawan, sehingga nantinya pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Manfaat bagi masyarakat, dapat memperkaya pengetahuan umum masyarakat terkait pentingnya penentuan pusat-pusat pertumbuhan terhadap pengembangan wilayah dalam mereduksi kesenjangan wilayah dan pemerataan sosial ekonomi. Penentuan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang tepat akan memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusia.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi ruang lingkup wilayah serta ruang lingkup materi.

1.7.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari 12 kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Bandar Petalang, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Kerumutan, dan Kecamatan Teluk Meranti.

Kabupaten Pelalawan secara astronomis terletak antara $1^{\circ} 25' 00''$ LU - $0^{\circ} 20' 00''$ LS dan $100^{\circ} 42' 00''$ BT - $103^{\circ} 28' 00''$ BT. Kabupaten Pelalawan memiliki Ibukota Kabupaten yaitu Pangkalan Kerinci. Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah yaitu 1.392.494 Ha. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Pelalawan yang merupakan ruang lingkup wilayah penelitian adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru.

Untuk lebih jelasnya wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan dapat digambarkan melalui pemetaan yang dapat dilihat pada Gambar 1.1.

1.7.2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi ini membutuhkan data-data sekunder yang digunakan untuk mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi berupa data jumlah ketersediaan sarana sosial ekonomi dan mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan kondisi struktur pertumbuhan ekonomi berupa data PDRB per kapita Kecamatan di Kabupaten Pelalawan dan PDRB Kabupaten Pelalawan. Untuk menentukan pusat-pusat pertumbuhan terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Pelalawan adalah :

- a. Menganalisis dan mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi.

Untuk mengetahui tingkat kecukupan sarana, mengetahui struktur hirarki sarana, mengetahui jangkauan dari pusat pelayanan terhadap kecamatan lain (*hindterland*) dan menentukan kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan baru berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi di Kabupaten Pelalawan dapat menggunakan analisis berupa :

1. Analisis Skalogram

Analisis skalogram digunakan untuk mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang dapat dikelompokkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan sarana sosial ekonomi perkotaan yang tersedia.

2. Analisis Indeks Sentralitas

Analisis indeks sentralitas merupakan bagian dari analisis penentuan pusat-pusat pertumbuhan dalam mengelompokkan kecamatan

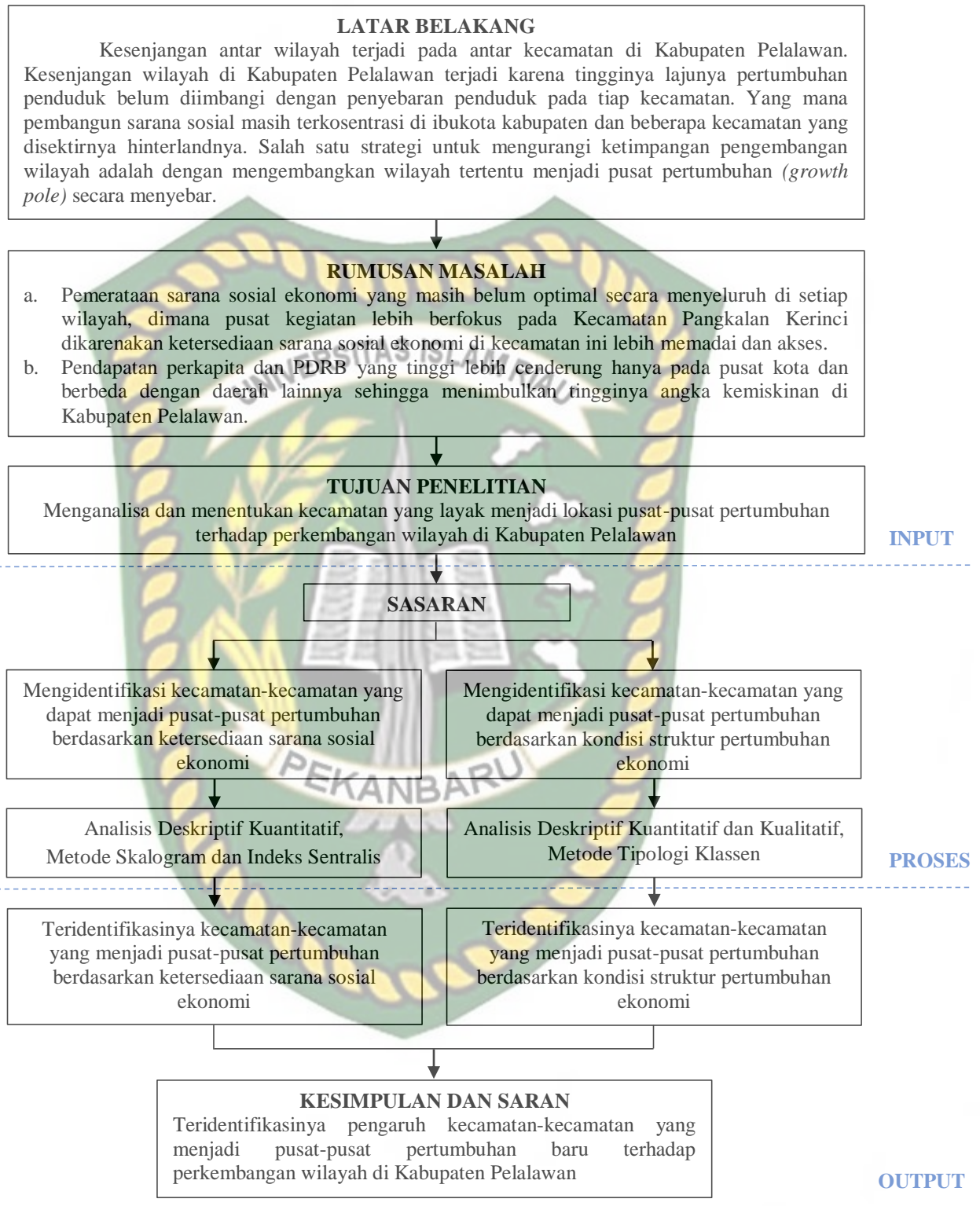
berdasarkan hirarki dari adanya ketersediaan sarana sosial ekonomi yang tersedia.

- b. Menganalisis dan mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan kondisi struktur pertumbuhan ekonomi.

Analisis yang digunakan yakni Analisis Tipologi Klassen dengan membandingkan PDRB per kapita masyarakat per kecamatan dan kabupaten dengan laju pertumbuhan PDRB per kecamatan dan kabupaten yang kemudian akan menentukan kecamatan-kecamatan yang menjadi maju dan tumbuh cepat, kecamatan maju tapi tertekan, kecamatan berkembang cepat, dan kecamatan yang relatif tertinggal di Kabupaten Pelalawan.

1.8. Kerangka Pemikiran Studi

Pada penelitian ini diperlukan kerangka pemikiran guna memudahkan peneliti melihat gambaran kondisi serta permasalahan wilayah studi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 1.2. Pemikiran Studi

1.9. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran studi yakni pusat-pusat pertumbuhan terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Pelalawan, untuk mengetahui hubungan dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :

H0 : Tidak ada hubungan antara perkembangan wilayah Kabupaten Pelalawan dengan pusat-pusat pertumbuhan (ketersediaan sarana dan perekonomian).

H1 : Ada hubungan antara perkembangan wilayah Kabupaten Pelalawan dengan pusat-pusat pertumbuhan (ketersediaan sarana dan perekonomian).

1.10. Sistematika Penulisan

Penyajian laporan penelitian mengenai “Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Terhadap Perkembangan Wilayah di Kabupaten Pelalawan” disusun menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar yang secara sistematis disusun dan dibagi kedalam enam bagian yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, gambaran umum wilayah penelitian, analisis dan pembahasan, serta penutup dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah dengan melampirkan peta administrasinya, kerangka pemikiran, hipotesa penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka ini menguraikan tentang definisi interaksi, definisi pengaruh, definisi pusat pertumbuhan serta teori-teori terkait seperti teori kutub pertumbuhan, teori kosentrik, teori tempat sentral, pengaruh pusat pertumbuhan, definisi teori subsektor dan sektor, definisi ekonomi, definisi pengembangan wilayah, teori-teori perkembangan wilayah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari bahan dan alat penelitian, teknik penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, lokasi penelitian, teknik pengolahan dan penyajian data, pendekatan metode penelitian, pelaksanaan penelitian, dan tahapan analisis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah kajian di Kabupaten Pelalawan, meliputi letak geografis, kepadatan Penduduk, jumlah tenaga kerja, dan penggunaan lahan di Kabupaten Pelalawan sesuai data yang di peroleh.

BAB V : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dan pengelolaan data wilayah kajian. Pembahasan yang dilakukan dijabarkan berdasarkan sasaran yang ingin diperoleh dengan metode yang telah ditentukan, sehingga hasil dari pengolahan data dan pembahasannya dapat mencapai tujuan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil yang ditemukan kemudian disusun berdasarkan sasaran-sasaran yang ada. Saran pada bab ini hanya memberi masukan kepada peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Pengertian Wilayah

Pengertian wilayah dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Menurut Muta'ali (2015) wilayah merupakan suatu area secara geografis yang dapat dianggap sebagai satu kesatuan, kesatuan tersebut dapat berupa homogenitas secara internal dari area tersebut ataupun sebagai satu nodal/simpul bagi suatu wilayah tertentu.

Pengertian wilayah (*region*) adalah suatu area geografis yang memiliki ciri tertentu dan merupakan media bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi (Nugroho dkk, 2004). Pengertian wilayah sangat penting untuk diperhatikan apabila berbicara tentang program-program pembangunan yang terkait dengan pengembangan wilayah dan pengembangan kawasan. Pengembangan wilayah mencakup sosial, ekonomi, budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Sementara itu pengembangan wilayah seharusnya mempunyai cakupan yang lebih luas yaitu menelaah keterkaitan antar kawasan. Namun perpektif seseorang tentang keterkaitan suatu wilayah tergantung pada cakupan wilayah perencanaan dan pengelolaannya. Wilayah perencanaan dan pengelolaan bisa mencakup wilayah administrasi politis (pusat atau daerah) maupun wilayah perencanaan fungsional (Rustiadi dkk, 2009).

Menurut Kustiwan (2014) dalam Fadli (2017) membagi wilayah menjadi empat tipe yaitu: wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah perencanaan, wilayah administrasi.

a. Wilayah Homogen

Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek/kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama. Sifat sifat dan ciri-ciri kehomogenan itu misalnya dalam hal ekonomi (seperti daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen, daerah dengan tingkat pendapatan rendah/miskin, dan lain-lain). Geografi (seperti wilayah yang mempunyai topografi atau iklim yang sama), agama, suku, dan sebagainya. Konsep ini sering mengandung subyektivitas yang tinggi, karena menurut konsep ini suatu batasan wilayah bisa tumbuh karena adanya suatu kesamaan menurut kriteria-kriteria tertentu yang sangat bergantung dari siapa yang menciptakan kriteria tersebut.

b. Wilayah Nodal (*Nodal Region*)

Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya (*hinterland*). Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi. Suatu wilayah dapat tumbuh oleh adanya suatu keterpusatan dalam wilayah tersebut, dimana di dalam wilayah tersebut terdapat pusat-pusat yang saling berinteraksi setiap hari dan berada dalam pengaruh pusat utama. Wilayah nodal atau wilayah polarisasi secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat dan wilayah belakangnya sedangkan wilayah perencanaan

dibuat atas dasar kedekatan, saling terkait secara logis, dan merupakan kesatuan pengambilan keputusan ekonomi.

c. Wilayah administrasi

Wilayah administratif adalah wilayah-wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintah atau politik, seperti: provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan RT/RW. Wilayah administratif sering dianggap lebih penting karena lebih sering digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan.

d. Wilayah perencanaan.

Boudeville dalam Fadli (2017) mendefinisikan wilayah perencanaan (*planning region atau programming region*) sebagai wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan besar untuk memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan.

2.2. Perencanaan Pembangunan Wilayah

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai “upaya sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik”. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Di Indonesia dan berbagai negara berkembang istilah pembangunan seringkali lebih berkonotasi fisik artinya melakukan kegiatan-kegiatan membangun yang bersifat fisik, bahkan sering kali secara lebih sempit diartikan sebagai membangun infrastruktur/fasilitas fisik (Rustiadi dkk, 2009).

Pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara atau wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya. Jadi pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses dimana terdapat saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisa dengan seksama sehingga diketahui runtutan peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dari suatu tahap pembangunan ke pembangunan berikutnya. Pembangunan juga pada dasarnya dapat dianggap sebagai proses perubahan yang disusun secara “sengaja” dan terencana untuk mencapai situasi yang sendinya terdapat proses perencanaan (Mulyono, 2008).

Dalam setiap kegiatan pembangunan, masalah pemilihan lokasi maupun pemanfaatan lahan terbangun harus dipertimbangkan secara cermat dan dipilih secara tepat, agar kegiatan tersebut dapat berlangsung secara produktif dan efisien. Pelaksanaan pembangunan yang menyangkut masalah lahan, merupakan masalah yang rumit serta menyangkut berbagai aspek, sehingga dalam penentuan lokasinya memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam (Asteriani, 2011).

Perencanaan pembangunan wilayah adalah konsep yang utuh dan menyatu dengan pembangunan wilayah. Secara luas, perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan (Nugroho dkk, 2004).

Pembangunan wilayah tidak cukup hanya menggunakan pendekatan sektoral saja atau hanya pendekatan regional saja. Perencanaan pembangunan wilayah mestinya memadukan kedua pendekatan tersebut (Tarigan, 2005). Menurut Todaro bahwa pembangunan harus di pandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengetasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya pembangunan ini harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan kergaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spritual (Rustiadi dkk, 2009).

Terjadinya perubahan baik secara *incremental* maupun paradigma menurut Anwar (2001) dalam Huda (2018) mengarahkan pembangunan wilayah kepada terjadinya pemerataan (*equity*) yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan (*sustainability*). Konsep pembangunan yang memperhatikan ketiga aspek tersebut dalam proses perkembangannya secara evolusi dengan bejalan melintas waktu yang ditentukan oleh perubahan tata nilai dalam masyarakat seperti perubahan keadaan sosial, ekonomi, serta realitas politik.

2.3. Pembangunan Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran (*income per-kapita*) dalam jangka panjang (Subandi, 2011). Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Kuncoro, 2003 dalam Asih, 2015). Pembangunan ekonomi terjadi apabila terjadi perubahan struktur dalam penyumbang perekonomiannya yaitu dari sektor pertanian ke sektor industri (Todaro, 2006).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal guna merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan itu maka perkembangan baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya (Huda, 2018).

Manusia dituntut untuk memberdayakan sumberdaya yang ada untuk mendorong perekonomian di daerah, sebagai mana dalam Al-Qur'an bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berusaha mencari pekerjaan serta menggunakan sumberdaya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan

serta dalam meningkatkan pembangunan di masyarakat. Berikut adalah ayat Al-Quran surah Al-A'raf (7) ayat 10 tentang pembangunan ekonomi di masyarakat (Hamid, 2017) :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :

Dan sungguh, Kami telah Menempatkan kamu di bumi dan disana Kami Sediakan (sumber) penghidupan untukmu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.

Ayat-ayat di atas pun menunjukkan bahwa kaum muslimin yang ingin mencapai kemajuan hendaknya memberdayakan sumberdaya alam yang ada serta harus bekerja keras. Telah menjadi sunatullah di dunia bahwa kemakmuran akan di capai oleh mereka yang bekerja keras dan memanfaatkan segala potensinya untuk mencapai keinginannya (Hamid, 2017).

2.4. Perkembangan Wilayah

Tingkat perkembangan suatu wilayah pada dasarnya merupakan fungsi dari lingkungan alam, penduduk, dan kegiatan ekonomi dan sosial. Interaksi antara lingkungan alam, penduduk, dan kegiatan ekonomi dan sosial pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah. Komponen berbagai fungsi tersebut seperti lingkungan alam berhubungan dengan aksesibilitas wilayah yang meliputi luas wilayah, jarak ke ibukota kabupaten dan panjang jalan, sedangkan dari segi penduduk berhubungan dengan jumlah penduduk dan kepadatannya, serta kegiatan ekonomi dan sosial berhubungan dengan jumlah fasilitas sarana sosial dan ekonomi

yang mempengaruhi dalam menunjang kebutuhan penduduk di wilayah tersebut (Budiharjo, 1995).

Secara geografis perkembangan wilayah cenderung tidak seimbang, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan berbagai macam jenis potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat menyebabkan berbagai kesenjangan, ada dua kekuatan penting yang dikemukakan (Dewi, 2013) yakni :

- a. Wilayah-wilayah yang telah lebih maju menciptakan keadaan yang menghambat perkembangan wilayah-wilayah yang masih terbelakang (*backwash effects*).
- b. Wilayah-wilayah yang telah lebih maju menciptakan keadaan yang mendorong perkembangan wilayah-wilayah yang masih terbelakang (*spread effects*).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *backwash effects* adalah:

1. Corak perpindahan penduduk dari wilayah yang masih terbelakang ke wilayah maju. Adanya perkembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang lebih maju merupakan daya tarik bagi tenaga kerja yang berpendidikan/berkualitas untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Sedangkan di wilayah terbelakang, yang ada hanyalah orang-orang yang umumnya lebih konservatif. Keadaan demikian tidak menguntungkan bagi perkembangan wilayah yang masih terbelakang karena setiap saat kehilangan putra-putri daerahnya yang bermutu.

2. Arus investasi yang tidak seimbang. Permintaan modal di wilayah terbelakang biasanya sangat minimal, disamping itu produktivitasnya pun sangat rendah sehingga tidak merangsang bagi penanaman modal dari luar, bahkan modal dari dalam justru terus mengalir ke luar (wilayah yang lebih maju) karena lebih terjamin untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi.
3. Pola dan aktivitas perdagangan yang didominasi oleh industri-industri di wilayah yang lebih maju, sehingga wilayah terbelakang sangat sukar mengembangkan pasar bagi hasil-hasil industrinya.
4. Adanya jaringan-jaringan pengangkut yang lebih maju, sehingga kegiatan produksi dan perdagangan dapat dilaksanakan lebih efisien (menguntungkan). Dengan adanya faktor-faktor tersebut maka perkembangan wilayah yang sudah maju akan semakin meningkat, sebaliknya wilayah terbelakang akan semakin terbelakang.

2.5. Kesenjangan Wilayah

Kesenjangan wilayah merupakan kondisi dimana terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah. Permasalahan tersebut masih didominasi adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta rendahnya akses masyarakat terhadap sarana prasarana sosial ekonomi. Kondisi demikian menyebabkan beberapa daerah mengalami kemajuan, sementara beberapa daerah lain mengalami ketertinggalan (Dewi, 2013).

Permasalahan kesenjangan antar wilayah merupakan salah satu persoalan pokok yang dihadapi oleh setiap daerah. Kesenjangan umumnya terjadi karena

interaksi berbagai faktor yang menyebabkan tidak semua daerah mengalami perkembangan yang sama, akan tetapi beberapa daerah berkembang lebih cepat daripada daerah yang lain menurut kriteria tertentu. Permasalahan kesenjangan antar wilayah ini menjadi salah satu permasalahan yang harus diprioritaskan untuk ditangani, sebab sangat terkait dengan upaya untuk pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya (Dewi, 2013).

Salah satu ukuran untuk mengetahui adanya kesenjangan perkembangan antar wilayah adalah dengan mengetahui diferensiasi perkembangan masing-masing wilayah kecamatan yang ditunjukkan dengan tingkat perkembangannya. Diferensiasi perkembangan dari masing-masing wilayah tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai perbedaan hasil atau jumlah di berbagai sektor pembangunan wilayah, seperti jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi maupun di sektor basis dan non basis (Dewi, 2013).

2.6. Pusat Pertumbuhan

2.6.1. Definisi dan Pengertian Pusat Pertumbuhan (*Growt Pole*)

Pusat pertumbuhan (*growt pole*) adalah salah satu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan dan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain disekitarnya (Tarigan, 2005).

a. Fungsi Pusat Pertumbuhan

Bagian bagian dari wilayah dipermukaan bumi itu tidak tumbuh bersama-sama secara teratur, tetapi disengaja atau tidak disengaja ada bagian-bagian yang tumbuh dan maju atau berkembang lebih cepat dari bagian lain.

Cepatnya pertumbuhan ditempat ini dapat menjadi pendorong bagi bagian lain yang tingkat pertumbuhannya kurang cepat. Secara umum fungsi pusat pertumbuhan kurang cepat :

1. Memudahkan koordinsi dan pembinaan.
2. Melihat perkembangan wilayah maju dan mundur.
3. Meratakan pembangunan di seluruh wilayah.

b. Konsep Dasar Wilayah Pusat Pertumbuhan

Istilah pertumbuhan dalam geografis yang dimaksud yaitu pertumbuhan pembangunan baik pembangunan fisik wilayah maupun pembangunan sosial budaya. Dalam kerangka pendekatan perwakilan Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa wilayah pembangunan. Setiap wilayah pembangunan mempunyai sebuah kota yang menjadi pusat pertumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya wilayah pusat pertumbuhan antara lain sebagai berikut :

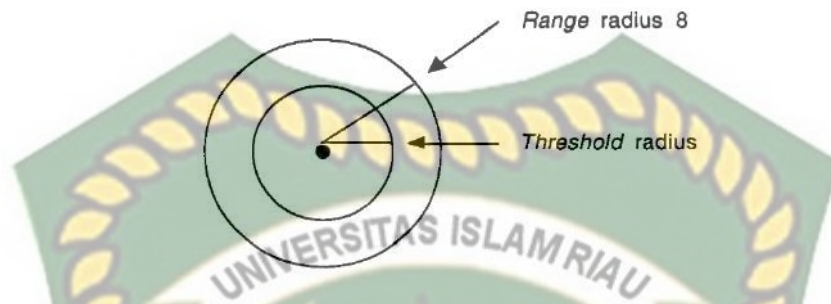
1. Faktor alam : Penguungan, dataran ringgi, dataran rendah, cuaca, iklim, rawa-rawa, dan kesuburan tanah.
2. Faktor ekonomi : perbedaan kebutuhan antara tempat yang satu dengan yang lain.
3. Faktor industri : kebutuhan tenaga kerja, tempat tinggal, dan peralatan rumah.
4. Faktor sosial : pendidikan, pendapatan, dan kesehatan.
5. Faktor lalu lintas : jenis transport, kondisi jalan, dan fasilitas lalu lintas lain.

2.6.2. Teori Tempat Sentral (*Central Place*)

Teori Tempat Pusat atau *Central Place Theory* pertama kali dikembangkan oleh Walter Walter Christaller pada Tahun 1933 menulis buku yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris berjudul *Central Places in Southern Germany* (diterjemahkan oleh C.W Basaki pada Tahun 1966). Dalam buku ini Christaller mencoba menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya (Tarigan, 2005). Christaller (1933) melakukan studi di Jerman Selatan mengenai hirarki pusat pelayanan kegiatan jasa pada tujuh tingkat hirarki pusat pelayanan, mulai dari desa kecil di pinggir jalan hingga kota. Setiap pusat pelayanan kegiatan jasa tersebut masing-masing mempunyai spesialisasi pelayanan tertentu, seperti jasa kesehatan, jasa pemenuhan kebutuhan (toko, pasar berkala dan pasar harian), serta jasa pemerintahan. Hasil studinya ini merupakan sumbangan sekaligus juga kemajuan yang berarti bagi teori lokasi secara umum, dan secara khusus adalah bagi teori penyediaan pusat pelayanan penduduk tersebut diartikan sebagai pusat kota (maupun sub pusat kota), yang merupakan suatu titik/tempat/daerah pada suatu kota yang memiliki peran sebagai pusat dari segala kegiatan kota antara lain politik, sosial, budaya, ekonomi dan teknologi (Yunus, 1999).

Dalam asumsi yang sama dengan Christaller, Lloyd (1977) Konsep dasar dari teori Central Place adalah *Threshold* dan *Range*. *Threshold* adalah jumlah minimal (penduduk atau pendapatan) yang diperlukan untuk melancarkan dan menyelaraskan unit pelayanan atau pengertian lainnya adalah minimum pasar sehingga produsen dapat menjaga kelangsungan produksinya tanpa mengalami kerugian, sedangkan *Range* adalah jarak maksimum yang harus ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dari tempat pusat.

Range selalu lebih besar dibandingkan dengan *threshold*. Konsep dasar ini digunakan untuk mendeskripsikan aktifitas yang terkonsentrasi/terpusat. (Tarigan, 2005).



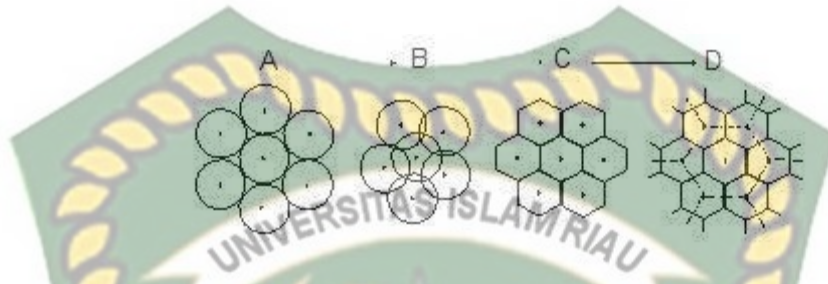
Sumber: Tarigan, 2005

Gambar 2.1. Luas Jangkauan *Range* dan *Threshold*

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dijelaskan model Christaller tentang terjadinya model area pelayanan heksagonal sebagai berikut (Tarigan,2005) :

- Mula-mula terbentuk area pelayanan berupa lingkaran-lingkaran. Setiap lingkaran memiliki pusat dan menggambarkan *threshold*. Lingkaran-lingkaran ini tidak tumpang tindih seperti pada bagian A dari Gambar 2.2.
- Kemudian digambarkan lingkaran-lingkaran berupa *range* dari pelayanan tersebut yang lingkarannya boleh tumpang tindih seperti terlihat pada bagian B.
- Range* yang tumpang tindih dibagi antara kedua pusat yang berdekatan sehingga terbentuk areal yang heksagonal yang menutupi seluruh dataran yang tidak lagi tumpang tindih seperti terlihat pada bagian C.
- Tiap pelayanan berdasarkan tingkat ordenya memiliki heksagonal sendiri-sendiri. Dengan menggunakan $k=3$, pelayanan orde I lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal pelayanan orde II. Pelayanan orde II lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal pelayanan orde III dan seterusnya.

Setiap heksagonal memiliki pusat yang besar kecilnya sesuai dengan besarnya heksagonalnya tersebut. Heksagonal yang sama besarnya tidak saling tumpang tindih tetapi antara heksagonalnya yang tidak sama besarnya akan terjadi tumpang tindih seperti terlihat pada bagian D.



Sumber : Tarigan, 2005

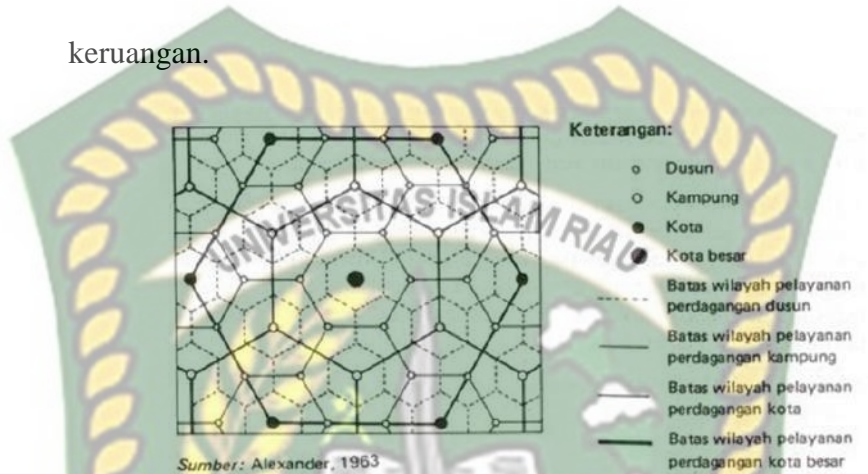
Gambar 2.2. Kronologi Terjadinya Area Pelayanan Heksagonal

Suatu tempat sentral mempunyai kekuatan pengaruh berbeda-beda dalam melayani wilayah, akibat adanya perbedaan tersebut maka hirarki kawasan pengaruhnya juga mengalami perbedaan (Sumaatmadja, 1981 dalam Nirwani, 2014).

Teori tempat sentral berlaku apabila memiliki karakteristik sebagai berikut (Santoso, 2012) :

- Topografi wilayah yang datar dan seragam sehingga tidak ada hambatan kearah manapun.
- Aktivitas ekonomi yang terjadi hanya berupa proses penyediaan barang dan jasa, bukan berupa aktivitas produksi primer atau sekunder.
- Terdapat populasi konsumen yang tersebar secara homogen dengan tingkat penghasilan atau daya beli sama.
- Populasi konsumen memiliki pola konsumsi yang sama dan tingkat permintaan yang sama.

- e. Terdapat sistem transportasi yang memungkinkan tingkat aksesibilitas yang sama terhadap keseluruhan wilayah.
- f. Biaya transportasi berbanding lurus dengan jarak yang ditempuh.
- g. Konsumen dan produsen berlaku rasional secara ekonomis dan keruangan.



Sumber : Santoso, 2012

Gambar 2.3. Hirarki Tempat-Tempat Sentral yang Kawasan Daya Pengaruhnya Berbeda-beda

Suatu tempat sentral mempunyai kekuatan pengaruh berbeda-beda dalam melayani wilayah, akibat adanya perbedaan tersebut maka hierarki kawasan pengaruhi juga mengalami perbedaan. Tempat-tempat sentral yang lebih tinggi ordenya mempunyai wilayah perdagangan atau wilayah pelayanan yang lebih luas (Sumaatmadja, 1981 dalam Nirwani, 2014).

Hirarki tempat sentral dengan wilayah pengaruhnya dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu (Sumaatmadja, 1981 dalam Nirwani, 2014) :

- a. Hirarki $K=7$

Christaller dalam Sumaatmadja (1981) mengasumsikan hirarki $K=7$ merupakan pusat pemerintahan optimum yang merupakan sebuah pusat pemerintah. Pada hirarki ini terlihat jelas perbedaan antara susunan yang lebih tinggi dengan susunan yang lebih rendah, antara tempat-tempat

dengan aktivitas perniagaan yang tinggi dan pemerintahan yang tinggi dengan wilayah-wilayah yang berhirarki rendah.

Wilayah pada hirarki K=7 ini mempengaruhi wilayahnya sendiri serta seluruh bagian wilayah-wilayah tetangga, prinsip utamanya adanya kemudahan dalam pengawasan pemerintahan, atau bias disebut situasi administrasi optimum dengan kenam pusat hirarki di bawahnya berada pada batas wilayah pelayanan hirarki di atasnya

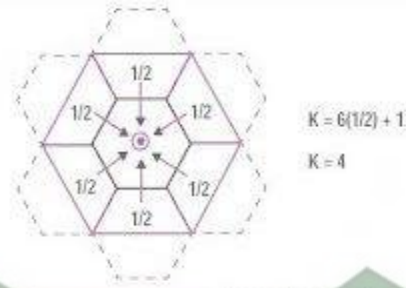


Sumber: Sumatmadja, 1981 dalam Nirwani, 2014

Gambar 2.4. Hirarki K=7

b. Hirarki K=4

Merupakan pusat lalu lintas/transportasi maksimum yang menyediakan sarana dan prasarana yang optimal. Pada hirarki ini tempat yang sentral dengan kawasan komplementernya memberikan kemungkinan rute jalan lalu lintas yang efisien antara suatu kota dengan kota atau tempat sentral lainnya yang bertanggung. Wilayah pada hirarki K=4 ini meminumkan jarak penduduk untuk mendapatkan pelayanan fungsi di tempat pusat. Wilayah K=4 dan wilayah sekitarnya yang terpengaruh senantiasa memeberikan kemungkinan jalur lalu lintas paling efisien. Dinamika K=4 karena suatu kegiatan di tempat pusat akan melayani empat tempat pusat yaitu satu tempat pusat sendiri di tambah tiga tempat pusat hirarki di bawahnya.

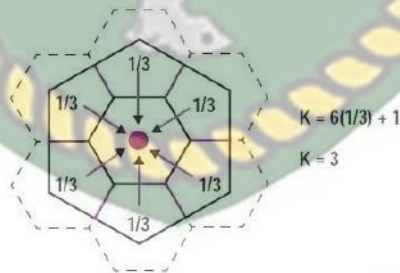


Sumber: Sumaatmadja, 1981 dalam Nirwani, 2014

Gambar 2.5. Hirarki K=4

c. Hirarki K=3

Hirarki K=3 merupakan tempat pusat pelayanan yang menyediakan kebutuhan barang-barang pasar untuk daerah sekitarnya. Wilayah ini merupakan pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya, seperti pasar, sering disebut kasus pasar optimal. Berdasarkan model K=3, pusat dari hirarki yang lebih rendah berada pada sudut dari hirarki yang lebih tinggi sehingga pusat yang lebih rendah berada pada pengaruh dari tiga hirarki yang lebih tinggi darinya (Tarigan 2005).



Sumber: Sumaatmadja, 1981 dalam Nirwani, 2014

Gambar 2.6. Hirarki K=3

Berdasarkan asumsi dan fenomena tersebut diatas, Christaller menjelaskan juga bahwa suatu tempat memiliki 3 (tiga) karakteristik khusus. Ketiganya

dikatakan sejalan karena ketiga karakteristik tersebut merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya pola geometri wilayah pelayanan suatu tempat pusat. Ketiga karakteris tersebut adalah (Tarigan, 2005) :

a. Memiliki Ambang Penduduk (*Threshold Population*)

Ambang penduduk adalah jumlah penduduk minimum untuk dapat mendukung suatu penawaran akan jasa. Dalam hal ini, jasa yang ditawarkan adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh fasilitas-fasilitas yang ada ditempat pusat tersebut. bila jumlah penduduk yang dilayani berada dibawah ambang, maka pelayanan tersebut akan menjadi kurang baik dan kurang efektif.

b. Memiliki Jangkauan Pasar/ Wilayah Cakupan Layanan (*Market Range*)

Jangkauan pada suatu aktifitas jasa adalah jarak yang seseorang bersedia untuk menempuhnya untuk mendapatkan jasa yang bersangkutan. Lebih jauh dari jarak ini, orang yang bersangkutan akan mencari tempat lain yang lebih dekat untuk memenuhi kebutuhan akan jasa yang sama. Jangankan pasar setiap kegiatan pelayanan jasa akan saling berbeda-beda, tergantung pada arti pentingnya suatu tempat pusat/pelayanan pusat tersebut.

c. Memiliki Struktur Hirarki Pelayanan

Struktur hirarki pelayanan adalah kegiatan jasa mulai dari tingkat yang paling tinggi seperti pada tingkat kota, sampai pada tingkatan yang paling rendah seperti pada tingkat desa.

2.6.3. Pengaruh Pusat Pertumbuhan

Pengaruh yang ditimbulkan dari pusat pertumbuhan yang berkembang di suatu wilayah adapun kaitan wilayah pusat pertumbuhan dan pengaruhnya pusat pertumbuhan sebagai berikut (Soegimo, 2009) :

- a. Pengaruh Pusat-Pusat Wilayah Pertumbuhan Terhadap Pemusatan dan Persebaran Sumber Daya

Kemunculan pusat pertumbuhan akan menarik jumlah tenaga kerja yang banyak dapat dilihat dari arus mobilitas dan migrasi penduduk dari desa ke kota maupun antar provinsi. Arus migrasi penduduk dari perdesaan menuju kota besar maupun kota kecil di Indonesia menunjukkan angka yang terus meningkat sejalan dengan pesatnya pertumbuhan kota.

- b. Pengaruh Pusat-Pusat Wilayah Pertumbuhan terhadap Perkembangan Ekonomi

Terjadinya peluang kerja di berbagai sektor yang relatif terbuka dan adanya gerakan arus barang agar membawa dampak terjadinya peluang kerja di berbagai sektor yang relatif terbuka. Adanya gerakan arus barang agar membawa dampak terhadap alat transportasi, perhubungan, perdagangan, perkantoran, jasa, dan lain-lainnya. Contohnya; meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas transportasi seperti mobil telah memacu tumbuhnya alat-alat transportasi dan sarana pembekalan.

Bertambah padatnya jumlah penduduk wilayah tersebut maupun pertambahan alami akan memacu tumbuhnya sarana-sarana dan fasilitas permukiman, pemasaran, hiburan, kesehatan dan lain-lain. Sektor-sektor ekonomi yang bersifat non formal pun dapat ditempuh dan berkembang

dengan pesat seiring bertambahnya penduduk dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Misalnya munculnya rumah-rumah kos dan kontrakan, perbengkelan, dan perdagang kaki lima.

c. Pengaruh Pusat-Pusat Wilayah Pertumbuhan di Bidang Sosial dan Lingkungan Hidup

Semakin maraknya kemajuan pusat-pusat pertumbuhan akan mempengaruhi kondisi sosial dan lingkungan hidup masyarakat. Pengaruh kemajuan pusat pertumbuhan adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya lapangan pekerjaan yang banyak dan luas akan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara otonomi sehingga status sosial mereka akan lebih baik.
2. Melatih masyarakat untuk mengatur waktu, disiplin, bersikap hemat, dan menyeleksi mana kebutuhan primer dan sekunder supaya tidak terpengaruh oleh tuntutan barang dan jasa yang berlebihan.
3. Akan memotivasi masyarakat untuk saling berlomba memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan untuk menghadapi perubahan sosial budaya.
4. Akibat mobilitas penduduk baik melalui migrasi ataupun penambahan alami dari berbagai latar belakang budaya, akan terjadi akulturasi dan asimilasi nilai budaya.
5. Terbentuknya arus informasi dan komunikasi akan mempercepat laju pertumbuhan daerah tersebut.

6. Makin banyaknya penduduk yang datang akan berpengaruh terhadap keadaan lingkungan hidup di sekitarnya antara lain permukiman, sanitasi, keamanan, lalu lintas, dan pencemaran.

2.7. Struktur Hirarki Pusat Pertumbuhan

Pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Struktur ruang wilayah adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan memiliki fungsional. Struktur ruang berfungsi sebagai pengarah dan pembentuk suatu wilayah (Muta'ali, 2015).

Struktur ruang berupa pusat hirarki fungsi dan sangat dipengaruhi oleh keberadaan distribusi penduduk, infrastruktur berpengaruh dalam membangkitkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, pusat-pusat kegiatan sosial masyarakat perkotaan. Permukiman, sistem kota-kota dan infrastruktur wilayah (Muta'ali, 2015).

Penentuan hirarki (tingkatan) kota-kota biasanya didasarkan pada jumlah penduduk dan pusat pelayanan. Sistem hirarki wilayah mencerminkan adanya hirarki (tingkatan) kota, spesialisasi fungsi, dan sistem keterkaitan (Pelayanan, produksi, distribusi orientasi pergerakan). Sebagai contoh dalam struktur ruang wilayah di Indonesia ditetapkan lima sistem hirarki wilayah adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) – Nasional, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kabupaten, Pusat-pusat kegiatan lain di dalam wilayah kabupaten (Muta'ali, 2015).

Hirarki wilayah dan pusat pelayanan (permukiman) pada umumnya selalu mengacu pada teori pusat pelayanan (*central place theory*) yang dikembangkan oleh Christaller-Losch dan para pengikutnya. Dua konsep pokok yang mendasari teori pusat pelayanan yaitu (Muta'ali, 2015) :

- a. *The range of good*, yaitu jarak tempuh yang masih dapat ditolelir untuk suatu jenis barang atau pelayanan tertentu. Disamping unsur jarak, penentuan pilihan oleh pengguna dipengaruhi juga oleh jenis, kualitas, dan harga barang atau pelayanan yang ditawarkan.
- b. *The threshold value*, yaitu jumlah penduduk atau sumberdaya minimum yang dibutuhkan untuk dapat menciptakan permintaan yang cukup atas barang dan pelayanan yang ditawarkan. *The threshold value* juga menentukan jenis, jumlah, dan harga barang atau pelayanan yang ditawarkan di daerah pusat.

Metode penentuan tingkat hirarki wilayah dan pusat-pusat pelayanan disusun dengan mendasarkan indikator yang menentukan pemusatan dan menjadi obyek pergerakan penduduk yang meliputi jumlah penduduk dan fasilitas pelayanan. Beberapa metode yang sering digunakan adalah sebagai berikut (Muta'ali, 2015) :

2.7.1. Analisis Skala Gutman

Langkah-langkah dalam analisis Gutman adalah sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada indikator jumlah dan jenis infrastruktur pelayanan yang dikelompokkan menjadi pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum,

transportasi, perdagangan dan ekonomi, pemerintah, pelayanana pribadi, rekreasi, organisasi kemasyarakatan dan lain-lainnya tergantung dari ketersediaan data yang ada.

- b. Membuat tata urutan nama pemukiman atas dasar jumlah penduduk dan fasilitasnya
- c. Tata urutan fasilitas juga berdasar jumlah dan jenisnya pada setiap permukiman
- d. Hirarki institusi pada permukiman perlu ditandai dengan garis.

2.7.2. Metode Skalogram

Metode skalogram adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran fungsi fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta hirarki pusat pengembangan dan prasarana pembangunan. Metode ini memberikan hirarki atau urutan peringkat wilayah berdasarkan jenis dan jumlah unit prasaranan pembangunan dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit, sehingga dapat ditentukan wilayah pusat pengembangan (Muta'ali, 2015).

Kelemahan metode skalogram ditutupi dan disempurnakan pada analisis indeks sentralitas yang memberikan bobot setiap fasilitas, sehingga rentang nilai hirarki lebih tepat dan penggunaan metode sosiogram dan bisekstion yang mengidentifikasi jumlah dan luas pengaruh masing-masing wilayah baik dia menjadi pusat pertumbuhan (hirarki I) maupun wilayah yang berada pada hirarki dibawahnya (Muta'ali, 2015).

2.7.3. Metode Analisis Indeks Sentralitas

Analisis indeks sentralitas (Centrality Indeks Anlysis) merupakan langkah lanjutan dari analisis skalogram. Analisis indeks sentralitas juga dimaksud untuk mengetahui struktur/hierarki pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman. Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu (Muta'ali, 2015).

Perbedaan indeks sentralitas dan skalogram adalah bahwa pada alat ini dilakukan penilaian berdasarkan bobot dari setiap jenis fungsi yang ada sehingga disebut juga dengan indeks sentralitas terbobot. Indek ini juga sering disebut indeks sentralitas Marshall sebagai penemu awal. Pengukuran tingkat sentralitas diddasrkan pada jumlah fungsi atau fasilitas pelayanan pada suatu wilayah berdasarkan frekuensi keberadaan fungsi atau fasilitas tersebut pada suatu wilayah/permukiman yang terkait (tingkat dilihat berdasarkan bobot yang ada) (Muta'ali, 2015).

2.7.4. Metode Sosiogram

Untuk memperlihatkan interaksi dan interdependensi grafis dari gerakan masyarakat (*movement of people*) antar wilayah atau kelompok permukiman untuk memilih atau memanfaatkan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan. Ditunjukkan dengan cara arah panah dari tempat asal ke tempat tujuan. Survey *origin-destination* (Asal-Tujuan) dapat digunakan sebagai dasar penyusunan sosiogram berupa peta orientasi pergerakan penduduk. Wilayah hirarki tinggi umumnya menjadi pusat

tujuan (destination) pergerakan penduduk dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan (Muta'ali, 2015).

2.7.5. Metode Biseksional (Bisektor)

Susunan hirarki wilayah dengan sistem klasifikasi tertentu. Sebagai contoh ESCAP (1980) menganalisis pusat-pusat pelayanan menurut jangkauan pelayanandapat dibedakan ke dalam empat bagian yaitu (Muta'ali, 2015):

- a. Hirarki I (pusat regional) merupakan simpul dengan sarana dan prasarana terlengkap, pusat perekonomian, merupakan primate, dengan radius pelayanan terluas dan jumlah penduduk yang dilayani terbesar.
- b. Hirarki II (Pusat Distrik) merupakan pusat yang lebih rendah hirarkinya dari pusat regional. Pusat ini merupakan pusat perdesaan terbesar, dan merupakan penghubung antara daerah sekitarnya dengan pusat (kota) regional
- c. Hirarki III (pusat sub distrik) merupakan pusat dibawah pusat distrik yang menghubungkan pusat lokal dengan daerah yang hirarkinya lebih tinggi. Menjadi *hinterland* dari dua hirarki di atasnya.
- d. Hirarki IV (Pusat Lokal) dengan radius jangkauan tersempit, bentuk pusat pelayanan ini biasanya dicirikan oleh tipe pusat pelayanan yang periodik. Semakin rendah pusat pelayanan semakin sedikit jumlah penduduk yang dilayani dan semakin sempit pula luas wilayah yang dilayani.

National Urban Development Strategy (2000) menentukan bentuk lain dari hirarki wilayah dalam bentuk sistem hirarki kota berdasarkan jumlah penduduk

yaitu kota kecil (<100.000), kota menengah (100.000-500.000), kota besar (500.000-1.000.000) dan metropolitan (>1.000.000). Semakin tinggi hirarki wilayah semakin luas pengaruh dan menjadi pusat orientasi pergerakan dengan tingkat keterkaitan dan konektivitas tinggi. Tinggi perkembangan wilayah tinggi dan potensial menjadi pusat wilayah (*growth center*) (Muta'ali, 2015).

2.7.6. Analisis Break Point

Analisis break point bertujuan untuk menetapkan batas pengaruh dari suatu pusat kota terhadap daerah sekitarnya termasuk terhadap kota lain yang lebih kecil atau batas pengaruh antar pusat pertumbuhan satu dengan yang lainnya. Pengaruh suatu wilayah ditentukan oleh besar kecilnya bobot atau daya tarik wilayah, tingkatan (*orde*) kota dan jarak (Muta'ali, 2015).

2.8. Aspek Sarana Sosial Ekonomi

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil) mendefinisikan sarana dan prasarana merupakan bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu ruang yang berbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam mempertahankan kehidupannya (Rotinsulu dkk, 2017).

Secara lebih lugas dapat dikatakan bahwa sarana prasarana adalah bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-peralatan, dan instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu sistem pemerataan

kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sarana prasarana merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Rotinsulu dkk, 2017). Berikut adalah standar kriteria pengelompokan sarana berdasarkan SNI 03-1733-2004 :

Tabel 2.1. Kriteria Pengelompokan Sarana

No.	Sarana	Jenis Sarana	Kriteria
1.	Pendidikan	TK (Taman Kanak-kanak)	Diperuntukan bagi anak-anak usia 5-6 tahun
			Penduduk pendukung minimum 1.250 jiwa
			Lokasi berada didalam lingkungan permukiman /perumahan dalam unit RT/RW
			Radius pencapaian dari area yang dilayani maksimum 500 m ²
			Luas tanah minimal 1.200 m ² dengan luas lantai minimal 252 m ² (15 m ² /murid)
		SD (Sekolah Dasar)	Diperuntukan bagi anak-anak usia 6-12
			Penduduk pendukung minimum 1.600 jiwa
			Lokasi tidak menyebrang jalan dan berada di lingkungan permukiman/perumahan RT/RW
			Radius pencapaian dari area yang dilayani maksimum 1000 m ²
			Luas tanah minimal 3.600 m ² dengan luas lantai 400-600 m ² (15 m ² /murid)
		SMP (Sekolah Menengah Pertama)	Minimal 3 SD dilayani 1 SMP
			Penduduk pendukung minimum 4.800 jiwa
			Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman/perumahan
			Luas tanah minimal SMP umum 2.700 m ² dengan luas lantai 1.514 m ² (15 m ² /murid)
			Luas tanah minimal SMP khusus 5.000 m ² dengan luas lantai 2.551 m ² (15 m ² /murid)
		SMA (Sekolah Menengah Atas)	Minimal 1 SMP dilayani 1 SMA/SMK
			Penduduk pendukung minimum 4.800 jiwa
			Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman/perumahan
			Luas tanah minimal SMA/SMK umum 2.700 m ² dengan luas lantai 1.514 (15 m ² /murid)
			Luas tanah minimal SMA/SMK khusus 5.000 m ² dengan luas lantai 2.551 m ² (15 m ² /murid)
D3/PT	Mengacu pada standar yang ditetapkan Dirjen Pendidikan Menengah Tinggi (DIKTI)		

No.	Sarana	Jenis Sarana	Kriteria
2.	Kesehatan	Posyandu	Memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita
			Lokasi berada di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya
			Penduduk pendukung minimum 1.250 jiwa
			Luas tanah minimal 0,048 m ² /penduduk
		Puskesmas Lingkungan/ Puskesmas/ Puskesmas Pembantu	Memberikan pelayan kepada penduduk dalam bidang kesehatan yang sifatnya penyembuhan dengan tempat perawatan
			Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan atau tempat tempat yang sudah ditetapkan
			Penduduk pendukung minimum 120.000 jiwa
		Rumah Sakit Wilayah	Luas tanah minimal 2.400 m ² (0,02 m ² /penduduk)
			Memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan, baik sebagai pasien luar maupun pasien menetap (kuratif, preventif, dan edukatif)
			Lokasi cukup tenang dan mempunyai radius yang merata dengan daerah yang diayani
			Penduduk pendukung minimum 240.000 jiwa
		Praktek Dokter	Luas tanah minimal 8,64 Ha (0,45 m ² /penduduk)
Lokasi dapat bersatu dengan rumah tinggal			
Penduduk pendukung minimum 5.000 jiwa			
3.	Peribadatan	Masjid	Radius pencapaian 1.500 m ²
			Jumlah penduduk 2.500 jiwa/unit
			Luas lantai yang dibutuhkan ± 300 m ²
			Luas tanah bila terpisah dengan tempat tinggal minimal 600 m ² (0,3 m ² /penduduk)
		Langgar/ Musholla	Radius pencapaian maksimum 1.000 m ²
			Jumlah penduduk 250 jiwa/unit
			Luas lantai yang dibutuhkan ± 45 m ²
			Luas tanah bila terpisah dengan tempat tinggal minimal 100 m ² (0,4 m ² /penduduk)
		Sarana Ibadah Agama Lain	Radius pencapaian maksimum 100 m ²
			Tidak ditentukan
4.	Perdagangan dan Jasa	Warung/ Kios	Tempat menjual kebutuhan sehari-hari skala kecil
			Lokasi terletak ditempat pusat lingkungan yang mudah dijangkau
			Radius mencapai maksimum 500 m ²
			Penduduk pendukung minimum 250 jiwa
			Luas lantai yang dibutuhkan ± 50 m ²

No.	Sarana	Jenis Sarana	Kriteria
			Luas tanah bila terpisah dengan tempat tinggal minimal 100 m ² (0,4 m ² /penduduk)
		Mini Market	<p>Tempat menjual kebutuhan sehari-hari skala kecil</p> <p>Lokasi terletak ditempat pusat lingkungan yang mudah dijangkau</p> <p>Radius mencapai maksimum 500 m²</p> <p>Penduduk pendukung minimum 250 jiwa</p> <p>Luas lantai yang dibutuhkan ± 50 m²</p> <p>Luas tanah bila terpisah dengan tempat tinggal minimal 100 m² (0,4 m²/penduduk)</p> <p>Tempat menjual kebutuhan sehari-hari skala kecil</p>
		Pertokoan	<p>Bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari satu atau beberapa penjual</p> <p>Lokasinya terletak dipusat lingkungan atau kegiatan te</p> <p>Minimum penduduk pendukung 6.000 jiwa</p> <p>Memiliki tempat parkir baik kendaraan roda dua maupun roda empat</p> <p>Luas tanah minimum 1.800 m²</p>
		Pasar Tradisional	<p>Pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagang melalui tawar menawar</p> <p>Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² luas lantai penjual pasar tradisional</p> <p>Luas tanah minimal 1.500 m²</p> <p>Penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa</p> <p>Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertip dan ruang publik yang nyaman</p> <p>Lokasi berada pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten</p>

No.	Sarana	Jenis Sarana	Kriteria
		Pasar Modern/ Pusat Perbelanjaan/ Supermarket	<p>Sesuatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang</p> <p>Luas lantai 600 m²- 5000 m²</p> <p>Luas tanah minimal 0,5 Ha</p> <p>Penduduk pendukung minimal 200.000 jiwa</p> <p>Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan</p> <p>Memperhatikan jarak dengan Pasar tradisional yang telah ada sebelumnya</p> <p>Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² luas lantai penjualan Pusat pembelian dan/atau Toko Modren</p> <p>Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Pembelian dan Toko Modren yang bersih, sehat (hygeinis), aman, tertip dan ruang publik yang nyaman</p> <p>Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau</p> <p>Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan</p> <p>Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan</p>
		Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)	<p>Menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, elektronik, juga untuk pelayanan jasa perbengkelan, reparasi, unit-unit produksi yang tidak menimbulkan polusi, tempat hiburan serta kegiatan niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, industri kecil dan lain-lain</p> <p>Luas lantai 36.000 m²</p> <p>Luas tanah minimal 36.000 m²</p> <p>Penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa</p> <p>Terletak di jalan utama. Termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat</p>

Sumber : SNI 03-1733-2004 (Badan Standarisasi Nasional), 2004

2.9. Aspek Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai ritel, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Biasanya BPS dalam menerbitkan laporan pendapatan regional tersedia angka dalam harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan kemakmuran daerah tersebut (Tarigan, 2005).

2.9.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Orang yang pertama membahas pertumbuhan ekonomi adalah Adam Smith (1723-1790) yang membahas masalah ekonomi dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (1776). Inti ajaran Smith dalam teori ekonomi klasik adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan. Masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi, pembagian tenaga kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori ekonomi klasik, dalam upaya peningkatan produktivitas kerja. Dalam pembagunan ekonomi modal memegang peranan penting (Tarigan, 2005).

Ahli ekonomi ada yang mendukung dan memperluas pandangan Smith dan ada yang mendukung dan memperluas pandangan Keynes. Kedua kelompok ini tetap mengandalkan mekanisme pasar. Perbedaannya adalah ada yang menginginkan peran pemerintah haruslah sekecil mungkin. Walaupun berbeda, kedua kelompok umumnya sependapat bahwa salah satu tugas negara adalah menciptakan distribusi pendapatan yang tidak terlalu pincang sehingga pertumbuhan ekonomi bisa mantap dan berkelanjutan. Belakangan disadari bahwa pemerintah perlu turun tangan untuk menyediakan jasa yang melayani kepentingan orang banyak ketika swasta tidak berminat menanganinya apabila tidak diberi hak khusus. Misalnya pembangkit tenaga listrik, telepon, dan air minum. (Tarigan, 2005).

Teori pertumbuhan wilayah dimulai dari model dinamika wilayah yang sederhana sampai dengan model yang komprehensif, mulai dari teori *resource endowment*, teori *export base*, teori pertumbuhan wilayah neoklasik, model ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah dan sebuah teori baru mengenai pertumbuhan wilayah. Teori *resource endowment* mengatakan bahwa pengembangan ekonomi bergantung sumberdaya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumberdaya itu. (Perloff and Wingo, 1961).

2.9.2. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat. beberapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain (Suparmoko, 1998 dalam Damarjati, 2010) :

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB), atau di tingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di Negara atau daerah yang bersangkutan.

b. Produk Domestik Bruto per Kapita / Pendapatan per Kapita

Produk domestik bruto per kapita atau produk domestik regional bruto per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu Negara daripada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik bruto per kapita baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di Negara maupun di daerah yang bersangkutan. atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

Bank Dunia menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB), bukan PDB sebagai alat ukur perkembangan ekonomi suatu Negara, yaitu dengan memperhitungkan pendapatan bersih dan faktor produksi milik orang asing. Walaupun PDB atau PNB per kapita merupakan kesejahteraan penduduk secara tepat. karena PDB rata-rata tidak mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang sesungguhnya dirasakan oleh setiap orang di suatu Negara.

Dapat saja angka-angka rata-rata tersebut tinggi, namun sesungguhnya ada penduduk atau sekelompok penduduk yang tidak menerima pendapatan di antara penduduk suatu Negara.

Dengan memperhatikan unsur distribusi pendapatan itu, maka PDB atau PNB per kapita yang tinggi disertai distribusi pendapatan yang lebih merata akan mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik daripada bila pendapatan per kapitanya tinggi namun ada distribusi pendapatan yang tidak merata. Meskipun demikian, demi sederhananya pengukuran pendapatan per kapita tetap merupakan alat pengukur yang unggul dibanding dengan alat-alat pengukur yang lain.

c. Pendapatan per Jam Kerja

Pendapatan per jam kerja sesungguhnya adalah alat pengukur yang paling baik untuk mengukur maju tidaknya suatu perekonomian, biasanya suatu negara yang mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja lebih tinggi daripada upah per jam kerja di Negara lain untuk jenis pekerjaan yang sama, dapat dikatakan bahwa Negara pertama lebih maju daripada negara kedua.

d. Harapan Hidup Waktu Lahir

Harapan hidup waktu lahir juga dapat dipakai untuk melihat kemajuan dan kesejahteraan suatu perekonomian. Memang kesejahteraan dapat benar-benar dirasakan bila seseorang dapat memenuhi semua kebutuhannya seperti kebutuhan akan barang dan jasa, termasuk kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, dan dalam jangka waktu yang lama. Harapan hidup memiliki korelasi yang positif dengan tingkat PNB per kapita. Dalam

tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, orang akan mampu memperoleh kualitas hidup yang baik yang meliputi makanan, perumahan, sandang, rekreasi dan sebagainya. Dengan demikian, tingkat kesehatan akan tinggi pula dan umur rata-rata akan menjadi panjang.

2.10. Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan di Indonesia secara nasional terdiri atas PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilaya), dan PKL (Pusat Kegiatan Lokal), penentuan PKN dan PKW merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan dalam RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). PKL ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota, setelah dikonsultasikan dengan Menteri. Selain ketiga pusat pertumbuhan tersebut, dalam sistem perkotaan nasional dikembangkan dan ditetapkan pula PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara. (PP No. 26 Tahun 2008).

- a. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. PKN ditetapkan dengan kriteria dengan kriteria:
 1. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.

2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan atau
 3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
- b. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi taua beerapa kabupaten/kota. PKW ditetapkan dengan kriteria:
1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN.
 2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
 3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
- c. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan atau perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKL ditetapkan dengan kriteria:
1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
 2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

d. Pusat Kegiatan Strategi Nasional yang selanjutnya disebut PKSNI adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. PKSNI ditetapkan dengan kriteria:

1. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksa lintas batas dengan negara tetangga.
2. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga.
3. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
4. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan sekitarnya.

Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:

- a). Pusat pelayanan kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
- b). Pusat pelayanan lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. (Permen PU No 16 Tahun 2009).

2.11. Penelitian Terdahulu

Maksud dari sub bab penelitian terdahulu yaitu melakukan penelaahan terhadap tugas akhir sebelumnya yang diharapkan menjadi acuan sebelum melakukan penelitian agar tidak keluar dari jalur studi kasus yang dikaji dan

diharapkan penulis dapat melihat bagaimana proses penelitian orang lain hingga mencapai suatu output yang diinginkan.

Di bawah ini terdapat beberapa kajian studi terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini diantaranya:

- a. Sarman P. Sagala (2003) *"Analisis Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung"*

Adanya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang juga akan diikuti oleh pembangunan wilayah. Kegiatan pembangunan tersebut berupa pembangunan pada infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang meningkatkan daya tarik daerah. Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah, pada satu sisi produk yang ada dari pusat pertumbuhan akan digunakan pada kegiatan ekonomi yang ada pada daerah sekitarnya, sedangkan sisi lainnya hasil dari kegiatan ekonomi yang ada di daerah sekitar tersebut akan mempunyai peluang untuk digunakan pada pusat pertumbuhan.

Untuk penyesuaian ekonomi antar wilayah dalam suatu daerah, konsep pendekatan yang sering digunakan adalah konsep pengembangan daerah-daerah administrasi. Dari uraian di atas peneliti akan menemukan kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka sebagai pusat pertumbuhan agar dapat dijadikan acuan untuk memajukan pusat pertumbuhan tersebut dan juga dapat menjadi penggerak bagi daerah lainnya.

- b. Eta Rahayu dan Eko Budi Santoso (2014) “*Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Dalam Mengembangkan Wilayah di Kabupaten Gunung Kidul*”

Pengembangan wilayah merupakan upaya pembangunan pada suatu wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya teknologi dan prasarana fisik secara efektif, optimal dan berkelanjutan. Dimana tujuannya adalah untuk pemerataan pertumbuhan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Namun, kesenjangan wilayah ini merupakan fenomena universal. Pendekatan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro menyebabkan terkonsentrasinya investasi dan sumber daya di perkotaan dan wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan, sementara wilayah *hinterland* mengalami pengurasan sumber daya yang berlebihan.

Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan pedesaan menimbulkan kesenjangan. ketimpangan ekonomi wilayah juga dikarenakan terkonsentrasinya kegiatan pada wilayah tertentu. Salah satu strategi untuk mengurangi ketimpangan pengembangan wilayah adalah dengan mengembangkan wilayah tertentu menjadi pusat pertumbuhan (*growth pole*) secara menyebar. Karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi sekaligus. Pusat-pusat pertumbuhan baru ini dapat dipacu dan berkembang dengan cepat dan signifikan.

- c. Angelina K. Luturkey (2016) “*Analisis Pengaruh Pusat Pertumbuhan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus: Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru)*”

Pertumbuhan kota juga ditandai dari peningkatan jumlah penduduk yang mengakibatkan aktifitas sosial ekonomi meningkat. Peningkatan aktivitas ini mendorong pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas. Kebutuhan akan ruang pun semakin bertambah sehingga lahan terbangun menjadi semakin luas dan lahan tidak terbangun menjadi sedikit. Kota tumbuh dan berkembang mencapai daerah *hinterland*. Salah satu cara untuk melihat kota yang pertumbuhan dan perkembangan kota yaitu, dengan luas lahan yang terbangun, dimana semakin besar presentase luas lahan terbangun berbanding terbalik dengan tidak terbangun maka kota tersebut dikatan semakin berkembang apabila lahan tiak terbangun berbanding terbalik dengan lahan terbangun maka kota tersebut tidak berkembang.

Pertumbuhan dan perkembangan kota pada dasarnya menggambarkan proses berkembangnya suatu kota. Pertumbuhan mengacu pada pengertian secara kuantitas, yang dalam hal ini diindikasikan oleh besar faktor produksi yang dipergunakan oleh sistem ekonomi kota tersebut. Semakin besar produksi berarti ada peningkatan permintaan. Sedangkan perkembangan yang mengacu pada kualitas. Dari pertumbuhan dan perkembangan tersebut akan menciptaka pusat-pusat kegiatan atau pusat pertumbuhan.

- d. Akmal Fadli (2017) “*Kajian Pusat-Pusat Pelayanan dan Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kampar*”

Pusat-pusat pelayanan merupakan suatu aglomerasi dari berbagai kegiatan atau aktivitas serta aglomerasi dari berbagai prasarana dan sarana yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Sehingga ketersediaan fasilitas-fasilitas pelayanan apabila terpenuhi maka akan memenuhi kebutuhan penduduk suatu wilayah maka penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memacu pembangunan dan pengembangan itu perlunya melihat kecamatan-kecamatan yang membutuhkan prioritas pembangunan dan direkomendasikan sebagai pusat pelayanan yang dapat melayani beberapa kecamatan (*hinterland*).



Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Tahun	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Saman P. Sagala	Analisis Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung	2003	Menganalisis sektor-sektor basis dan kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan di kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta untuk mengetahui kecamatan-kecamatan yang akan menjadi daerah pendukung atau <i>hinterland</i> -nya bagi pusat pertumbuhan tersebut	a. Skalogram dan Indeks Sentralitas. b. Gravitasi c. <i>Location Quoiient Analysis</i> (LQ)	Diketahuinya sektor-sektor basis dari kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta kecamatan-kecamatan yang akan menjadi daerah pendukung atau <i>hinterland</i> -nya bagi pusat pertumbuhan tersebut
2.	Eta Rahayu dan Eko Budi Santoso	Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Gunung Kidul	2014	Menganalisis kecamatan-kecamatan yang tidak layak menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Gunung Kidul dan menganalisis kecamatan-kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan struktur ekonomi di Kabupaten Gunung Kidul	a. Analisis Skalogram b. Analisis Tipologi Klassen	Diketahuinya kecamatan-kecamatan yang tidak layak menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Gunung Kidul serta kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan struktur ekonomi di Kabupaten Gunung Kidul

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Tahun	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Angelina K. Luturkey	Analisis Pengaruh Pusat Pertumbuhan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus: Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru)	2016	Menganalisis pengaruh pusat-pusat pertumbuhan terhadap perkembangan kota dan sosial ekonomi masyarakat	a. Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas	Diketahuinya pengaruh dari pusat pertumbuhan terhadap sosial ekonomi masyarakat yang ada di Kecamatan Tampan Pekanbaru
4.	Akmal Fadli	Kajian Pusat-Pusat Pelayanan dan Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Pelalawan	2017	Menentukan pusat-pusat pelayanan dan pengaruhnya terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Pelalawan.	a. Analisis Tingkat Kecukupan/Daya Dukung Fasilitas Pelayanan b. Analisis Scalogram dan Indeks Sentralitas c. Analisis Break Point d. Merekomendasikan Kecamatan Pusat Pelayanan e. Analisis Regresi Linear Sederhana	Diketahuinya pusat-pusat pelayanan dan pengaruhnya terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Kampar

Sumber : Hasil Analisis, 2019

2.10. Sintesis Teori

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan di atas, maka kemudian akan dirangkum dalam suatu ringkasan yang berbentuk tabel dengan tujuan agar dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan kesimpulan.

Tabel 2.3. Sintesa Teori

No.	Sub Bab	Teori	Sumber	Tahun	Hasil
1.	Wilayah	Pengertian wilayah	Undang-Undang No. 26 Muta'ali	2007 2015	Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepdanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Pengertian wilayah (<i>Region</i>) adalah suatu area geografis yang Memiliki ciri tertentu dan merupakan media bagi segala sesuatu untuk berlokasi dan berinteraksi
		Tipe-tipe wilayah	Kustiwan	2004	Ada empat tipe wilayah yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 1. Wilayah homogen 2. Wilayah nodal (<i>nodal region</i>) 3. Wilayah administrasi adalah 4. Wilayah perencanaan
2.	Perencanaan pembangunan wilayah	Pengertian pembangunan wilayah	Rustiadi dkk	2009	Pembangunan dapat diartikan sebagai “ upaya sistematika dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik”. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses memanusiaikan manusia. Perencanaan pembangunan wilayah adalah konsep yang utuh dan menyatu dengan pembangunan wilayah. Secara luas, perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.
			Tarigan	2005	
			Asteriani	2011	
			Nugroho dkk,	2004	
			Mulyono	2008	
Huda	2018				

No.	Sub Bab	Teori	Sumber	Tahun	Hasil
			Setiawan	2015	Pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara atau wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya.
3.	Pembangunan Ekonomi Wilayah	Pengertian pembangunan ekonomi wilayah	Subandi Kuncoro Asih Huda	2011 2003 2015 2018	<p>Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran (<i>income per-kapita</i>) dalam jangka panjang.</p> <p>Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.</p>
4.	Perkembangan wilayah	Komponen Perkembangan wilayah	Budiharjo Dewi	1995 2013	Lingkungan alam berhubungan dengan aksesibilitas wilayah yang meliputi luas wilayah, jarak ke ibukota kabupaten dan panjang jalan, sedangkan dari segi penduduk berhubungan dengan jumlah penduduk dan kepadatannya, serta kegiatan ekonomi dan sosial berhubungan dengan jumlah fasilitas sarana sosial dan ekonomi yang mempengaruhi dalam menunjang kebutuhan penduduk di wilayah tersebut.
5.	Kesenjangan wilayah	Pengertian kesenjangan wilayah	Dewi	2013	Kesenjangan wilayah merupakan kondisi dimana terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar wilayah. Permasalahan tersebut masih didominasi adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta rendahnya akses masyarakat terhadap sarana prasarana sosial ekonomi.
		Tolak ukur kesenjangan wilayah	Dewi	2013	Salah satu ukuran untuk mengetahui adanya kesenjangan perkembangan antar wilayah adalah dengan mengetahui diferensiasi perkembangan masing-masing wilayah kecamatan yang ditunjukkan dengan tingkat perkembangannya. Diferensiasi perkembangan dari masing-masing wilayah tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai perbedaan hasil atau jumlah di berbagai sektor pembangunan wilayah.

No.	Sub Bab	Teori	Sumber	Tahun	Hasil
6.	Pusat Pertumbuhan	Pengertian pusat Pertumbuhan	Tarigan	2005	Pusat pertumbuhan (<i>Growt Pole</i>) adalah salah satu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan dan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain disekitarnya.
		Fungsi Pusat Pertumbuhan	Tarigan	2005	<ul style="list-style-type: none"> a. Memudahkan koordinasi dan pembinaan b. Melihat perkembangan wilayah maju dan mudur c. Meratakan pembangunan di seluruh wilayah
		Faktor timbulnya pusat pertumbuhan	Tarigan	2005	<ul style="list-style-type: none"> a. Faktor alam: Pengunungan, dataran ringgi, dataran rendah, cuaca, iklim, rawa-rawa, dan kesuburan tanah. b. Faktor ekonomi: perbedaan kebutuhan antara tempat yang satu dengan yang lain. c. Faktor industri: kebutuhan tenaga kerja, tempat tinggal, danperalatan rumah. d. Faktor sosial: pendidikan, pendapatan, dan kesehatan e. Faktor lalu lintas: jenis transport, kondisi jalan, dan fasilitas lalu lintas lain.
		Teori tempat central (<i>Central Space</i>)	Yunus Santoso Sumaatmadja Nirwani	1999 2012 1981 2014	Diartikan sebagai pusat kota (maupun sub pusat kota), yang merupakan suatu titik/tempat/daerah pada suatu kota yang memiliki peran sebagai pusat dari segala kegiatan kota antara lain politik, sosial, budaya, ekonomi dan teknologi
		Konsep tempat sentral	Tarigan	2005	Konsep dasar dari teori Central Place adalah <i>Threshold</i> dan <i>Range</i> . <i>Threshold</i> adalah jumlah minimal (penduduk atau pendapatan) yang diperlukan untuk melancarkan dan menyelaraskan unit pelayanan atau pengertian lainnya adalah minimum pasar sehingga produsen dapat menjaga kelangsungan produksinya tanpa mengalami kerugian, sedangkan <i>Range</i> adalah jarak maksimum yang harus ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dari tempat pusat.

No.	Sub Bab	Teori	Sumber	Tahun	Hasil
		Pengaruh pusat pertumbuhan	Soegimo	2009	<p>a. Pengaruh Pusat-Pusat Wilayah Pertumbuhan Terhadap Pemusatan dan Persebaran Sumber Daya. Kemunculan pusat pertumbuhan akan menarik jumlah tenaga kerja yang banyak dapat dilihat dari arus mobilitas dan migrasi penduduk dari desa ke kota maupun antar provinsi.</p> <p>b. Pengaruh Pusat-Pusat Wilayah Pertumbuhan terhadap Perkembangan Ekonomi Terjadinya peluang kerja di berbagai sektor yang relatif terbuka dan adanya gerakan arus barang agar membawa dampak terjadinya peluang kerja di berbagai sektor yang relatif terbuka.</p> <p>c. Pengaruh Pusat-Pusat Wilayah Pertumbuhan di Bidang Sosial dan Lingkungan Hidup Semakin maraknya kemajuan pusat-pusat pertumbuhan akan mempengaruhi kondisi sosial dan lingkungan hidup masyarakat.</p>
7.	Aspek Sarana prasarana	Pengertian sarana prasarna	Rotinsulu dkk SNI (Badan Standarisasi Nasional)	2017 2004	Mendefinisikan prasarana dan sarana merupakan bangunan dasar yang sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu ruang yang berbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam mempertahankan kehidupannya
8.	Aspek Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	Tarigan	2005	Masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan.
		Ukuran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	Suparmoko Damarjati	1998 2010	Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat. beberapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain : PDB, Pendapatan per Kapita, Pendapatan per Jam Kerja, Harapan Hidup Waktu Lahir.

Sumber : Hasil Identifikasi Penulis, 2019



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam pelaksanaan suatu penelitian, dimana metode penelitian menjadi cara ilmiah atau langkah-langkah penelitian yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi, melakukan analisis, hingga memperoleh hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode penelitian menjadi satu kesatuan dalam sistem penelitian yang terdiri dari beberapa aspek seperti teknik penelitian, tahapan penelitian, kebutuhan data, pendekatan penelitian, dan teknik analisis yang akan digunakan.

3.1. Pendekatan Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan kecamatan yang layak menjadi lokasi pusat-pusat pertumbuhan terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Pelalawan. Untuk mengetahui tujuan tersebut, studi ini didasarkan pada pendekatan deduktif dengan metode analisis deskriptif kuantitatif.

Pendekatan deduktif adalah pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui validasi teori atau pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu (Sangadji dan Sopiah, 2010). Pendekatan ini dapat pula diartikan sebagai pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan kepada perangkat premis yang diberikan, dengan melihat permasalahan secara umum kemudian akan dianalisis satu per satu secara khusus.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu metode analisis dengan mengidentifikasi dan menganalisis data kuantitatif kemudian dijelaskan secara deskriptif.

3.2. Bahan dan Alat Penelitian

Dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini digunakan beberapa bahan dan alat penelitian yang merupakan langkah awal dari kegiatan penelitian ini, diantaranya :

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan penelitian sebagai literatur penelitian.
- b. Alat tulis (pena atau pensil), digunakan untuk mencatat dan menulis data.
- c. Kamera digital, digunakan untuk mendokumentasikan data hasil pengamatan.
- d. Penunjuk waktu, digunakan untuk mengetahui waktu pengambilan data.
- e. Komputer dan printer, untuk mengolah dan mencetak data.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Pelalawan. Alasan dipilihnya lokasi Kabupaten Pelalawan karena Kabupaten Pelalawan merupakan wilayah yang memiliki perkembangan yang relatif cukup pesat oleh pertumbuhan penduduk. Kabupaten Pelalawan juga merupakan kabupaten yang proses perkembangannya cukup intensif baik dari segi penyiapan sarannya maupun perekonomian. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi dengan kenaikan perkembangan wilayah tiap tahun, yang kemudian berimplikasi terhadap ketimpangan wilayah.

Adapun waktu penelitian dilakukan selama sembilan bulan (Bulan Desember 2018 – Bulan Agustus 2019) yang dimulai dari persiapan penyusunan proposal, bimbingan penyusunan proposal, seminar proposal, pengumpulan data primer dan sekunder, pengolahan analisis dan penyusunan laporan hasil, hingga ujian skripsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persiapan Penyusunan Proposal Penelitian	√								
2	Bimbingan Penyusunan Proposal Penelitian	√	√	√	√					
3	Seminar Proposal Penelitian				√					
4	Pengumpulan Data Primer dan Sekunder				√	√				
5	Pengolahan, Analisis Data dan Penyusunan Laporan Hasil Penelitian					√	√	√	√	
6	Seminar Hasil Penelitian								√	
7	Ujian Skripsi									√

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3.4. Teknik Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini dan menyusun laporan penelitian di wilayah studi atau penelitian diperlukan beberapa teknik penelitian yang harus sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian. Secara umum teknik penelitian yang akan digunakan adalah teknik penelitian kuantitatif, yaitu teknik penelitian yang digunakan untuk mengolah, mengidentifikasi, dan menganalisis data atau informasi yang berbentuk angka atau data kualitatif yang sudah diubah dalam bentuk angka. Teknik kuantitatif ini juga didukung dengan kualitatif berupa observasi atau

pengamatan dilapangan secara langsung. Akurasi dan ketepatan hasil penelitian juga akan ditentukan oleh jenis teknik penelitian yang akan digunakan, beberapa teknik penelitian yang akan digunakan adalah :

a. Studi Pustaka atau Studi Literatur Penelitian

Studi pustaka dan studi literatur penelitian dipergunakan untuk mendapatkan kejelasan konsep di dalam penelitian yaitu mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian dan mendapatkan referensi untuk pelaksanaan penelitian. Studi pustaka atau studi literatur penelitian ini dapat menggunakan buku-buku yang berisikan dasar-dasar teori serta rumus-rumus perhitungan yang digunakan mengidentifikasi dan menentukan kecamatan yang layak menjadi lokasi pusat-pusat pertumbuhan terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Pelalawan.

b. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Asra dkk, 2015). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya seperti data dokumentasi dilapangan serta kenampakan fisik per kecamatan. Jenis data primer yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Kebutuhan Data Primer Penelitian

No.	Sektor	Kebutuhan Data Primer	Media Observasi
1.	Kependudukan	Kondisi struktur kependudukan	Foto dan Observasi
2.	Perekonomian	Kondisi kegiatan perekonomian masyarakat	Foto dan Observasi
3.	Ketersediaan Sarana Sosial Ekonomi	Sarana Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dsb)	Foto dan Observasi
		Sarana Kesehatan (Puskesmas, Poliklinik, Praktek dokter, Tempat praktek, dsb)	Foto dan Observasi
		Sarana Peribadatan (Masjid, Surau, Gereja, dsb)	Foto dan Observasi
		Sarana Perekonomian (Toko/Warung, Bank, Pasar, dsb)	Foto dan Observasi

Sumber : Identifikasi Penulis, 2019

c. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain secara tidak langsung. Data sekunder berupa data yang sudah tersedia yang biasanya berupa dokumen atau data-data yang dibutuhkan sehingga seorang peneliti tinggal mencari dan mengumpulkannya (Asra dkk, 2015). Data tersebut didapat di dinas atau instansi terkait antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan (BAPPEDA), Kantor Camat, Perpustakaan Universitas Islam Riau dan Lain-lain. Pengumpulan data dari instansi-instansi terkait diperlukan guna mendukung pembahasan studi yang disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan yang dapat diperoleh

melalui dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian baik secara nasional, catatan-catatan penunjang, literatur, buku-buku perpustakaan, dokumentasi, arsip-arsip dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer. Data-data sekunder yang diperoleh dari observasi dan kunjungan lapangan atau data primer yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Tabel 3.3. Kebutuhan Data Sekunder Penelitian

No.	Sektor	Kebutuhan Data Sekunder	Time Series	Sumber
1.	Kependudukan	Jumlah Penduduk	2014 - 2018	Badan Pusat Statistik (BPS)
2.	Perekonomian	Data PAD (Pendapatan Asli Daerah) per kecamatan	2014 - 2018	Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Camat
		Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kecamatan	2014 - 2018	Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Camat
3.	Ketersediaan Sarana Sosial Ekonomi	Data ketersediaan dan peta sebaran sarana pendidikan	2018	Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
		Data ketersediaan dan peta sebaran sarana kesehatan	2018	Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
		Data ketersediaan dan peta sebaran sarana peribadatan	2018	Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
		Data ketersediaan dan peta sebaran sarana perekonomian	2018	Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Sumber : Identifikasi Penulis, 2019

3.5. Tahap Persiapan Penelitian

Tahap persiapan penelitian diperlukan dalam kegiatan penelitian ini sehingga nantinya dapat diperoleh hasil serta data-data maupun informasi yang lengkap dan akurat. Beberapa tahapan persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Perumusan Masalah, Tujuan, dan Sasaran Studi

Dalam penentuan masalah, peneliti melakukan penelitian diawali dari terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Pelalawan. Maka dari itu diperlukan analisis untuk mengetahui kecamatan yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru dalam membangun wilayah di Kabupaten Pelalawan secara merata, yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran penelitian.

b. Penentuan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi studi dilakukan dengan melihat potensi dari setiap wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat pesat dan tidak hanya dilihat dari kenampakan fisik wilayah saja namun dilihat dari sisi lainnya juga. Maka dari itu lokasi penelitian dilakukan wilayah Kabupaten Pelalawan, yang merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau. Pertimbangan penelitian dilakukan di Kabupaten Pelalawan, agar hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam perkembangan Kabupaten Pelalawan melalui pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Pelalawan.

c. Penentuan Metode Penelitian dan Kebutuhan Data

Untuk mempermudah pelaksanaan survei dan pelaksanaan penelitian maka perlu ditentukan metode penelitian dan kebutuhan data atau informasi yang dibutuhkan dan mendukung pelaksanaan penelitian ini, seperti telah dijelaskan pada sub bab kebutuhan data.

d. Pengurusan Perizinan

Surat ijin ini dikeluarkan oleh pihak jurusan dan diketahui oleh sekretaris prodi dengan ditandatangani oleh dekan fakultas. Surat izin survei ini ditujukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Kemudian DPMPTSP mengeluarkan surat izin pengambilan data ke Kesbangpolinmas Kabupaten Pelalawan lalu diteruskan ke instansi terkait.

e. Perumusan Rencana Pelaksanaan Survei

Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah diperoleh izin untuk melaksanakan survei awal yang sifatnya sementara, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melengkapi data maupun informasi yang masih kurang, baik melalui penyebaran kuisisioner atau angket dan lembar wawancara, observasi lapangan, dan pengamatan langsung di wilayah penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dimana data dan informasi tersebut dapat diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Kunjungan Lapangan atau Observasi

Melakukan kunjungan lapangan atau observasi lapangan pada wilayah studi secara langsung untuk mengidentifikasi dan menentukan kecamatan yang layak menjadi lokasi pusat-pusat pertumbuhan terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Pelalawan. Kegiatan ini pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang akan diidentifikasi dan dianalisis. Hasil observasi dan pengamatan langsung di wilayah studi selain ditulis secara deskriptif juga direkam menggunakan kamera digital.

b. Kunjungan Kepada Badan / Dinas / Lembaga Terkait Penelitian

Mengunjungi badan / dinas / lembaga merupakan teknik pengumpulan data berikutnya khusus untuk data sekunder, berupa laporan kependudukan, penggunaan lahan dan ketersediaan sarana sosial ekonomi yang sesuai dengan tujuan yang telah dijelaskan pada sub bab kebutuhan data. Kunjungan ini dapat dilakukan setelah memperoleh izin untuk pelaksanaan survei data sekunder dari fakultas teknik Universitas Islam Riau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Kesbangpolinmas Kabupaten Pelalawan.

3.7. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data primer yang telah dikumpulkan dari observasi atau pengamatan serta data sekunder yang diperoleh dari kunjungan dinas / instansi yang telah dilakukan masih merupakan data dasar. Agar data tersebut lebih berguna bagi kegiatan penelitian, maka diperlukan pengolahan data dan penyajian data sehingga dapat

dilakukan identifikasi dan analisis. Tahapan pengolahan dan penyajian data yang akan dilakukan yaitu :

a. *Editing* atau Pengecekan Data

Editing merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap data dasar yang telah diperoleh melalui kegiatan observasi dan survei lapangan yang telah dilakukan sebelumnya, apakah terdapat kekeliruan dalam pengisian atau kurang lengkap, palsu, tidak sesuai, dan sebagainya. *Editing* dilakukan dengan harapan akan diperoleh data yang benar-benar *valid* dan *reliable*, serta dapat dipertanggungjawabkan.

b. *Coding* atau Pengelompokan Data

Coding adalah kegiatan pemberian kode atau catatan pada hasil observasi dan survei yang telah dilakukan sebelumnya dengan melakukan pengelompokan data berdasarkan kode data yang telah didapat. Kegiatan ini dilakukan untuk mempermudah dalam kegiatan identifikasi dan analisis data yaitu memungkinkan menemukan data dan informasi secara cepat dan tepat dengan cara mengelompokkan data dan informasi ke dalam kategori atau variabel penelitian.

c. *Tabulating* atau Penyajian Data Berbentuk Tabel

Setelah melakukan pengelompokan data berdasarkan kategori atau variabelnya. Maka tahapan selanjutnya adalah melakukan kegiatan tabulating atau penyajian data dalam bentuk tabel-tabel dengan tujuan untuk mempermudah penyajian, identifikasi, dan analisis data. Pengelompokan

data primer kedalam kategori tertentu juga sering dilakukan dengan menggunakan metode tabulating, sedangkan data sekunder yang sudah berbentuk tabel tidak perlu melalui tahapan ini dan untuk penyajiannya disesuaikan dengan analisis yang dilakukan. Tahapan ini dibantu dengan aplikasi Microsoft Excel 2010.

d. **Pemetaan**

Data dan informasi yang telah disusun dan dikelompokkan secara teratur dan rapi kemudian akan disajikan dalam bentuk peta untuk mempermudah dalam memvisualisasikan hasil survei dan observasi lapangan kedalam sebuah gambar peta dengan menggunakan aplikasi ArcGis 10.4.

3.8. Pelaksanaan Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian mengenai “Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Pada Tingkat Kecamatan Terhadap Perkembangan Wilayah Kabupaten Pelalawan” secara umum dapat dibagi menjadi tiga yaitu tahapan survei dan observasi, tahapan identifikasi dan analisis, serta tahapan komparasi hasil analisis terhadap pusat-pusat pertumbuhan pada tingkat kecamatan terhadap perkembangan wilayah dengan uraian sebagai berikut :

3.8.1. Identifikasi dan Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Pada Tingkat Kecamatan Terhadap Perkembangan Wilayah

Hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya menjadi dasar data dan informasi yang diperoleh selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis pusat-pusat pertumbuhan pada tingkat kecamatan terhadap perkembangan wilayah dengan

menggunakan data-data hasil survey primer dan data-data dari survei sekunder, seperti sektor kependudukan, perekonomian, ketersediaan sarana sosial ekonomi.

3.8.2. Hasil Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Pada Tingkat Kecamatan Terhadap Perkembangan Wilayah

Setelah dilakukan identifikasi dan dianalisis kemudian akan mendapatkan hasil analisis, hasil tersebut berdasarkan analisis pusat-pusat pertumbuhan pada tingkat kecamatan terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Pelalawan. Dapat diketahui pula kecamatan yang layak menjadi lokasi pusat-pusat pertumbuhan terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Pelalawan.

3.9. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis skalogram dan analisis struktur pertumbuhan ekonomi. Dimana metode skalogram digunakan untuk menentukan hirarki kecamatan yang tergolong sebagai pusat pelayanan berdasarkan sarana sosial ekonomi yang tersedia. Sedangkan analisis struktur pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menentukan tingkat kecamatan berdasarkan perekonomian. Berikut adalah metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

3.9.1. Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas

Metode Skalogram adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran fungsi sarana pelayanan sosial dan ekonomi serta hirarki pusat pengembangan dan prasarana pembangunan. Metode ini memberikan

hirarki atau urutan peringkat wilayah berdasarkan jenis dan jumlah unit prasarana pembangunan dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit, sehingga dapat ditentukan wilayah pusat pengembangan (Muta'ali, 2015).

Salah satu metode penentuan tingkat perkembangan wilayah, yaitu dengan menggunakan analisis hirarki wilayah (analisis skalogram) yang didasarkan pada ketersediaan sarana dan prasarana wilayah menurut jumlah dan jenis unitnya. Metode skalogram ini bisa digunakan dengan menuliskan jumlah sarana sosial ekonomi yang dimiliki oleh setiap wilayah, atau menuliskan ada/tidaknya sarana sosial ekonomi tersebut di suatu wilayah tanpa memperhatikan jumlah/kuantitasnya. Dalam metode skalogram, seluruh sarana sosial ekonomi yang dimiliki oleh setiap unit wilayah didata dan disusun dalam satu tabel. Tujuan digunakannya analisis skalogram adalah untuk mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang dapat dikelompokkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan pada sarana sosial ekonomi perkotaan yang tersedia. Dalam analisis klasifikasi kota dikelompokkan berdasarkan pada tiga komponen sarana utama, yaitu (Blakcley, 1994 dalam Ermawati 2010) :

- a. *Differentiation* adalah sarana yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Sarana ini menunjukkan bahwa adanya struktur kegiatan ekonomi lingkungan yang kompleks, jumlah dan tipe sarana komersial akan menunjukkan derajat ekonomi kawasan/kota dan kemungkinan akan menarik sebagai tempat tinggal dan bekerja.
- b. *Solidarity* adalah sarana yang berkaitan dengan aktivitas sosial. Sarana ini menunjukkan tingkat kegiatan sosial dari kawasan/kota. Sarana tersebut dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan sosial namun

pengelompokkan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi sosialnya relatif lebih besar dibandingkan sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan (*benefit oriented*).

- c. *Centrality* adalah sarana yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi-politik/pemerintahan. Sarana ini menunjukkan bagaimana hubungan dari masyarakat dalam system kota/komunitas. Sentralitas ini diukur melalui perkembangan hirarki dari institusi sipil, misalnya kantor pos, sekolahan, dan kantor pemerintahan dan sejenisnya.

Analisis skalogram yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode menuliskan ada atau tidaknya sarana (sarana sosial dan ekonomi) di suatu wilayah, yaitu dengan mengisikan angka 1 bila sarana tersebut terdapat pada suatu wilayah dan mengisikan angka 0 bila sarana tersebut tidak terdapat di suatu wilayah (Rondinelli,1985 dalam Ermawati 2010). Selanjutnya analisis skalogram ini dapat dikembangkan untuk menentukan indeks sentralitas terbobot. Indeks sentralitas ini tidak hanya berdasarkan jumlah fungsi atau sarana pelayanan yang ada pada suatu wilayah, tetapi juga berdasarkan frekuensi keberadaan fungsi atau sarana tersebut pada wilayah yang ditinjau.

Dalam prakteknya di lapangan, hendaknya matriks fungsi dengan metode skalogram ini dilengkapi dengan data-data yang disusun melalui matriks fungsi lainnya, dimana data-data yang disampaikan dihitung secara lebih detail, dengan menggunakan Teknik pembobotan, pemberian rangking, dan sebagainya (Riyadi, 2003 dalam Ermawati,2010). oleh karena itu, untuk mengetahui pusat pelayanan di suatu wilayah dalam penelitian ini menggunakan analisis skalogram dengan menggabungkan analisis indeks sentralitas dengan teknik pembobotan. Fungsi alat

analisis indeks sentralitas ini sama dengan analisis skalogram, yaitu digunakan untuk mengetahui struktur/hirarki pusat pelayanan yang ada didalam suatu wilayah dengan menghitung berapa jumlah fungsi yang ada, berapa jenis fungsi serta seberapa jenis fungsi serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu wilayah (Riyadi, 2003 dalam Ermawati,2010).

Berikut ini cara/langkah-langkah dalam analisis skalogram dengan indeks sentralitas (Ermawati, 2010) :

1. Kolom (1 dan 2) diisi dengan nomor urut untuk wilayah (kecamatan) dan nama-nama kecamatan yang ada di Kabupaten/kota terkait.
2. Kolom selanjutnya adalah kolom yang diisi dengan jenis fungsi (jenis sarana). Pengisian kolom jenis fungsi diisi dengan nilai 1 jika ada sarana tersebut disuatu wilayah atau 0 jika tidak ada sarana yang dimaksud di suatu wilayah.
3. Kolom “Jumlah Jenis Fungsi/Sarana” diisi dengan menjumlahkan masing-masing fungsi yang ada pada setiap kecamatan (setiap hari).
4. Pada baris “Total Fungsi” diisi dengan menjumlahkan jenis fungsi yang ada dari seluruh kecamatan (setiap kolom)

Untuk menguji kelayakan skalogram maka ada rumus yang digunakan yaitu *Coeffisien Of Reproducibility* (COR) sebagai berikut :

$$COR = 1 - \frac{\sum e}{N \times K}$$

(Sumber : Gaffara, 2015)

Keterangan :

COR = *Coeffisien Of Reproducibility*

e = Jumlah kesalahan

N = Jumlah Subyek/wilayah yang diteliti

K = Jumlah Obyek/sarana yang diteliti

Dalam hal ini koefisien dianggap layak apabila bernilai 0,9-1.

5. Pada baris “Sentralitas Total”, pada setiap kolom/baris memiliki nilai yang sama, yaitu 100.

Pada baris terakhir (nilai bobot), dihitung nilai bobot yang berdasarkan pada nilai total sentralitas dibagi dengan jumlah fungsi masing-masing kolom.

Rumus Indeks sentralitas adalah :

$$C = t/T$$

(Sumber: Muta'ali, 2015)

Keterangan :

C = Bobot Fungsi

t = nilai sentralitas total, yaitu 100

T = Jumlah total fungsi

Angka nilai bobot ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi keberadaan suatu fungsi akan semakin kecil nilai bobotnya, sebaliknya semakin rendah frekuensi keberadaan suatu fungsi, semakin tinggi nilai bobotnya.

6. Langkah selanjutnya adalah mengalikan nilai bobot sarana dengan nilai fungsi sarana setiap kecamatan (setiap kolom).
7. Setelah langkah (point 6) selesai, maka langkah selanjutnya adalah menjumlahkan seluruh nilai bobot dari dari berbagai jenis fungsi setiap kecamatan (berdasarkan baris/horizotal). Penjumlahan tersebut akan menghasilkan nilai *indeks sentralitas*.

8. Dari nilai indeks sentralitas tersebut kemudian akan ditentukan hirarki pusat pelayanan tingkat kecamatan di Kabupaten pelalawan yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan kecamatan sebagai pusat pelayanan.

Menurut Tarigan (2005) untuk menentukan banyaknya kelas dari kecamatan sebagai pusat pelayanan, digunakan metode Sturgess dengan rumus :

$$K = 1 + 3.3 \log n$$

(Sumber: Tarigan, 2005)

Keterangan :

K = Banyaknya Kelas

n = Banyaknya Kecamatan

Kecamatan yang termasuk dalam kelas/orde 1 merupakan daerah dengan tingkat sarana paling tinggi, sedangkan kelas/orde yang terakhir adalah daerah tingkat sarana paling rendah. Adapun kelas/orde ini diurutkan sesuai dengan jumlah dan jenis sarana dari daerah yang mempunyai jumlah dan jenis sarana paling lengkap sampai dengan daerah dari daerah yang mempunyai jumlah dan jenis sarana paling sedikit sesuai dengan interval masing-masing kelas. Untuk menentukan besarnya interval kelas yaitu dengan cara :

$$I = \frac{A - B}{K}$$

(Sumber : Yulianto, 2015)

Keterangan :

I = Interval

A = Jumlah sarana tertinggi

B = Jumlah sarana terendah

k = Banyaknya kelas

Analisis *skalogram* dan *indeks sentralitas* ini dapat menunjukkan bahwa wilayah yang merupakan hirarki tinggi adalah kecamatan yang memiliki jumlah jenis fungsi/ sarana dan nilai *indeks sentralitas* yang tinggi atau kecamatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pusat pelayanan, sedangkan wilayah-wilayah yang merupakan hirarki paling rendah ditentukan oleh semakin sedikitnya jumlah jenis fungsi/ sarana dan nilai *indeks sentralitas* yang rendah pula.

3.9.2. Analisis Struktur Pertumbuhan Ekonomi

Dalam analisis struktur pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa langkah-langkah yakni menentukan PDRB per Kapita, menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan menentukan tipologi kelas.

1. Menentukan PDRB per Kapita

PDB/Kapita atau PDRB/Kapita digunakan sebagai dasar sistem klasifikasi negara maju, berkembang, dan terbelakang, sehingga dengan analogi tersebut tingkat klasifikasi perkembangan atau pembangunan wilayah juga tercermin dari tinggi rendahnya pendapatan perkapita. Semakin tinggi PDRB/kapita semakin tinggi tingkat perekonomian wilayah dan semakin maju. Kemakmuran dan kemajuan wilayah tidak hanya ditentukan dari besaran PDRB, namun juga tergantung banyaknya jumlah penduduk, dimana jika penduduk terlalu besar dapat memperkecil pendapatan perkapita (Muta'ali, 2015).

Selain itu, PDRB/Kapita tidaklah selalu menggambarkan pendapatan riil masyarakat dan distribusi pendapatan yang sama, sehingga seringkali

dijumpai banyak wilayah memiliki PDRB/kapita tinggi namun masyarakatnya masih miskin dikarenakan distribusinya yang tidak merata. PDRB/Kapita di ukur dengan Rp/kapita (Muta'ali, 2015). Berikut adalah rumus untuk mencari PDRB per Kapita (Rp/Kapita) dalam bentuk kabupaten.

$$\text{PDRB per Kapita (Rp/Kapita)} = \frac{\text{PDRB Kabupaten}}{\sum \text{Penduduk Kabupaten}}$$

Sumber : Muta'ali, 2015

Selain untuk merumuskan PDRB per Kapita dalam bentuk Kabupaten, berikut adalah rumus untuk menentukan PDRB per Kapita dalam bentuk kecamatan.

$$\text{PDRB per Kapita (Rp/Kapita)} = \frac{\sum \text{Penduduk per Kecamatan}}{\sum \text{Penduduk Kabupaten}} \times \text{PDRB Kabupaten}$$

Sumber : Muta'ali, 2015

2. Menentukan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan PDB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya (Muta'ali, 2015). Berikut adalah rumus untuk menentukan pertumbuhan ekonomi.

$$r = \left[\left(\sqrt[n-1]{\frac{\text{PDRB } t_n}{\text{PDRB } t_0}} - 1 \right) \right] \times 100\%$$

Sumber : Muta'ali, 2015

Keterangan :

r = Laju pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap tahun

n = Jumlah tahun (dihitung mulai tahun awal – tahun akhir pengamatan)

$PDRB_{tn}$ = PDRB tahun terakhir periode

$PDRB_{to}$ = PDRB tahun awal periode

3. Menentukan Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen pertama kali dikenalkan oleh Leo Klassen (1965) dari Netherlands Economics Institute. Tipologi Klassen ini adalah model yang paling populer untuk mengidentifikasi tingkat perkembangan perekonomian wilayah dengan menggunakan basis data besaran berdasarkan rata-rata. Hasil tipologi kelasen berupa klasifikasi wilayah (Muta'ali, 2015).

Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan (PDRB) per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita pada sumbu horizontal (Damarjati, 2010).

Formulasi tipologi kelasen potensi pengembangan wilayah (misalnya dapat tipologi kecamatan-kecamatan dalam kabupaten) sebagai berikut (Muta'ali, 2015) :

Tabel 3.4. Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB per Kapita (Y)	
	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
$r_i > r$	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh (<i>high growth and high income</i>)	Wilayah berkembang cepat (<i>high growth but low income</i>)
$r_i < r$	Wilayah maju tapi tertekan (<i>low growth but high income</i>)	Wilayah relatif tertinggal (<i>low growth and low income</i>)

Sumber : Syafrizal (1997) dalam Muta'ali (2015)

Keterangan :

r_i : Laju pertumbuhan PDRB Kecamatan i

r_n : Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten

Y_i : PDRB per kapita Kecamatan i

Y_n : PDRB per kapita Kabupaten

Menurut Tipologi Klassen dalam Damarjati (2010), perkembangan pembangunan antar kabupaten/kota dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*High Growth and High Income*)

Merupakan daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya, daerah- daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah-daerah ini merupakan daerah yang mempunyai potensi daerah pembangunan yang besar dan telah dimanfaatkan secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat, karena diperkirakan daerah ini akan terus berkembang di masa yang akan datang.

b. Daerah maju tapi tertekan (*High Income but Low Growth*)

Merupakan daerah-daerah yang telah relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju, tetapi di masa yang akan datang diperkirakan pertumbuhan tidak akan begitu cepat walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

c. Daerah berkembang cepat (*High Growth but Low Income*)

Merupakan daerah – daerah dengan potensi pengembangan yang dimiliki sangat besar tetapi masih belum diolah sepenuhnya dengan baik. Karena itu, walaupun tingkat pertumbuhannya sangat tinggi, namun tingkat pendapatan per kapita yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah – daerah lain.

d. Daerah relatif tertinggal (*Low Growth and Low Income*)

Merupakan daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang berada di bawah rata – rata. Ini artinya, baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa daerah ini tidak berkembang di masa yang akan datang. Melalui perkembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan masyarakat setempat, diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketinggalan.

3.10. Desain Survei

Desain survei ini berisi tentang gambaran variabel-variabel yang digunakan dalam melakukan penelitian atau semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Nazir, 2003 dalam Tovani 2018). Desain penelitian berisikan yaitu berupa data, sumber, hingga metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.5. Desain Survei

Tujuan	Sasaran	Variabel	Sub Variabel	Jenis Data	Sumber Data	Metode Pengambilan Data	Metode Analisis	Output
Mengidentifikasi dan menentukan kecamatan yang layak menjadi lokasi pusat-pusat pertumbuhan terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Pelalawan	a. Mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi	Ketersediaan sarana sosial ekonomi	a. Jumlah sarana pendidikan b. Jumlah sarana kesehatan c. Jumlah sarana peribadatan d. Jumlah sarana perekonomian	Data sekunder, data primer	a. BPS b. BAPPEDA c. PU dan Penataan Ruang	a. Observasi b. Kunjungan dinas terkait	a. Kuantitatif b. Skalogram dan Indeks Sentralis	Teridentifikasinya kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi
	b. Mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan kondisi struktur pertumbuhan ekonomi	Karakteristik struktur pertumbuhan perekonomian	a. Laju pertumbuhan ekonomi b. Pendapatan (PDRB)	Data sekunder, data primer	a. BPS b. Dinas Pendapatan Daerah c. Kantor Camat d. BAPPEDA bidang perekonomian	a. Observasi b. Kunjungan dinas terkait	a. Kuantitatif b. Kualitatif c. Tipologi Klassen	Teridentifikasinya kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan kondisi struktur pertumbuhan ekonomi

Sumber : Hasil Analisis, 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

4.1. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintah Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940-1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Opresional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu di antaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten ini memiliki luas 13.924,94 Km² dan pada awal terbentuknya terdiri 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut, dan Kecamatan Kuala Kampar.

Dalam perkembangannya, Pada Tahun 2017 Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri atas 12 wilayah kecamatan, yang meliputi 104 Desa dan 14 Kelurahan. Pada tahun 2001 kepala daerah Kabupaten Pelalawan ditunjuk oleh DPRD dengan pasangan H.T Azmun Jaafar dan H. Anas Badrun. Kemudian bulan Februari 2006, dilakukan pemilihan kepala daerah langsung pertama dengan pasangan terpilih H.T Azmun Jaafar dan Drs. H. Rustam Efendi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode 2006-2012. Pemilukada tahap kedua di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2012. Dalam Rapat

Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Februari 2012 ditetapkan pasangan HM Haris dan Marwan Ibrahim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode 2012-2016.

4.2. Aspek Fisik

4.2.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur Pulau Sumatera antara 1° 25' LU sampai 0° 20' LS dan antara 100° 42' BT sampai 103° 28' BT dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan peta batas wilayah Kabupaten Pelalawan di bawah ini.

4.2.2. Luas Wilayah Administrasi

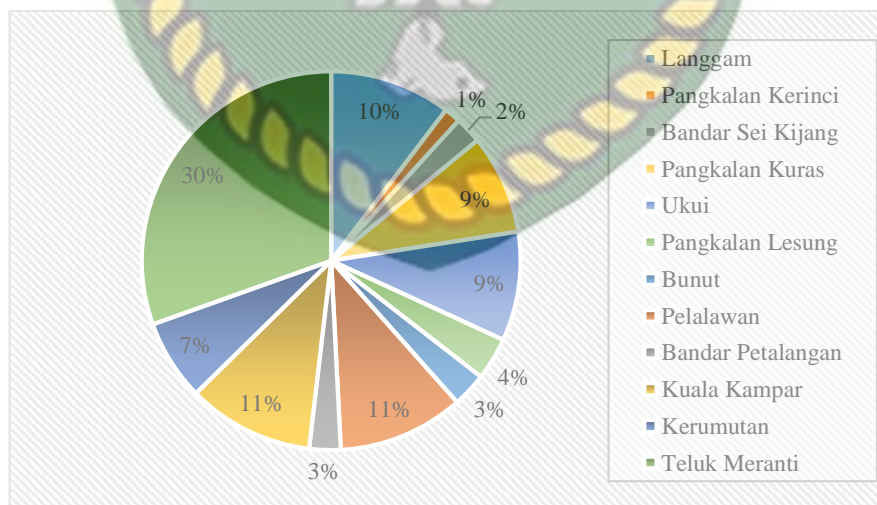
Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan. Luas Kabupaten Pelalawan 1.392.494,29 Ha. kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan rincian kecamatan dan luasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 sedangkan untuk letak dan batas administrasi disajikan pada Gambar 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

	Kecamatan	Luas (Km ²)	Presentase (%)
1.	Langgam	1.442,45	10,36
2.	Pangkalan Kerinci	193,56	1,39
3.	Bandar Sei Kijang	319,41	2,29
4.	Pangkalan Kuras	1.183,89	8,50
5.	Ukui	1.299,56	9,33
6.	Pangkalan Lesung	504,85	3,63
7.	Bunut	408,03	2,93
8.	Pelalawan	1.498,11	10,76
9.	Bandar Petalangan	372,55	2,68
10.	Kuala Kampar	1.502,65	10,79
11.	Kerumutan	960,04	6,89
12.	Teluk Meranti	14.239,84	30,45
	Jumlah	13.924,94	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Pelalawan Dalam Angka 2018

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam bentuk grafik dibawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2018

Gambar 4.2. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas kecamatan terbesar berada pada Kecamatan Teluk Meranti dengan luas 14.239,84 Km² dan persentasenya 30,45%, kemudian untuk kecamatan yang berada di posisi kedua dalam luas wilayah adalah Kecamatan Kuala Kampar dengan luas 1.502,56 Km² dan persentasenya 10,79 %, sedangkan untuk luas wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 193,56 Km² dan persentasenya 1,39 %.

4.3. Aspek Kependudukan

4.3.1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

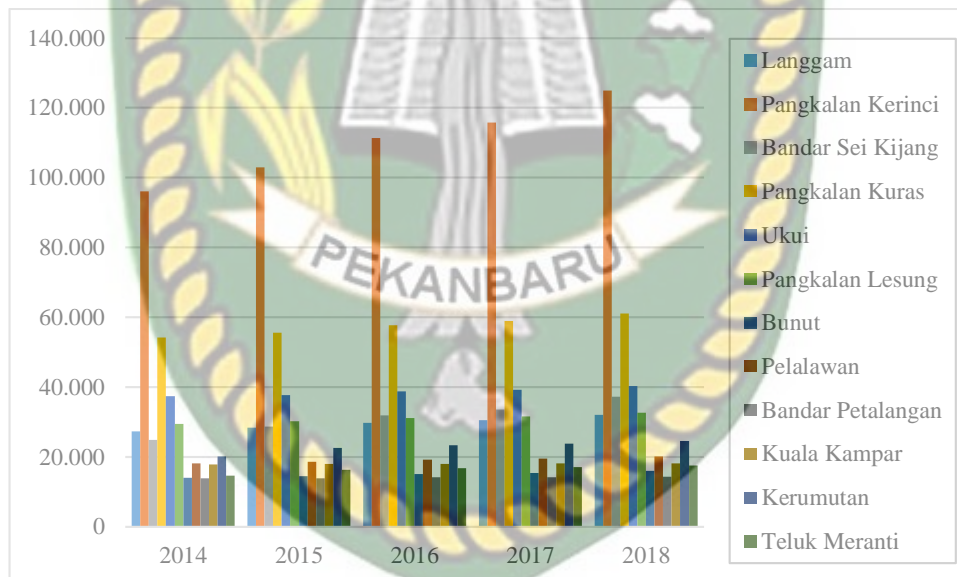
Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2014 berjumlah 367.724 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu 96.127 jiwa dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Bandar Petalangan yaitu 13.862 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kabupaten Pelalawan meningkat dengan jumlah 438.788 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar masih berada pada Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu 124.974 jiwa dan jumlah penduduk terkecil juga masih berada pada Kecamatan Bandar Petalangan yang mengalami peningkatan jumlah menjadi 14.368 jiwa. Berikut adalah tabel jumlah dan perkembangan penduduk dari Tahun 2014-2018.

Tabel 4.2. Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan Tahun 2014-2018

No.	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Langgam	27.303	28.368	29.797	30.511	31.971
2.	Pangkalan Kerinci	96.127	102.926	111.385	115.764	124.974
3.	Bandar Sei Kijang	24.768	28.725	31.908	33.599	37.233
4.	Pangkalan Kuras	54.181	55.556	57.770	58.856	61.055
5.	Ukui	37.320	37.715	38.764	39.263	40.258
6.	Pangkalan Lesung	29.493	30.158	31.147	31.624	32.582
7.	Bunut	14.046	14.493	15.071	15.355	15.929
8.	Pelalawan	18.117	18.563	19.214	19.530	20.165
9.	Bandar Petalangan	13.862	13.902	14.106	14.195	14.368
10.	Kuala Kampar	17.877	17.948	18.019	18.055	18.126
11.	Kerumutan	20.072	22.484	23.287	23.699	24.546
12.	Teluk Meranti	14.558	16.276	16.786	17.047	17.581
Jumlah		367.724	387.114	407.254	417.498	438.788

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2018

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam bentuk grafik dibawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2018

Gambar 4.3. Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan Tahun 2014-2018

Berdasarkan tabel dan gambar diatas diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak dalam 5 tahun terakhir (2018-2014) didominasi oleh Kecamatan Pangkalan Kerinci, sedangkan untuk dominasi jumlah penduduk kedua adalah

Kecamatan Pangkalan Kuras. Sedangkan untuk jumlah penduduk terendah selama rentang waktu 5 tahun adalah Kecamatan Bunut.

4.3.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

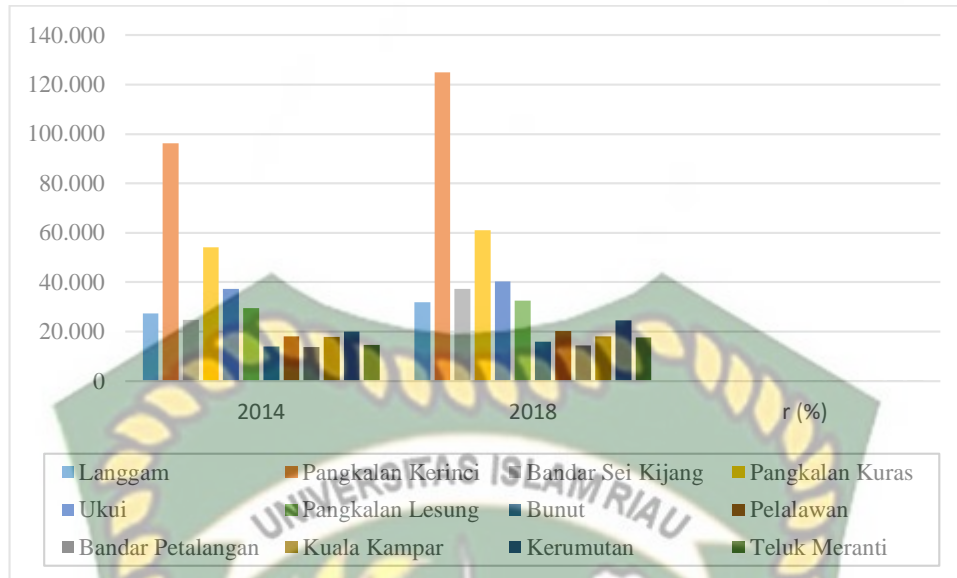
Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan presentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Secara umum jumlah penduduk disuatu daerah ataupun wilayah tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya tingkat kelahiran, tingkat kematian, maupun faktor lainnya seperti migrasi.

Tabel 4.3. Laju Pertumbuhan Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan Tahun 2014 dan 2018

No	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)		r (%)
		2014	2018	
1.	Langgam	27.303	31.971	3,15
2.	Pangkalan Kerinci	96.127	124.974	5,24
3.	Bandar Sei Kijang	24.768	37.233	8,15
4.	Pangkalan Kuras	54.181	61.055	2,38
5.	Ukui	37.320	40.258	1,52
6.	Pangkalan Lesung	29.493	32.582	1,96
7.	Bunut	14.046	15.929	2,52
8.	Pelalawan	18.117	20.165	2,14
9.	Bandar Petalangan	13.862	14.368	0,72
10.	Kuala Kampar	17.877	18.126	0,28
11.	Kerumutan	20.072	24.546	4,02
12.	Teluk Meranti	14.558	17.581	3,77
Jumlah		367.724	438.788	3,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2014 dan 2018

Laju pertumbuhan penduduk selama 5 tahun (2014-2018) tercatat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pembangunan yang giat dilaksanakan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pelalawan dari tahun 2014-2018 adalah 3,53 % per tahunnya. Pada tahun 2014 hingga 2018, perkembangan penduduk pada 12 (dua belas) kecamatan menunjukkan trend positif (meningkat). Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam bentuk grafik dibawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2018

Gambar 4.4. Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan Tahun 2014-2018

4.3.3. Sebaran Penduduk

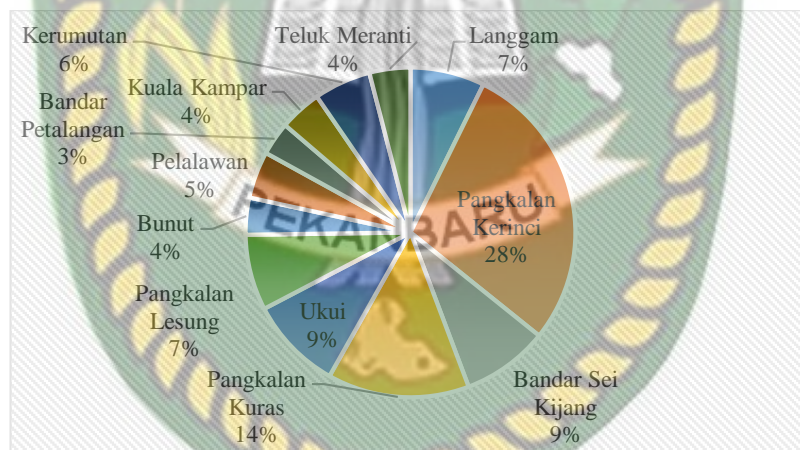
Sebaran penduduk di Kabupaten Pelalawan dicerminkan oleh besar kecilnya jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk yang terdistribusi pada setiap kecamatan. Seperti halnya yang terjadi pada kota-kota lainnya, bahwa penyebaran penduduk relatif dipengaruhi oleh kecenderungan penduduk terkonsentrasi pada tempat dimana akses terhadap sarana pelayanan kota dengan biaya transportasi yang rendah merupakan pilihan utama penduduk dalam menentukan tempat tinggal. Dalam hal ini, rendahnya nilai lahan tidak akan banyak memberikan daya tarik yang dapat mempengaruhi minat penduduk untuk bertempat tinggal di lokasi-lokasi yang relatif masih kosong, namun memiliki tingkat pelayanan pra sarana dan sarana kota yang rendah.

Tabel 4.4. Penyebaran Penduduk Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Langgam	31.971	7,29
2.	Pangkalan Kerinci	124.974	28,48
3.	Bandar Sei Kijang	37.233	8,49
4.	Pangkalan Kuras	61.055	13,91
5.	Ukui	40.258	9,17
6.	Pangkalan Lesung	32.582	7,43
7.	Bunut	15.929	3,63
8.	Pelalawan	20.165	4,60
9.	Bandar Petalangan	14.368	3,27
10.	Kuala Kampar	18.126	4,13
11.	Kerumutan	24.546	5,59
12.	Teluk Meranti	17.581	4,01
	Jumlah	438.788	100

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan Dalam Angka, 2014 - 2018

Selain dapat diketahui melalui tabel, sebaran penduduk dapat juga diketahui melalui gambar dibawah ini.

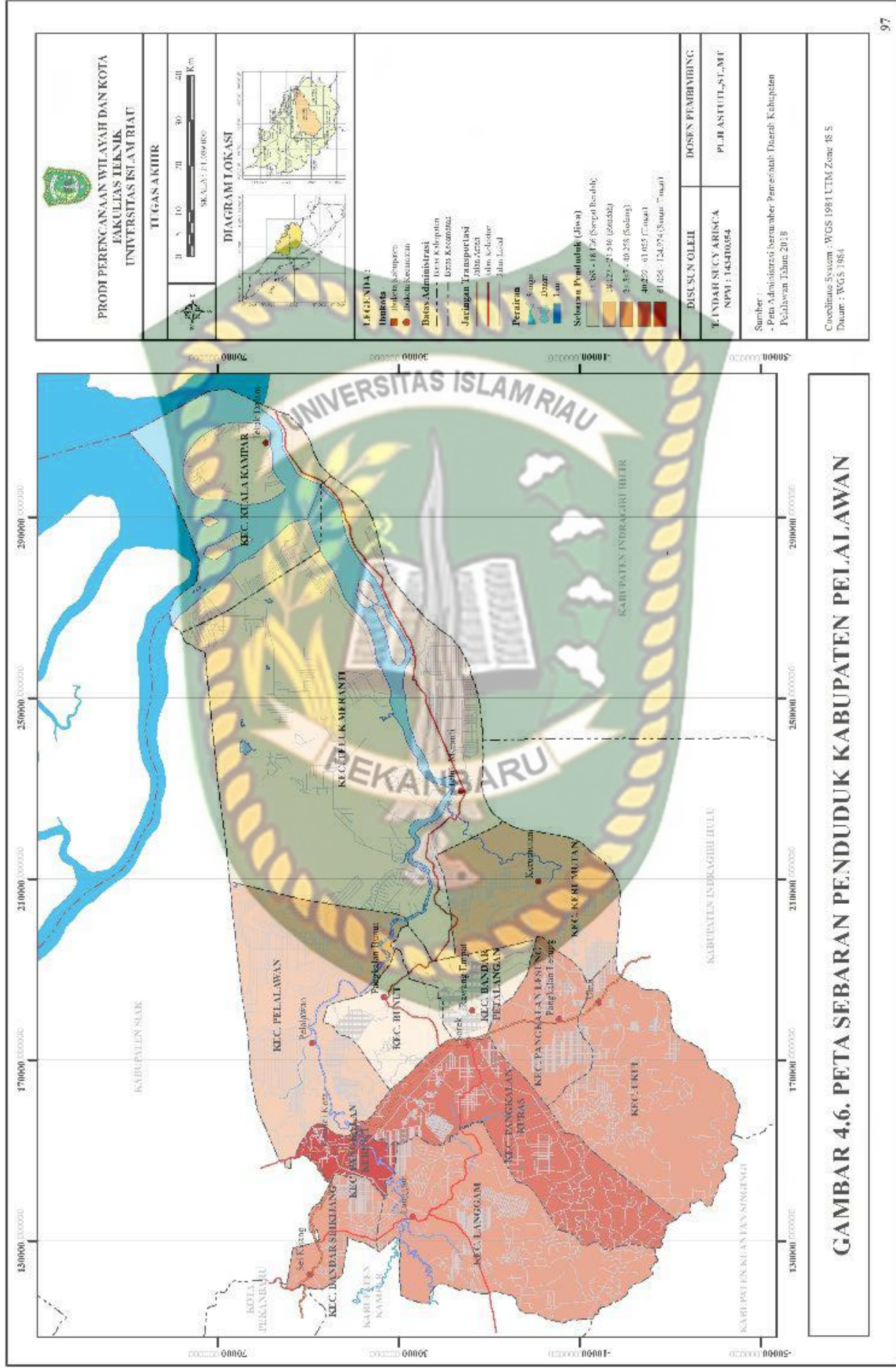


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2018

Gambar 4.5. Penyebaran Penduduk Kabupaten Pelalawan Menurut Kecamatan Tahun 2018

Pada tahun 2018, konsentrasi tertinggi penduduk adalah di Kecamatan Pangkalan Kerinci (28%), diikuti Kecamatan Pangkalan Kuras (14%). Sedangkan konsentrasi terendah penduduk berada di Kecamatan Bandar Petalangan (3%). Dari data tabel dan gambar di atas dapat terlihat bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Pelalawan tidak merata.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



4.4. Aspek Ketersediaan Sarana Sosial Ekonomi

4.4.1. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan salah satu komponen pembangunan yang sangat penting dalam mempersiapkan para penerus bangsa, oleh karena itu pendidikan harus dilakukan sejak dini. Semakin baik pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat, maka akan semakin baik pula pembangunan dan pengembangan daerah yang dilakukan dan akan berdampak baik juga dalam berbagai aspek pembangunan di daerah tersebut. jumlah sarana pendidikan, yaitu sekolah di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2017 mencapai 443 sekolah yang terdiri dari TK, SD, SMP/SLTP, SMA/SLTA. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui tabel dibawah ini.

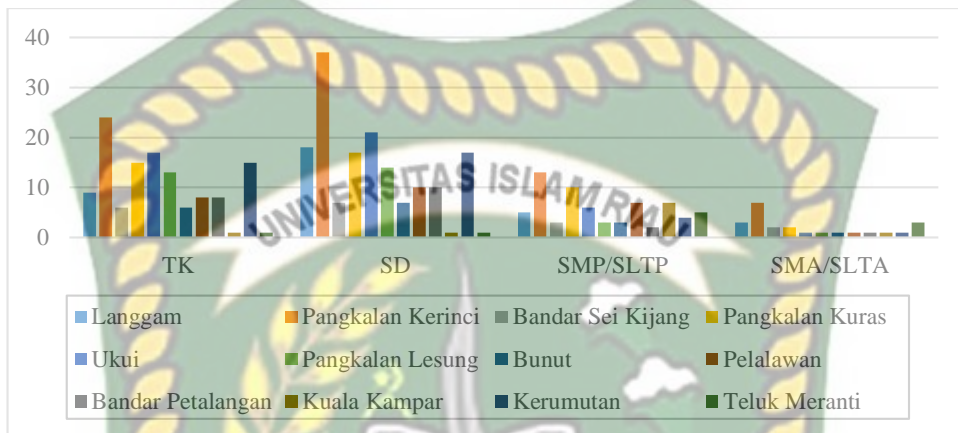
Tabel 4.5. Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Sarana Pendidikan			
		TK	SD	SMP/SLTP	SMA/SLTA
1.	Langgam	9	18	5	3
2.	Pangkalan Kerinci	24	37	13	7
3.	Bandar Sei Kijang	6	7	3	2
4.	Pangkalan Kuras	15	17	10	2
5.	Ukui	17	21	6	1
6.	Pangkalan Lesung	13	14	3	1
7.	Bunut	6	7	3	1
8.	Pelalawan	8	10	7	1
9.	Bandar Petalangan	8	10	2	1
10.	Kuala Kampar	1	1	7	1
11.	Kerumutan	15	17	4	1
12.	Teluk Meranti	1	1	5	3
Jumlah		123	227	69	24

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2018

Dapat dilihat dari tabel diatas, jumlah sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Pelalawan sebanyak 443 sarana yang tersebar di masing-masing kecamatan. Dari jumlah tersebut dirincikan pada masing-masing jenis sarana pendidikannya baik swasta maupun negeri. Dimulai Taman Kanak-kanak (TK)

terdapat sebanyak 123 unit. Sekolah Dasar (SD) terdapat sebanyak 227 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat sebanyak 69 unit, sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat sebanyak 24 unit. Untuk lebih jelasnya dapat pula dilihat melalui gambar dibawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2018

Gambar 4.7. Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018



Sumber : Hasil Survey Primer, 2019

Gambar 4.8. Sarana Pendidikan Kabupaten Pelalawan

4.4.2. Sarana Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan bagian penting dalam perkembangan wilayah karena kesehatan sangat menyangkut terhadap masyarakat yang berperan sebagai salah satu pelaku pembangunan maka dari itu pelayanan akan kesehatan masyarakat harus benar-benar lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut merupakan jumlah unit pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Tabel 4.6. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Kesehatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Sarana Kesehatan				
		Posyandu	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Praktek Dokter	Rumah Sakit
1.	Langgam	21	1	3	1	0
2.	Pangkalan Kerinci	38	2	16	11	3
3.	Bandar Sei Kijang	13	1	2	0	0
4.	Pangkalan Kuras	59	2	4	0	0
5.	Ukui	45	1	2	2	0
6.	Pangkalan Lesung	33	1	0	1	0
7.	Bunut	19	1	0	0	0
8.	Pelalawan	23	1	2	0	0
9.	Bandar Petalangan	20	1	2	1	0
10.	Kuala Kampar	34	1	0	0	0
11.	Kerumutan	33	1	0	2	0
12.	Teluk Meranti	23	1	1	0	0
Jumlah		361	14	32	18	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2018

Dari tabel jumlah sarana kesehatan diatas dapat diketahui jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Pelalawan berjumlah 428 unit ini terbagai atas rumah sakit yang mana rumuah sakit terbanyak terdapat di Kecamatan Pangkalan Kerinci seanyak 3 unit. Sarana kesehatan praktek dokter yang terbanyak terdapat di Kecamatan Pangkalan Kerinci Sebanyak 11 unit. Selanjutnya sarana kesehatan puskesmas yang terbanyak terdapat di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan

Kecamatan Pangkalan Kuras. Dan sarana kesehatan posyandu yang terbanyak terdapat di Kecamatan pangkalan kuras sebanyak 59 unit. Untuk lebih jelasnya dapat pula dilihat melalui gambar dibawah ini.



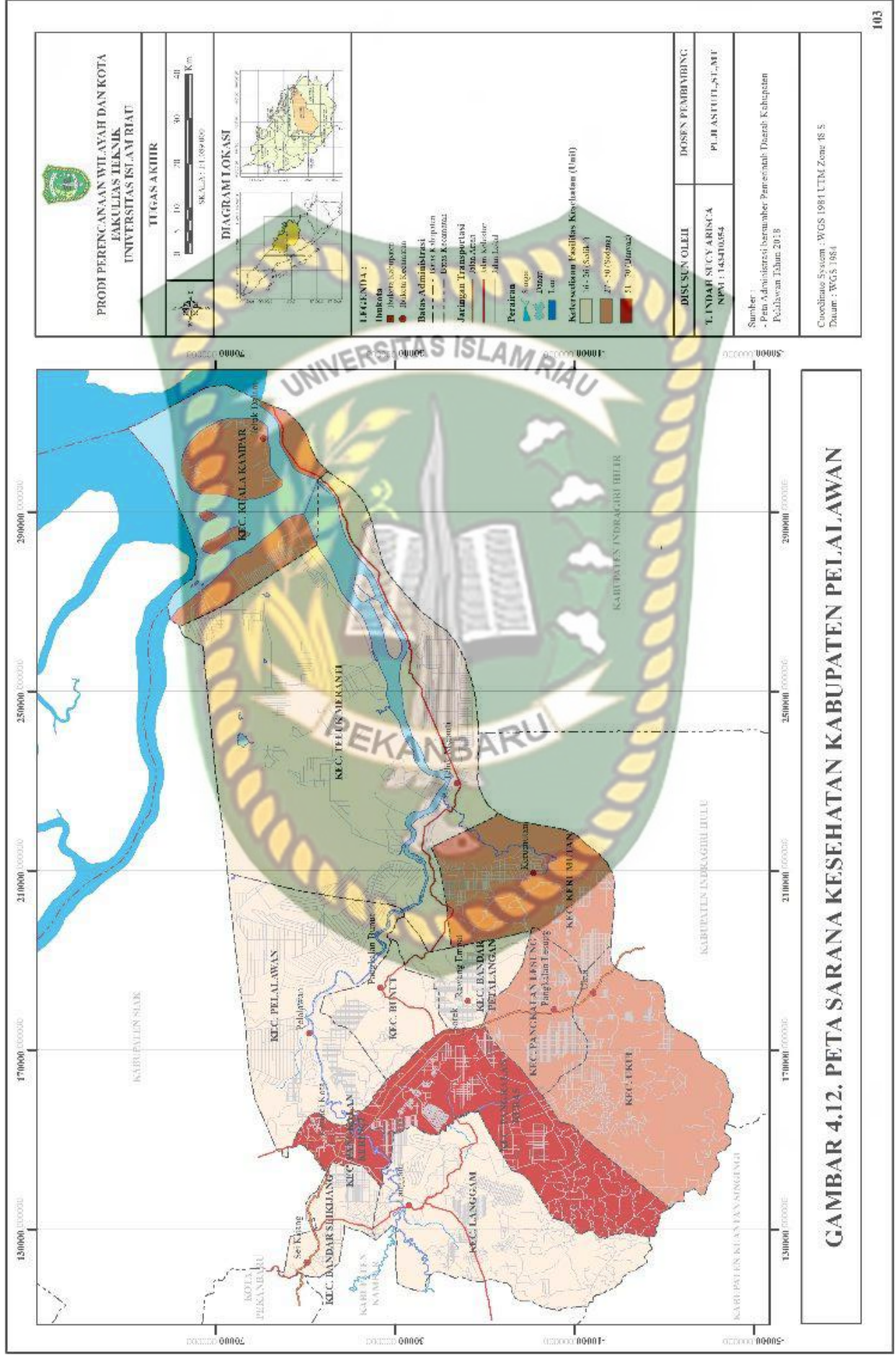
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2018

Gambar 4.10. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Kesehatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018



Sumber : Hasil Survey Primer, 2019

Gambar 4.11. Sarana Kesehatan Kabupaten Pelalawan



GAMBAR 4.12. PETA SARANA KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN

4.4.3. Sarana Peribadatan

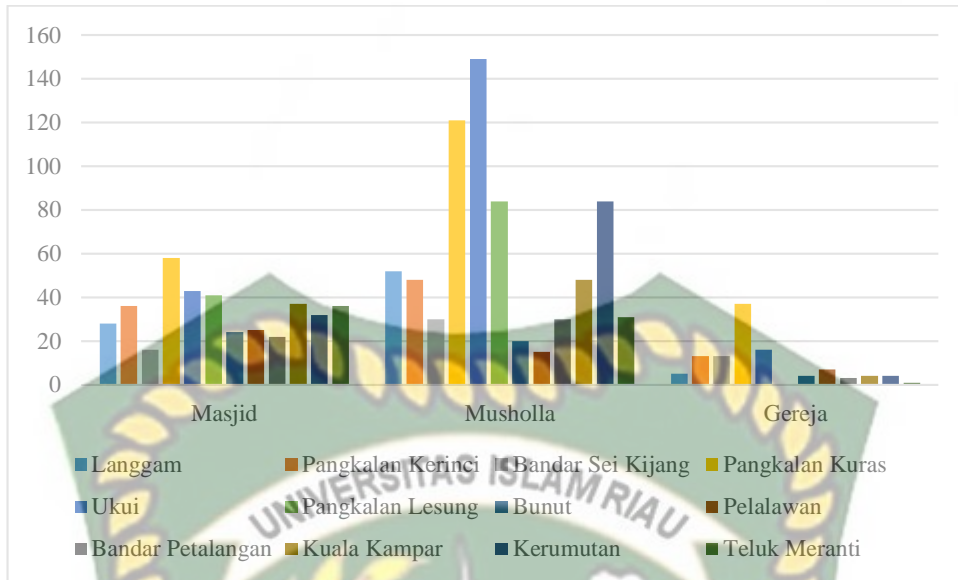
Pemenuhan kebutuhan akan sarana peribadatan dilakukan agar masyarakat di Kabupaten Pelalawan dapat beribadah sesuai dengan kepercayaan yang diyakini oleh masing-masing individu tanpa ada gangguan dan untuk masyarakat bisa beribadah lebih Khusuk. Jumlah sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Pelalawan akan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.7. Jumlah Sarana Peribadatan Menurut Jenis Peribadatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Sarana Peribadatan		
		Masjid	Musholla	Gereja
1.	Langgam	28	52	5
2.	Pangkalan Kerinci	36	48	13
3.	Bandar Sei Kijang	16	30	13
4.	Pangkalan Kuras	58	121	37
5.	Ukui	43	149	16
6.	Pangkalan Lesung	41	84	0
7.	Bunut	24	20	4
8.	Pelalawan	25	15	7
9.	Bandar Petalangan	22	30	3
10.	Kuala Kampar	37	48	4
11.	Kerumutan	32	84	4
12.	Teluk Meranti	36	31	1
Jumlah		398	712	107

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2018

Dari tabel jumlah sarana peribadatan diatas dapat diketahui jumlah sarana peribadatan di Kabupaten Pelalawan berjumlah 1.217 unit ini terbagai atas masjid, musholla dan gereja yang mana masjid terbanyak terdapat di Kecamatan Pangkalan Kuras sebanyak 58 unit. Selanjutnya sarana peribadatan musholla yang terbanyak terdapat di Kecamatan Ukui sebanyak 149 unit. Dan sarana peribadatan gereja yang terbanyak terdapat di Kecamatan Pangkalan Kuras sebanyak 37 unit. Untuk lebih jelasnya dapat pula dilihat melalui gambar dibawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2018

Gambar 4.13. Jumlah Sarana Peribadatan Menurut Jenis Peribadatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018



(a) Masjid

(b) Musholla

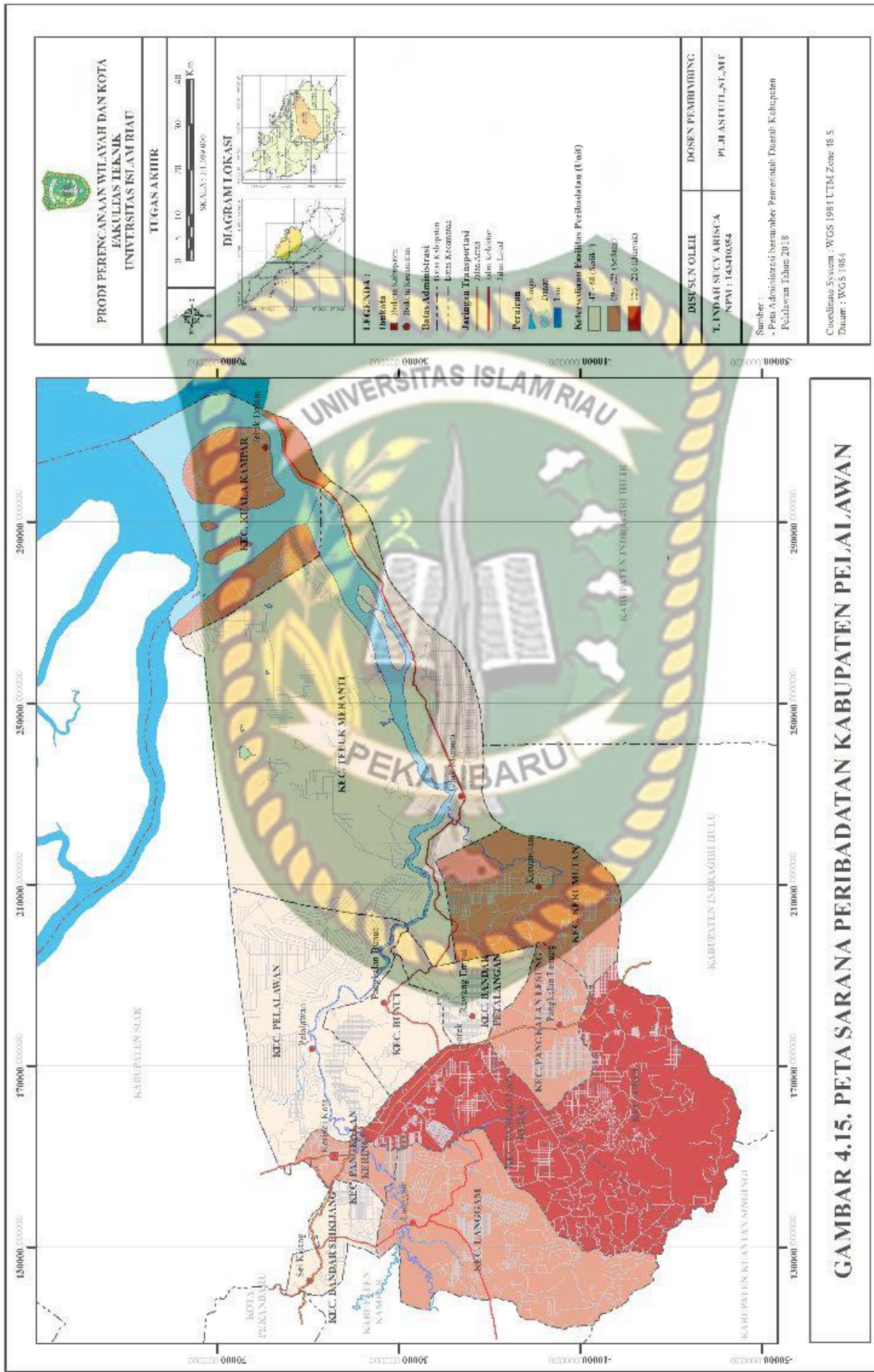


(c) Gereja

Sumber : Hasil Survey Primer, 2019

Gambar 4.14. Sarana Peribadatan Kabupaten Pelalawan

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



GAMBAR 4.15. PETA SARANA PERIBADATAN KABUPATEN PEJALAWAN

4.4.4. Sarana Perekonomian

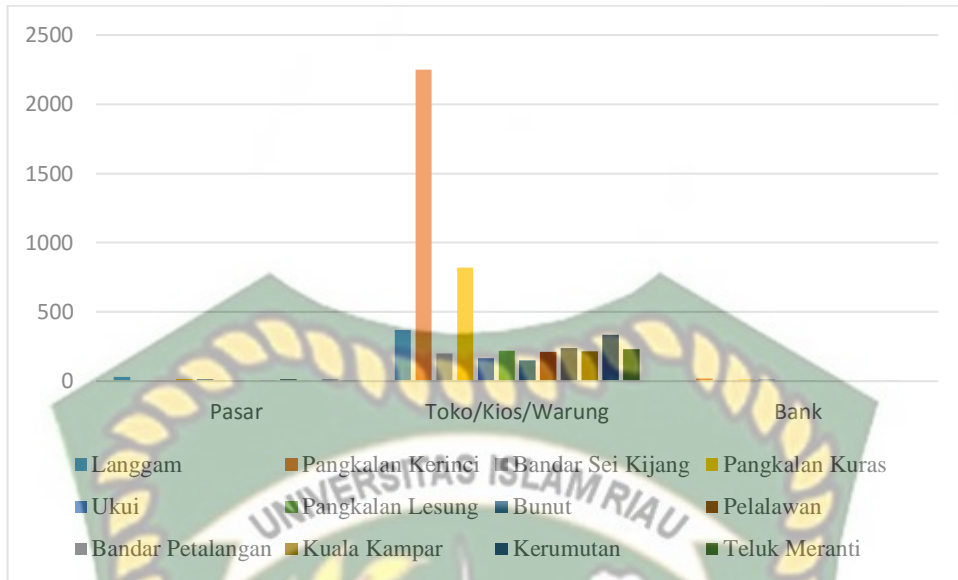
Perekonomian merupakan penggerak adanya pembangunan dan Perkembangan sebuah wilayah. Dalam pembangunan dan perkembangan Kabupaten Pelalawan ekonomi merupakan komponen utama. Dengan demikian, adanya kegiatan perekonomian yang sangat banyak di kabupaten Pelalawan maka akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan dan pembangunan yang ada di wilayah tersebut. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat banyaknya jumlah sarana perekonomian yang ada di Kabupaten Pelalawan.

Tabel 4.8. Jumlah Sarana Perekonomian Menurut Jenis Perekonomian di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Sarana Perekonomian		
		Pasar	Toko/Kios/Warung	Bank
1.	Langgam	30	371	2
2.	Pangkalan Kerinci	4	2.252	17
3.	Bandar Sei Kijang	4	199	2
4.	Pangkalan Kuras	13	819	11
5.	Ukui	13	166	11
6.	Pangkalan Lesung	8	220	1
7.	Bunut	4	151	1
8.	Pelalawan	6	210	0
9.	Bandar Petalangan	16	240	0
10.	Kuala Kampar	3	215	2
11.	Kerumutan	11	333	1
12.	Teluk Meranti	8	232	0
Jumlah		120	5.408	48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah sarana perekonomian di Kabupaten Pelalawan berjumlah 5.576 unit ini terbagai atas Pasar yang mana Pasar terbanyak terdapat di Kecamatan Langgam sebanyak 30 unit. Selanjutnya sarana perekonomian toko/kios/warung yang terbanyak terdapat di Kecamatan Pangkalan Kerinci sebanyak 2.252 unit. Dan sarana perekonomian bank yang terbanyak terdapat di Kecamatan Pangkalan Kerinci sebanyak 17 unit. Untuk lebih jelasnya dapat pula dilihat melalui gambar dibawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2018

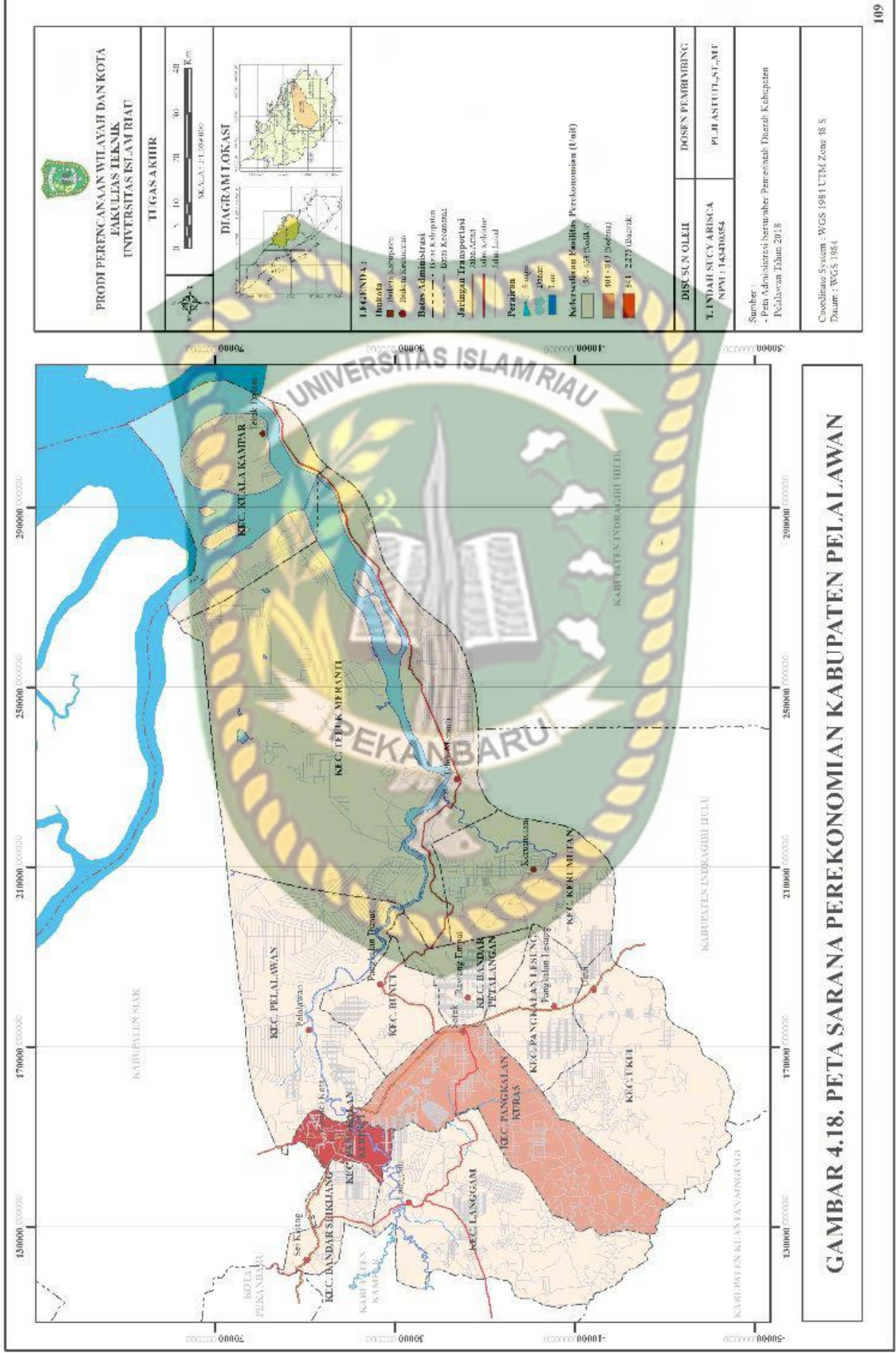
Gambar 4.16. Jumlah Sarana Perekonomian Menurut Jenis Perekonomian di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018



Sumber : Hasil Survey Primer, 2019

Gambar 4.17. Sarana Peribadatan Kabupaten Pelalawan

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



4.5. Aspek Perekonomian (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Kabupaten Pelalawan

Salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu daerah adalah perkembangan PDRB yang merupakan refleksi tingkat pertumbuhan ekonomi, disamping inflansi dan tingkat pengangguran. Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah baik secara agregat ataupun menurut lapangan usaha/sektoral dapat dihitung melalui angka PDRB atas dasar harga konstan.

Pada tahun 2014 jumlah PDRB di Kabupaten Pelalawan sebesar 31.018.734,42 dengan sektor yang mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 15.061.503,96 kemudian untuk sektor pada posisi kedua adalah sektor pertanian, perternakan, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 12.020.964,2 sedangkan untuk sektor yang mengalami pertumbuhan sedikit adalah sektor jasa perusahaan yaitu sebesar 372,40.

Pada tahun 2015 jumlah PDRB di Kabupaten Pelalawan sebesar 35.401.165,31 dengan sektor yang mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 17.228.413,07 kemudian untuk sektor pada posisi kedua adalah sektor pertanian, perternakan, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 13.626.520,83 sedangkan untuk sektor yang mengalami pertumbuhan sedikit adalah sektor jasa perusahaan yaitu sebesar 430,33.

Pada tahun 2016 jumlah PDRB di Kabupaten Pelalawan sebesar 38.176.433,57 dengan sektor yang mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 18.623.167,64 kemudian untuk sektor pada posisi kedua adalah sektor pertanian, perternakan, kehutanan dan perikanan

yaitu sebesar 14.886.970,31 sedangkan untuk sektor yang mengalami pertumbuhan sedikit adalah sektor jasa perusahaan yaitu sebesar 484,96.

Pada tahun 2017 jumlah PDRB di Kabupaten Pelalawan sebesar 41.165.592,46 dengan sektor yang mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 20.138.830,86 kemudian untuk sektor pada posisi kedua adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 16.089.030,02 sedangkan untuk sektor yang mengalami pertumbuhan sedikit adalah sektor jasa perusahaan yaitu sebesar 517,79.

Pada tahun 2018 jumlah PDRB di Kabupaten Pelalawan sebesar 43.862.109,69 dengan sektor yang mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 21.440.201,35 kemudian untuk sektor pada posisi kedua adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 17.213.570,45 sedangkan untuk sektor yang mengalami pertumbuhan sedikit adalah sektor jasa perusahaan yaitu sebesar 544,04.

Tabel 4.9. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2017

No.	Sektor	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Perternakan, Kehutanan, Perikanan	12.020.964,2	13.626.520,83	14.886.970,31	16.089.030,02	17.213.570,45
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.147.354,12	1.322.014,36	1.084.669,77	1.075.781,97	1.082.411,38
3.	Industri Pengolahan	15.061.503,96	17.228.413,07	18.623.167,64	20.138.830,86	21.440.201,35
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4.331,21	6.330,30	9.668,89	12.776,26	15.278,21
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.418,24	2.504,07	2.658,70	2.728,66	2.862,87
6.	Konstruksi	623.083,02	739.415,81	862.939,83	944.146,25	1.028.478,58
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	890.704,55	1.089.412,70	1.173.877,39	1.263.680,78	1.348.240,50
8.	Transportasi dan Pergudangan	66.891,22	77.867,57	88.830,71	95.292,61	100.903,64
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	52.624,35	66.186,04	72.596,73	79.028,54	84.207,94
10.	Informasi dan Komunikasi	144.207,84	161.116,07	184.395,3	195.801,43	210.908,66
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	229.820,20	214.785,70	206.167,62	232.117,4	244.070,26
12.	Real Estat	181.240,99	212.696,09	244.074,74	259.680,91	279.637,45
13.	Jasa Perusahaan	372,40	430,33	484,96	517,79	544,04
13.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	379.616,35	402.092,65	435.114,07	455.039,28	464.542,73
14.	Jasa Pendidikan	95.640,14	111.199,79	131.840,77	138.629,80	146.178,43
15.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39.779,97	46.513,37	57.420,18	59.966,23	64.599,91
16.	Jasa lainnya	78.181,64	93.666,57	111.555,94	122.543,68	135.473,30
Jumlah		31.018.734,42	35.401.165,31	38.176.433,57	41.165.592,46	43.862.109,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2018

4.6. Struktur Ruang Kabupaten Pelalawan

Struktur ruang umumnya terbentuk dari tiga faktor utama yaitu pusat-pusat permukiman, aksesibilitas dan orientasi pasar (pergerakan barang dan manusia). Kondisi fisik wilayah Kabupaten Pelalawan yang luas dan beragam, maka struktur pusat pembangunan wilayah yang sesuai untuk Kabupaten Pelalawan adalah pusat jamak (pusat lebih dari satu). Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan pra sarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Berdasarkan Permen No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWN, kebijakan struktur ruang nasional yang terkait dengan struktur ruang Kabupaten Pelalawan adalah Pangkalan Kerinci ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat kegiatan wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah kabupaten. Struktur ruang Kabupaten Pelalawan dapat diuraikan sebagai berikut.

4.6.1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat kegiatan wilayah dikembangkan untuk melayani kegiatan dengan skala Regiona (Kabupaten Pelalawan dengan secepatnya) dan Lokal (Kabupaten Pelalawan) serta Lingkungan (Kecamatan). Sedangkan lokasi dari Pusat Kegiatan Wilayah ini adalah Pusat Kabupaten Pelalawan yaitu Pangkalan Kerinci fungsi utama dari Pusat Pembangunan Pangkalan Kerinci ini adalah :

- a. Pusat Pemerintahan Kabupaten.
- b. Pusat Permukiman .

- c. Pusat Pendidikan Umum.
- d. Pusat perdagangan dan Jasa.

4.6.2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)

Pusat kegiatan lokal promosi memiliki kriteria adalah sebagai berikut :

- a. Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan menjadi pusat kegiatan lokal (PKL).
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupten atau beberapa kecamatan.

Pusat kegiatan lokal promosi (PKLp) di Kabupaten Pelalawan terdiri dari kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Sorek, Kecamatan Sorek di tetapkan sebagai PKLp karena mempunyai jangkauan pelayanan yang mencakupi Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Kecamatan Bunut. Klasifikasi kawasan perkotaan PKLp sorek ini dalam prediksi rencana dalah embrio kawasan perkotaan kecil.
- b. Kecamatan Ukui, Kecamatan ukui ditetapkan sebagai PKLp karena mempunyai jangkauan pelayanan yang mencakupi Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kecamatan Kerumutan. Klasifikasi kawasan perkotan PKLp ukui ini dalam prediksi rencana dalah embrio kawasan perkotaan kecil.

4.6.3. Pusat Pelayanan Kegiatan (PPK)

Pusat pelayanan kawasan (PPK) ini merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, sedangkan lokasi pusat kegiatan kawasan (PPK) ini adalah sebagai berikut :

- a. Pusat pelayanan kawasan (PPK) Sikijang. Pusat pelayanan kawasan (PPK) Sikijang ini mempunyai jangkauan pelayanan Kecamatan Bandar Sei Kijang. Klasifikasi kawasan untuk pusat pelayanan kawasan (PPK) Sikijang ini adalah embrio kawasan perkotaan kecil.
- b. Pusat pelayanan kawasan (PPK) Pelalawan. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Pelalawan mempunyai jangkauan pelayanan Kecamatan Pelalawan. Klasifikasi kawasan untuk pusat pelayanan kawasan (PPK) Pelalawan ini adalah embrio kawasan perkotaan kecil.
- c. Pusat pelayanan kawasan (PPK) Langgam. Pusat pelayanan kawasan (PPK) Langgam mempunyai jangkauan pelayanan Kecamatan Langgam. Klasifikasi kawasan untuk pusat pelayanan kawasan (PPK) Langgam ini adalah embrio kawasan perkotaan kecil.
- d. Pusat pelayanan kawasan (PPK) Pangkalan Bunut. Pusat pelayanan kegiatan (PPK) Pangkalan Bunut mempunyai jangkauan pelayanan Kecamatan Bunut. Klasifikasi kawasan untuk pusat pelayanan kawasan pusat pelayanan kawasan (PPK) Pangkalan Bunut ini adalah embrio kawasan perkotaan kecil.
- e. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Lubuk Keranji. Pusat pelayanan kawasan (PPK) Lubuk Keranji mempunyai jangkauan pelayanan Kecamatan Bandar

Petalangan. Klasifikasi kawasan untuk pusat pelayanan kawasan (PPK) Lubuk Keranji ini adalah embrio kawasan perkotaan kecil.

- f. Pusat pelayanan kawasan (PPK) Pangkalan Lesung. Pusat kegiatan kawasan (PPK) Pangkalan Lesung mempunyai jangkauan pelayanan Kecamatan Pangkalan Lesung. Klasifikasi kawasan untuk pusat kegiatan kawasan (PPK) Pangkalan Lesung ini adalah embrio kawasan perkotaan kecil.
- g. Pusat pelayanan kawasan (PPK) Kerumutan. Pusat pelayanan kawasan (PPK) Kerumutan mempunyai jangkauan pelayanan Kecamatan Kerumutan. Klasifikasi kawasan untuk PPK Kerumutan ini adalah embrio kawasan perkotaan kecil.
- h. Pusat pelayanan kegiatan (PPK) Teluk Meranti. Pusat pelayanan kegiatan (PPK) Teluk Meranti mempunyai jangkauan pelayanan Kecamatan Teluk Meranti. Klasifikasi kawasan untuk pusat pelayanan kegiatan (PPK) Teluk Meranti ini adalah embrio kawasan perkotaan kecil.
- i. Pusat pelayanan kawasan (PPK) Teluk Dalam. Pusat kegiatan kawasan (PPK) Teluk Dalam mempunyai jangkauan pelayanan Kecamatan Kuala Kampar. Klasifikasi kawasan untuk pusat pelayanan kawasan (PPK) Teluk Dalam ini adalah embrio kawasan perkotaan kecil.

4.6.4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Sebagaimana amanat yang teruntuk dalam Undang-Undang Penataan Ruang, agar terciptanya sistem perkotaan (*System of Cities*) yang serasi, selaras dan berimbang maka selain PKW, PKLp, dan PPK diatas, maka seluruh pusat kecamatan diluar itu diarahkan dan dengan sendirinya menjadi pusat pelayanan

lingkungan. Artinya peran utama yang diemban oleh PPL adalah minimal maupun melayani kecamatannya sendiri. PPL yang dimaksud adalah :

- a. Pusat pelayanan lingkungan (PPL) Pangkalan Gondai. Pusat pelayanan lingkungan (PPL) Pangkalan Gondai terletak di Kecamatan Langgam, dan mempunyai jangkauan pelayanan desa-desa yang terletak di bagian timur Kecamatan Langgam, yaitu Desa Pangkalan Gondai, Desa Padang Luas, Desa Penarikan, dan Desa Langkan. Kawasan untuk pusat pelayanan lingkungan (PPL) Pangkalan Gondai ini adalah pusat perdesaan.
- b. Pusat pelayanan lingkungan (PPL) Betung. Pusat pelayanan lingkungan (PPL) Betung terletak di bagian barat Kecamatan Pangkalan Kuras dan mempunyai jangkauan pelayanan desa-desa yang terletak di bagian barat Kecamatan Pangkalan Kuras, yaitu Desa Betung, Desa Kesuma, Desa Talau, dan Desa Tanjung Beringin. Kawasan untuk pusat pelayanan lingkungan (PPL) Betung ini adalah pusat perdesaan.
- c. Pusat pelayanan lingkungan (PPL) Pulau Muda. Pusat pelayanan lingkungan (PPL) Pulau Muda terletak di bagian timur Kecamatan Teluk Meranti dan mempunyai jangkauan pelayanan desa-desa yang terletak di bagian timur Kecamatan Teluk Meranti, yaitu Desa Pulau Muda, Desa Segamai, Desa Gambut Mutiara, dan Desa Labuhan Bilik. Kawasan untuk pusat pelayanan lingkungan (PPL) Pulau Muda ini adalah pusat perdesaan.
- d. Pusat pelayanan lingkungan (PPL) Sokoi. Pusat pelayanan lingkungan (PPL) Sokoi terletak di Kecamatan Kuala Kampar di daratan Pulau Sumatera, dan mempunyai jangkauan desa-desa dalam lingkup Kecamatan Kuala Kampar terutama yang terletak di daratan Pulau Sumatera, yaitu Desa

Sokoi dan Desa Sungai Emas. Kawasan untuk pusat pelayanan lingkungan (PPL) Sokoi ini adalah pusat perdesaan.

Untuk lebih jelasnya dapat dicermati struktur ruang Kabupaten Pelalawan pada tabel berikut.

Tabel 4.10. Struktur dan Satuan Wilayah Pembangunan di Kabupaten Pelalawan

No.	Ibukota Kecamatan/Kabupaten	Hirarki Fungsi	Fungsi Utama
1.	Pangkalan Kerinci	PKW	a. Pemerintahan Kabupaten b. Perdagangan dan Jasa c. Pendidikan d. Kesehatan e. Industri f. Sarana Bandara g. Sarana Terminal Tipe h. Sarana Pelabuhan Sungai
2.	Sorek	PKLp	a. Pememrintahan Kecamatan b. Perdagangan dan Jasa c. Pendidikan d. Kesehatan e. Wisata f. Sarana Terminal Tipe C
3.	Ukui	PKLp	a. Pemerintahan Kecamatan b. Perdagangan dan Jasa c. Pendidikan d. Kesehatan e. Sarana Terminal Tipe C
4.	Sikijang	PPK	a. Pemerintahan Kecamatan b. Perdagangan dan Jasa c. Pendidikan d. Keshatan e. Sarana Sub Terminal
5.	Pelalawan	PPK	a. Pemerintah Kecamatan b. Perdangan dan Jasa c. Pendidikan d. Kesehatan e. Wisata f. Kebudayaan g. Sarana Sub Terminal h. Sarana Pelabuhan Sungai
6.	Langgam	PPK	a. Pemerintahan Kecamatan b. Perdagangan dan Jasa

No.	Ibukota Kecamatan/Kabupaten	Hirarki Fungsi	Fungsi Utama
			c. Pendidikan d. Kesehatan e. Wisata f. Sarana Sub Terminal g. Sarana Pelabuhan Sungai
7.	Pangkalan Lesung	PPK	a. Pemerintahan Kecamatan b. Perdagangan dan Jasa c. Pendidikan d. Kesehatan e. Sarana Sub Terminal
8.	Pangkalan Bunut	PPK	a. Pemerintahan Kecamatan b. Perdagangan dan Jasa c. Pendidikan d. Kesehatan e. Sarana Sub Terminal
9.	Lubuk keranji	PPK	a. Pemerintahan Kecamatan b. Perdagangan dan Jasa c. Pendidikan d. Kesehatan e. Sarana Sub Terminal
10.	Kerumutan	PPK	a. Pemerintahan Kecamatan b. Perdagangan dan Jasa c. Pendidikan d. Kesehatan e. Sarana Sub Terminal
11.	Teluk Meranti	PPK	a. Pemerintah kecamatan b. Perdagangan dan Jasa c. Pendidikan d. Kesehatan e. Wisata f. Sarana Sub Terminal g. Sarana Pelabuhan Sungai
12.	Teluk Dalam	PPK	a. Pemerintahan Kecamatan b. Perdagangan dan Jasa c. Pendidikan d. Kesehatan e. Sarana Sub Terminal f. Sarana Pelabuhan
13.	Pangkalan Gondai	PPL	a. Pemerintahan Desa b. Perdagangan dan Jasa c. Pendidikan d. Kesehatan e. Sarana pemberhentian

No.	Ibukota Kecamatan/Kabupaten	Hirarki Fungsi	Fungsi Utama
14.	Betung	PPL	a. Pemerintahan Desa b. Perdagangan dan Jasa c. Pendidikan d. Kesehatan e. Sarana Pemberhentian
15.	Pulau Muda	PPL	a. Pemerintahan Desa b. Perdagangan dan Jasa c. Pendidikan d. Kesehatan e. Sarana Pemberhentian f. Sarana Pelabuhan Sungai
16.	Sokoi	PPL	a. Pemerintahan Desa b. Perdagangan dan Jasa c. Pendidikan d. Kesehatan e. Sarana Pemberhentian f. Pelabuhan

Sumber: *Draf RTRW Kabupaten Pelalawan, 2012-2032*





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Berdasarkan Ketersediaan Sarana Sosial Ekonomi

Kemampuan suatu kecamatan dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan didasari atas ketersediaan sarana sosial ekonomi yang dimiliki. Dalam menentukan hirarki pusat pertumbuhan di Kabupaten Pelalawan menggunakan jenis dan kelengkapan sarana sebagai parameternya, kemudian dipertimbangkan menggunakan analisis skalogram dan indeks sentralitas yang mencerminkan kemampuan suatu pusat pertumbuhan dalam memberikan pelayanan kepada penduduknya.

Analisis skalogram digunakan untuk mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang dapat dikelompokkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi dengan metode menuliskan ada atau tidaknya (sarana sosial ekonomi), yaitu dengan mengisikan angka 1 bila sarana tersebut terdapat pada suatu wilayah dan mengisikan angka 0 bila sarana tersebut tidak terdapat di suatu wilayah. Selanjutnya analisis skalogram dapat dikembangkan untuk menentukan indeks sentralitas terbobot (Lampiran 1).

Analisis indeks sentralitas digunakan untuk melihat tingkat keterpusatan sarana pada suatu wilayah. Analisis ini tidak hanya berdasarkan jumlah fungsi sarana tetapi juga berdasarkan frekuensi keberadaan fungsi atau sarana. Semakin tinggi nilai sentralitasnya maka semakin tinggi pula hirarki wilayah tersebut.

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam analisis skalogram dan indeks sentralitas sebagai berikut :

5.1.1. Identikasi Kecamatan-Kecamatan Yang Menjadi Pusat Pertumbuhan Berdasarkan Ketersediaan Sarana Sosial Ekonomi

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia Indonesia (SNI) tentang kriteria pengelompokkan sarana maka dapat diidentifikasi kecamatan kecamatan yang ada Kabupaten Pelalawan yang layak menjadi pusat pertumbuhan. Berdasarkan sarana sosial ekonomi sebagai berikut :

a. Ketersedian Sarana Pendidikan

Untuk mengidentifikasi kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan di kabupaten Pelalawan maka digunakan kondisi ekstisting dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan identifikasi ketersediaan sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Pelalawan maka kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan adalah kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Ukui, Kecamatan Langgam, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bandar Petalanga, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Kuala Kampar, dan Kecamatan Bunut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5.1 tentang indetifikasi ketersediaan sarana pendidikan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Tabel 5.1. Hasil Identifikasi Sarana Pendidikan Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)

No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
1.	Pangkalan Kerinci	TK	1.250	√	Berada di lingkungan permukiman	√	500 m ²	√	Tercukupi
		SD	1.600	√	Lokasi tidak menyebarang jalan dan berada di lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMP	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMA	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
2.	Pangkalan Kuras	TK	1.250	√	Berada di lingkungan permukiman	√	500 m ²	√	Tercukupi
		SD	1.600	√	Lokasi tidak menyebarang jalan dan berada di lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMP	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMA	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
3.	Ukui	TK	1.250	√	Berada di lingkungan permukiman	√	500 m ²	√	Tercukupi
		SD	1.600	√	Lokasi tidak menyebarang jalan dan berada di lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMP	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMA	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	3.000 m ²	√	Tercukupi

No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
4.	Langgam	TK	1.250	√	Berada di lingkungan permukiman	√	500 m ²	√	Tercukupi
		SD	1.600	√	Lokasi tidak menyebarang jalan dan berada di lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMP	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMA	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
5.	Kerumutan	TK	1.250	√	Berada di lingkungan permukiman	√	500 m ²	√	Tercukupi
		SD	1.600	√	Lokasi tidak menyebarang jalan dan berada di lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMP	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMA	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
6.	Pangkalan Lesung	TK	1.250	√	Berada di lingkungan permukiman	√	500 m ²	√	Tercukupi
		SD	1.600	√	Lokasi tidak menyebarang jalan dan berada di lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMP	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMA	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
7.	Bandar Petalangan	TK	1.250	√	Berada di lingkungan permukiman	√	500 m ²	√	Tercukupi

No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
		SD	1.600	√	Lokasi tidak menyebarang jalan dan berada di lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMP	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMA	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		TK	1.250	√	Berada di lingkungan permukiman	√	500 m ²	√	Tercukupi
8.	Pelalawan	SD	1.600	√	Lokasi tidak menyebarang jalan dan berada di lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMP	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMA	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		TK	1.250	√	Berada di lingkungan permukiman	√	500 m ²	√	Tercukupi
9.	Bandar Sei Kijang	SD	1.600	√	Lokasi tidak menyebarang jalan dan berada di lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMP	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMA	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		TK	1.250	√	Berada di lingkungan permukiman	√	500 m ²	√	Tercukupi
10.	Teluk Meranti	TK	1.250	√	Berada di lingkungan permukiman	√	500 m ²	√	Tercukupi

No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
		SD	1.600	√	Lokasi tidak menyebarang jalan dan berada di lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMP	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMA	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		TK	1.250	√	Berada di lingkungan permukiman	√	500 m ²	√	Tercukupi
11.	Kuala Kampar	SD	1.600	√	Lokasi tidak menyebarang jalan dan berada di lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMP	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMA	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		TK	1.250	√	Berada di lingkungan permukiman	√	500 m ²	√	Tercukupi
12.	Bunut	SD	1.600	√	Lokasi tidak menyebarang jalan dan berada di lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMP	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		SMA	4.800	√	Lokasi tidak harus didalam lingkungan permukiman	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		TK	1.250	√	Berada di lingkungan permukiman	√	500 m ²	√	Tercukupi

Sumber: Hasil Analisis, 2019

b. Ketersediaan Sarana Kesehatan

Untuk mengidentifikasi kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan di kabupaten Pelalawan maka digunakan kondisi ekisting dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dapat dilihat dari tabel dibawah diketahui bahwa kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Pelalawan berdasarkan kriteria standar nasional indonesia (SNI) tentang ketersediaan sarana kesehatan adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci. Serta Kecamatan yang tidak layak menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan sarana kesehatan terdapat di Kecamatan Langgam, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Kerumutan dan Kecamatan Teluk Meranti. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5.2 tentang indetifikasi ketersediaan sarana kesehatan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Tabel 5.2. Hasil Identifikasi Sarana Kesehatan Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)

No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
1.	Pangkalan Kerinci	Posyandu	1.250	√	Berada ditengah kelompok tetangga dan tidak menyebrang jalan	√	500 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas Pembantu	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Praktek Dokter	5.000	√	Lokasi dapat bersatu dengan rumah tinggal	√	1.500 m ²	√	Tercukupi
		Rumah Sakit	240.000	√	Lokasi cukup tenang dan mempunyai radius yang merata	√	30.000 m ²	√	Tercukupi
2.	Pangkalan Kuras	Posyandu	1.250	√	Berada ditengah kelompok tetangga dan tidak menyebrang jalan	√	500 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas Pembantu	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Praktek Dokter	5.000	-	Lokasi dapat bersatu dengan rumah tinggal	-	1.500 m ²	-	Belum Tercukupi
		Rumah Sakit	240.000	-	Lokasi cukup tenang dan mempunyai radius yang merata	-	30.000 m ²	-	Belum Tercukupi
3.	Ukui	Posyandu	1.250	√	Berada ditengah kelompok tetangga dan tidak menyebrang jalan	√	500 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas Pembantu	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi

No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
		Praktek Dokter	5.000	√	Lokasi dapat bersatu dengan rumah tinggal	√	1.500 m ²	√	Tercukupi
		Rumah Sakit	240.000	-	Lokasi cukup tenang dan mempunyai radius yang merata	-	30.000 m ²	-	Belum Tercukupi
4.	Langgam	Posyandu	1.250	√	Berada ditengah kelompok tetangga dan tidak menyebrang jalan	√	500 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas Pembantu	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Praktek Dokter	5.000	√	Lokasi dapat bersatu dengan rumah tinggal	√	1.500 m ²	√	Tercukupi
		Rumah Sakit	240.000	-	Lokasi cukup tenang dan mempunyai radius yang merata	-	30.000 m ²	-	Belum Tercukupi
5.	Kerumutan	Posyandu	1.250	√	Berada ditengah kelompok tetangga dan tidak menyebrang jalan	√	500 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas Pembantu	120.000	-	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	-	3.000 m ²	-	Belum Tercukupi
		Praktek Dokter	5.000	√	Lokasi dapat bersatu dengan rumah tinggal	√	1.500 m ²	√	Tercukupi
		Rumah Sakit	240.000	-	Lokasi cukup tenang dan mempunyai radius yang merata	-	30.000 m ²	-	Belum Tercukupi
6.	Pangkalan Lesung	Posyandu	1.250	√	Berada ditengah kelompok tetangga dan tidak menyebrang jalan	√	500 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi

No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
		Puskesmas Pembantu	120.000	-	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	-	3.000 m ²	-	Belum Tercukupi
		Praktek Dokter	5.000	√	Lokasi dapat bersatu dengan rumah tinggal	√	1.500 m ²	√	Tercukupi
		Rumah Sakit	240.000	-	Lokasi cukup tenang dan mempunyai radius yang merata	-	30.000 m ²	-	Belum Tercukupi
7.	Bandar Petalangan	Posyandu	1.250	√	Berada ditengah kelompok tetangga dan tidak menyebrang jalan	√	500 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas Pembantu	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Praktek Dokter	5.000	√	Lokasi dapat bersatu dengan rumah tinggal	√	1.500 m ²	√	Tercukupi
		Rumah Sakit	240.000	-	Lokasi cukup tenang dan mempunyai radius yang merata	-	30.000 m ²	-	Belum Tercukupi
8.	Pelalawan	Posyandu	1.250	√	Berada ditengah kelompok tetangga dan tidak menyebrang jalan	√	500 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas Pembantu	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Praktek Dokter	5.000	-	Lokasi dapat bersatu dengan rumah tinggal	-	1.500 m ²	-	Belum Tercukupi
		Rumah Sakit	240.000	-	Lokasi cukup tenang dan mempunyai radius yang merata	-	30.000 m ²	-	Belum Tercukupi
9.	Bandar Sei Kijang	Posyandu	1.250	√	Berada ditengah kelompok tetangga dan tidak menyebrang jalan	√	500 m ²	√	Tercukupi

No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
		Puskesmas	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas Pembantu	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Praktek Dokter	5.000	-	Lokasi dapat bersatu dengan rumah tinggal	-	1.500 m ²	-	Belum Tercukupi
		Rumah Sakit	240.000	-	Lokasi cukup tenang dan mempunyai radius yang merata	-	30.000 m ²	-	Belum Tercukupi
10.	Teluk Meranti	Posyandu	1.250	√	Berada ditengah kelompok tetangga dan tidak menyebrang jalan	√	500 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas Pembantu	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Praktek Dokter	5.000	-	Lokasi dapat bersatu dengan rumah tinggal	-	1.500 m ²	-	Belum Tercukupi
		Rumah Sakit	240.000	-	Lokasi cukup tenang dan mempunyai radius yang merata	-	30.000 m ²	-	Belum Tercukupi
11.	Kuala Kampar	Posyandu	1.250	√	Berada ditengah kelompok tetangga dan tidak menyebrang jalan	√	500 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas Pembantu	120.000	-	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	-	3.000 m ²	-	Belum Tercukupi
		Praktek Dokter	5.000	-	Lokasi dapat bersatu dengan rumah tinggal	-	1.500 m ²	-	Belum Tercukupi
		Rumah Sakit	240.000	-	Lokasi cukup tenang dan mempunyai radius yang merata	-	30.000 m ²	-	Belum Tercukupi

No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
12.	Bunut	Posyandu	1.250	√	Berada ditengah kelompok tetangga dan tidak menyebrang jalan	√	500 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas	120.000	√	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	√	3.000 m ²	√	Tercukupi
		Puskesmas Pembantu	120.000	-	Lokasi berada dilingkungan pusat-pusat kecamatan	-	3.000 m ²	-	Belum Tercukupi
		Praktek Dokter	5.000	-	Lokasi dapat bersatu dengan rumah tinggal	-	1.500 m ²	-	Belum Tercukupi
		Rumah Sakit	240.000	-	Lokasi cukup tenang dan mempunyai radius yang merata	-	30.000 m ²	-	Belum Tercukupi

Sumber: Hasil Analisis, 2019



c. Ketersediaan Sarana Peribadatan

Untuk mengidentifikasi kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan di kabupaten Pelalawan maka digunakan kondisi ekisting dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan identifikasi ketersediaan sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Pelalawan maka kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan adalah kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Ukui, Kecamatan Langgam, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bandar Petalanga, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Kuala Kampar, dan Kecamatan Bunut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5.3 tentang indetifikasi ketersediaan sarana peribadatan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).



Tabel 5.3. Hasil Identifikasi Sarana Peribadatan Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)

No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
1.	Pangkalan Kerinci	Mesjid	2.500	√	Ditengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		Musholla	250	√	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain.	√	100 m ²	√	Tercukupi
		Gereja	Tergantung sistem kekerabatan	√	-	√	-	√	Tercukupi
2.	Pangkalan Kuras	Mesjid	2.500	√	Ditengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		Musholla	250	√	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain.	√	100 m ²	√	Tercukupi
		Gereja	Tergantung sistem kekerabatan	√	-	√	-	√	Tercukupi
3.	Ukui	Mesjid	2.500	√	Ditengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		Musholla	250	√	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain.	√	100 m ²	√	Tercukupi
		Gereja	Tergantung sistem kekerabatan	√	-	√	-	√	Tercukupi
4.	Langgam	Mesjid	2.500	√	Ditengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga	√	1.000 m ²	√	Tercukupi

No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
		Musholla	250	√	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain.	√	100 m ²	√	Tercukupi
		Gereja	Tergantung sistem kekerabatan	√	-	√	-	√	Tercukupi
5.	Kerumutan	Mesjid	2.500	√	Ditengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		Musholla	250	√	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain.	√	100 m ²	√	Tercukupi
		Gereja	Tergantung sistem kekerabatan	√	-	√	-	√	Tercukupi
6.	Pangkalan Lesung	Mesjid	2.500	√	Ditengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		Musholla	250	√	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain.	√	100 m ²	√	Tercukupi
		Gereja	Tergantung sistem kekerabatan	√	-	√	-	√	Tercukupi
7.	Bandar Petalangan	Mesjid	2.500	√	Ditengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		Musholla	250	√	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain.	√	100 m ²	√	Tercukupi
		Gereja	Tergantung sistem kekerabatan	√	-	√	-	√	Tercukupi

No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
8.	Pelalawan	Mesjid	2.500	√	Ditengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		Musholla	250	√	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain.	√	100 m ²	√	Tercukupi
		Gereja	Tergantung sistem kekerabatan	√	-	√	-	√	Tercukupi
9.	Bandar Sei Kijang	Mesjid	2.500	√	Ditengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		Musholla	250	√	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain.	√	100 m ²	√	Tercukupi
		Gereja	Tergantung sistem kekerabatan	√	-	√	-	√	Tercukupi
10.	Teluk Meranti	Mesjid	2.500	√	Ditengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		Musholla	250	√	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain.	√	100 m ²	√	Tercukupi
		Gereja	Tergantung sistem kekerabatan	√	-	√	-	√	Tercukupi
11.	Kuala Kampar	Mesjid	2.500	√	Ditengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		Musholla	250	√	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain.	√	100 m ²	√	Tercukupi

No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
		Gereja	Tergantung sistem kekerabatan	√	-	√	-	√	Tercukupi
12.	Bunut	Mesjid	2.500	√	Ditengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya. Dapat bergabung dalam lokasi balai warga	√	1.000 m ²	√	Tercukupi
		Musholla	250	√	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain.	√	100 m ²	√	Tercukupi
		Gereja	Tergantung sistem kekerabatan	√	-	√	-	√	Tercukupi

Sumber: Hasil Analisis, 2019

d. Ketersediaan Sarana Perekonomian

Untuk mengidentifikasi kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan di kabupaten Pelalawan maka digunakan kondisi ekisting dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan identifikasi ketersediaan sarana perekonomian yang ada di Kabupaten Pelalawan maka kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Ukui, Kecamatan langgam, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bandar Sekijang, Kecamatan Kuala kampar, Kecamatan Bunut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5.4 tentang indetifikasi ketersediaan sarana perekonomian berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).



Tabel 5.4. Hasil Identifikasi Sarana Perekonomian Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)

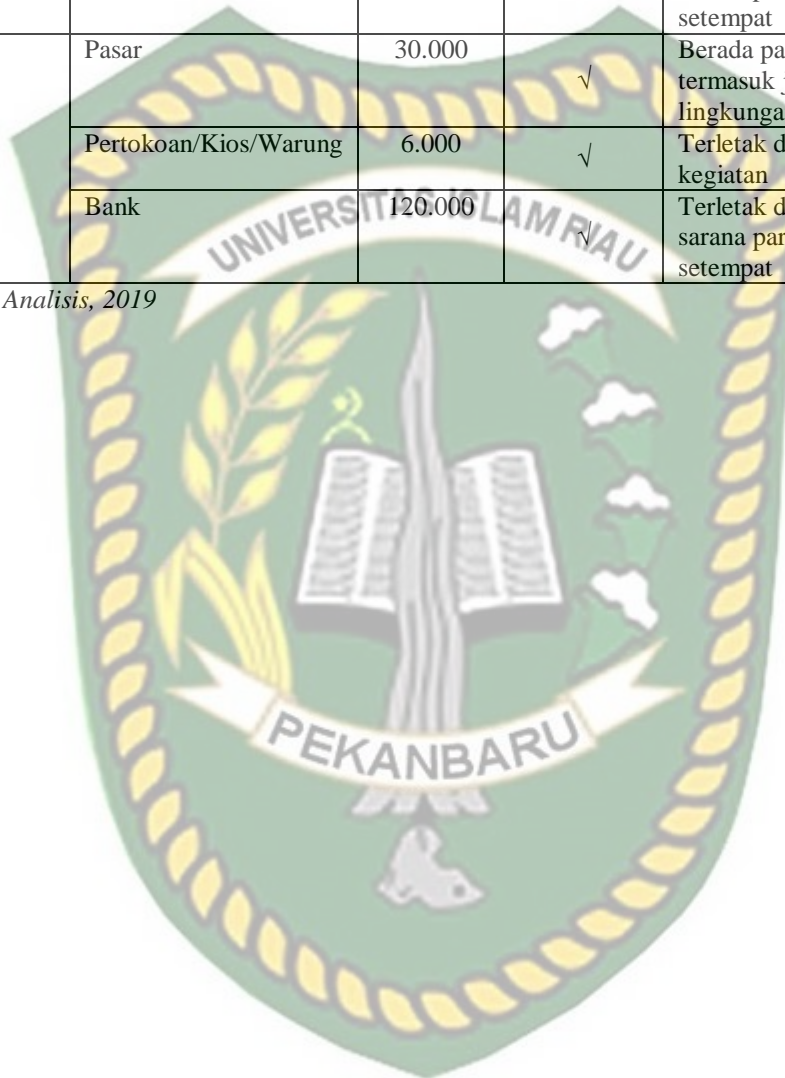
No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
1.	Pangkalan Kerinci	Pasar	30.000	√	Berada pada setiap jaringan jalan termasuk jalan lokal maupun lingkungan	√	2.000 m ²	√	Tercukupi
		Pertokoan/Kios/Warung	6.000	√	Terletak di pusat lingkungan atau kegiatan	√	-	√	Tercukupi
		Bank	120.000	√	Terletak di jalan utama termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat	√	-	√	Tercukupi
2.	Pangkalan Kuras	Pasar	30.000	√	Berada pada setiap jaringan jalan termasuk jalan lokal maupun lingkungan	√	2.000 m ²	√	Tercukupi
		Pertokoan/Kios/Warung	6.000	√	Terletak di pusat lingkungan atau kegiatan	√	-	√	Tercukupi
		Bank	120.000	√	Terletak di jalan utama termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat	√	-	√	Tercukupi
3.	Ukui	Pasar	30.000	√	Berada pada setiap jaringan jalan termasuk jalan lokal maupun lingkungan	√	2.000 m ²	√	Tercukupi
		Pertokoan/Kios/Warung	6.000	√	Terletak di pusat lingkungan atau kegiatan	√	-	√	Tercukupi
		Bank	120.000	√	Terletak di jalan utama termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat	√	-	√	Tercukupi
4.	Langgam	Pasar	30.000	√	Berada pada setiap jaringan jalan termasuk jalan lokal maupun lingkungan	√	2.000 m ²	√	Tercukupi

No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
		Pertokoan/Kios/Warung	6.000	√	Terletak di pusat lingkungan atau kegiatan	√	-	√	Tercukupi
		Bank	120.000	√	Terletak di jalan utama termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat	√	-	√	Tercukupi
		Pasar	30.000	√	Berada pada setiap jaringan jalan termasuk jalan lokal maupun lingkungan	√	2.000 m ²	√	Tercukupi
5.	Kerumutan	Pertokoan/Kios/Warung	6.000	√	Terletak di pusat lingkungan atau kegiatan	√	-	√	Tercukupi
		Bank	120.000	√	Terletak di jalan utama termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat	√	-	√	Tercukupi
		Pasar	30.000	√	Berada pada setiap jaringan jalan termasuk jalan lokal maupun lingkungan	√	2.000 m ²	√	Tercukupi
6.	Pangkalan Lesung	Pertokoan/Kios/Warung	6.000	√	Terletak di pusat lingkungan atau kegiatan	√	-	√	Tercukupi
		Bank	120.000	√	Terletak di jalan utama termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat	√	-	√	Tercukupi
		Pasar	30.000	√	Berada pada setiap jaringan jalan termasuk jalan lokal maupun lingkungan	√	2.000 m ²	√	Tercukupi
7.	Bandar Petalangan	Pertokoan/Kios/Warung	6.000	√	Terletak di pusat lingkungan atau kegiatan	√	-	√	Tercukupi
		Bank	120.000	-	Terletak di jalan utama termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat	-	-	-	Belum Tercukupi
		Pasar	30.000	√	Berada pada setiap jaringan jalan termasuk jalan lokal maupun lingkungan	√	2.000 m ²	√	Tercukupi

No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
8.	Pelalawan	Pasar	30.000	√	Berada pada setiap jaringan jalan termasuk jalan lokal maupun lingkungan	√	2.000 m ²	√	Tercukupi
		Pertokoan/Kios/Warung	6.000	√	Terletak di pusat lingkungan atau kegiatan	√	-	√	Tercukupi
		Bank	120.000	-	Terletak di jalan utama termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat	-	-	-	Belum Tercukupi
9.	Bandar Sei Kijang	Pasar	30.000	√	Berada pada setiap jaringan jalan termasuk jalan lokal maupun lingkungan	√	2.000 m ²	√	Tercukupi
		Pertokoan/Kios/Warung	6.000	√	Terletak di pusat lingkungan atau kegiatan	√	-	√	Tercukupi
		Bank	120.000	√	Terletak di jalan utama termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat	√	-	√	Tercukupi
10.	Teluk Meranti	Pasar	30.000	√	Berada pada setiap jaringan jalan termasuk jalan lokal maupun lingkungan	√	2.000 m ²	√	Tercukupi
		Pertokoan/Kios/Warung	6.000	√	Terletak di pusat lingkungan atau kegiatan	√	-	√	Tercukupi
		Bank	120.000	-	Terletak di jalan utama termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat	-	-	-	Belum Tercukupi
11.	Kuala Kampar	Pasar	30.000	√	Berada pada setiap jaringan jalan termasuk jalan lokal maupun lingkungan	√	2.000 m ²	√	Tercukupi
		Pertokoan/Kios/Warung	6.000	√	Terletak di pusat lingkungan atau kegiatan	√	-	√	Tercukupi

No.	Kecamatan	Jenis Sarana	Standar Kriteria Sarana (SNI)						Hasil Identifikasi
			Penduduk Minimum	Penduduk Pendukung	Kriteria Lokasi	Lokasi	Radius Pencapaian Maksimum	Radius	
		Bank	120.000	√	Terletak di jalan utama termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat	√	-	√	Tercukupi
12.	Bunut	Pasar	30.000	√	Berada pada setiap jaringan jalan termasuk jalan lokal maupun lingkungan	√	2.000 m ²	√	Tercukupi
		Pertokoan/Kios/Warung	6.000	√	Terletak di pusat lingkungan atau kegiatan	√	-	√	Tercukupi
		Bank	120.000	√	Terletak di jalan utama termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat	√	-	√	Tercukupi

Sumber: Hasil Analisis, 2019



5.1.2. Analisis Hirarki Pusat Pertumbuhan

Dalam penelitian ini dibagi menjadi empat kelas/kategori dengan pembagian sebagai berikut :

a. Kecamatan Hirarki I

Merupakan kecamatan-kecamatan dengan nilai indeks sentralitas sangat tinggi.

b. Kecamatan Hirarki II

Merupakan kecamatan-kecamatan dengan nilai indeks sentralitas tinggi.

c. Kecamatan Hirarki III

Merupakan kecamatan-kecamatan dengan nilai indeks sentralitas sedang.

d. Kecamatan Hirarki IV

Merupakan kecamatan-kecamatan dengan nilai indeks sentralitas rendah.

Berdasarkan analisis sklogram dan indek sentralitas sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan ekonomi diatas menunjukkan kecamatan yang Hirarki I adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci. Hirarki II adalah Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Ukui, Kecamatan Hirarki III adalah Kecamatan Langgam, Kecamatan Kerumutan dan Kecamatan Kerumutan. Hirarki IV terdiri dari Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Kuala Kampar dan Kecamatan Kerumutan. Untuk lebih jelas dapat pada Tabel 5.5 berikut ini :

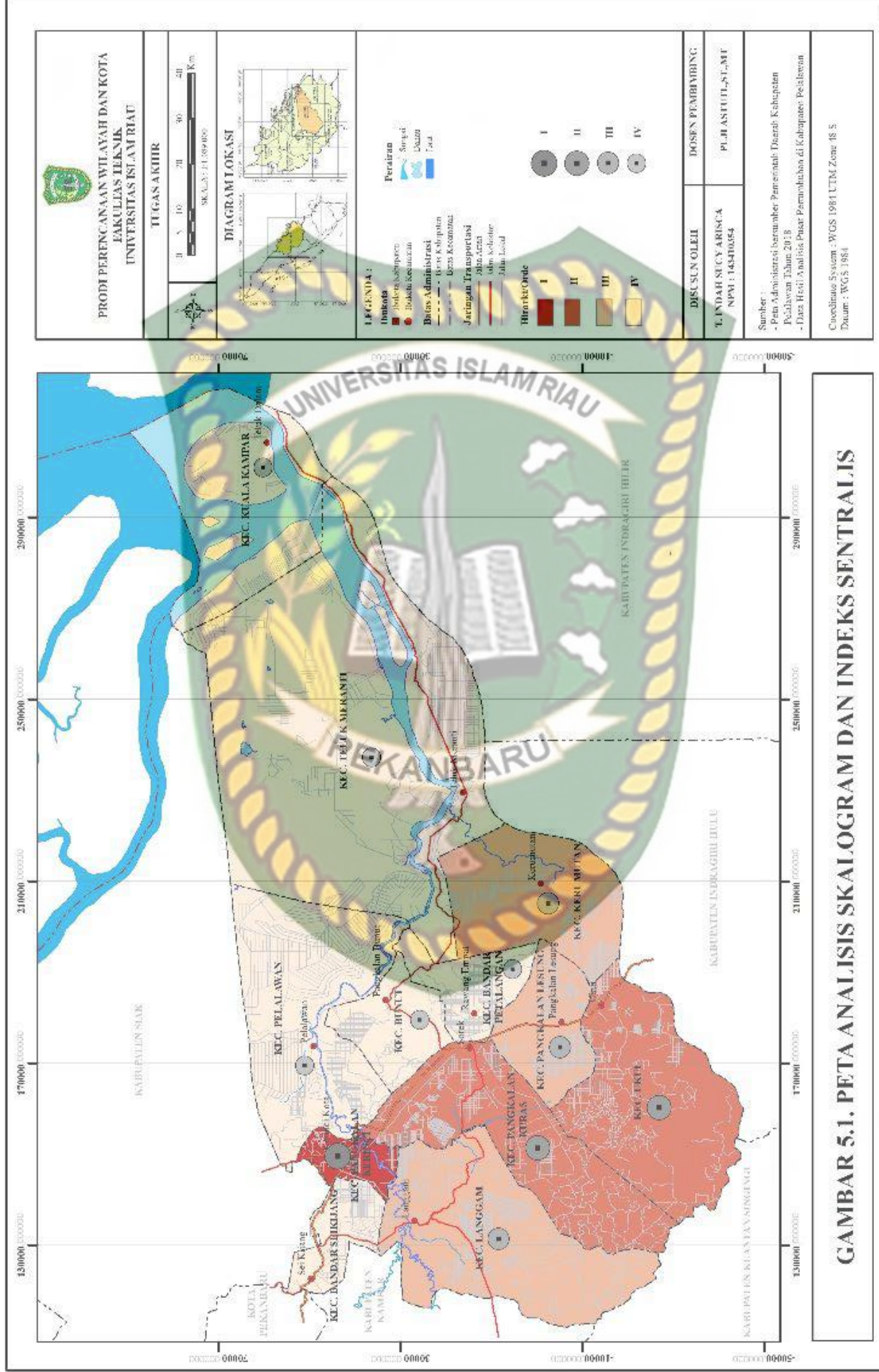
Tabel 5.5. Hasil Hirarki Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Pelalawan Menggunakan Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas

No.	Kecamatan	Jumlah Jenis/ Fungsi Sarana	Indeks Sentralitas	Hirarki
1.	Pangkalan Kerinci	15	435,17	I
2.	Pangkalan Kuras	13	204,03	II
3.	Ukui	14	160,60	II
4.	Langgam	14	121,35	III
5.	Kerumutan	13	101,25	III
6.	Pangkalan Lesung	12	84,65	III
7.	Bandar Petalangan	13	74,67	IV
8.	Bandar Sei Kijang	13	70,55	IV
9.	Pelalawan	12	70,79	IV
10.	Teluk Meranti	12	63,22	IV
11.	Kuala Kampar	12	62,88	IV
12.	Bunut	12	51,02	IV

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tabel diatas teridentifikasi bahwa terdapat 4 hirarki dari 4 hirarki yakni Hirarki I, II, III, dan IV. Nilai indeks sentralitas tertinggi sebesar 435,17 dengan jumlah sarana sosial ekonomi 15 unit yakni pada Kecamatan Pangkalan Kerinci. Dan nilai indeks sentralitas terendah sebesar 51,02 dengan jumlah sarana sosial ekonomi 12 unit yakni pada Kecamatan Bunut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta analisis skalogram dan indeks sentralitas dibawah ini.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



5.1.3. Perbandingan Hirarki Struktur Ruang RTRW Dengan Hasil Analisis Skalogram Dan Nilai Indeks Sentralis

Berdasarkan struktur ruang Kabupaten Pelalawan yang tertuang dalam draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2031 terdapat perbedaan dengan hasil analisis menggunakan skalogram dan indeks sentralitas. Pada draft RTRW Kabupaten Pelalawan yang menjadi pusat pertumbuhan adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras, dan Kecamatan Ukui.

Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dikembangkan untuk melayani skala regional (Kabupaten Pelalawan dan Sekitarnya), lokal (Kabupaten Pelalawan), dan lingkungan (Kecamatan). Sedangkan Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Ukui sebagai PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) yang merupakan pusat pertumbuhan bagi beberapa kecamatan terutama kecamatan yang berada disekitarnya. Selain dari kedua fungsi tersebut Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Teluk Meranti PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) juga diharapkan mampu mengambil peran dalam konstelasi yang lebih luas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5.6 perbandingan hirarki struktur ruang RTRW dan hasil analisis hirarki pusat pertumbuhan peneliti berikut.

Tabel 5.6. Perbandingan Hirarki Struktur Ruang RTRW Dengan Hasil Analisis Hirarki Pusat Pertumbuhan Peneliti

No.	RTRW Kabupaten Pelalawan 2011-2031		No.	Hasil Analisis		Hirarki
	Hirarki Fungsi	Kecamatan		Nilai Indeks Sentralitas	Kecamatan	
1.	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	a. Kecamatan Pangkalan Kerinci	1.	Nilai Indeks Sentralitas Sangat Tinggi	a. Pangkalan Kerinci	I
2.	PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi)	a. Kecamatan Ukui b. Kecamatan Pangkalan Kuras	2.	Nilai Indeks Sentralitas Tinggi	a. Kecamatan Ukui b. Kecamatan Pangkalan Kuras	II
3.	PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)	a. Kecamatan Bandar Sei Kijang b. Kecamatan Pelalawan c. Kecamatan Langgam d. Kecamatan Pangkalan Lesung e. Kecamatan Bunut f. Kecamatan Bandar Petalangan g. Kecamatan Kerumutan h. Kecamatan Kuala Kampar i. Kecamatan Teluk Meranti	3.	Nilai Indeks Sentralitas Sedang	a. Kecamatan Langgam b. Kecamatan Kerumutan c. Kecamatan Pangkalan Lesung	III
4.	PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)	a. Desa Pangkalan Kondai b. Desa Betung c. Desa Pulau Muda	4.	Nilai Indeks Sentralitas Rendah	a. Kecamatan Pangkalan Lesung	IV

No.	RTRW Kabupaten Pelalawan 2011-2031		No.	Hasil Analisis		Hirarki
	Hirarki Fungsi	Kecamatan		Nilai Indek Sentralitas	Kecamatan	
		d. Desa Sokoi			b. Kecamatan Bandar Petalangan c. Kecamatan Bandar Sei Kijang d. Kecamatan Pelalawan e. Kecamatan Teluk Meranti f. Kecamatan Kuala Kampar g. Kecamatan Bunut	

Sumber: Hasil Analisis, 2019





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pelalawan kecamatan yang menjadi hirarki I adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci karena kecamatan Pangkalan Kerinci melayani Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak bagian Selatan. Serta Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala provinsi atau kabupaten. Dan Kecamatan Kerinci memiliki jumlah penduduk sebanyak 124.974 jiwa.

Hirarki II terdapat di Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Ukui karena kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Ukui sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala kabupaten dan beberapa kecamatan. Dan sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten dan beberapa kecamatan.

Hirarki III terdapat di Kecamatan Pangkalan Langgam, Kecamatan, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Teluk Meranti, KecamatanKuala Kampar, Kecamatan Bunut karena kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Ukui pusat pelayanan yang yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa. Dan pusat pelayanan transportasi yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa.

Hirarki IV terdapat di Desa Pangkalan Gondai, Desa Betung, Desa Pulau Muda, dan Desa Sokoi karena Desa Pangkalan Gondai, Desa Betung, Desa Pulau Muda, dan Desa Sokoi yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial yang melayani skala antar desa. Dan pusat pelayanan transportasi yang melayani skala antardesa.

5.2. Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Berdasarkan Kondisi Struktur Ekonomi

Kecamatan dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan struktur ekonomi yang dimiliki tiap kecamatannya. Dalam menentukan pusat pertumbuhan di Kabupaten Pelalawan menggunakan PDRB per kapita kabupaten dan PDRB kecamatan serta menggunakan laju pertumbuhan PDRB kecamatan serta PDRB kabupaten, kemudian dipertimbangkan menggunakan analisis tipologi kelas yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan struktur ekonomi.

Analisis tipologi kelas digunakan untuk melakukan analisis tentang kemajuan suatu wilayah berdasarkan kondisi struktur ekonomi sehingga bisa dijadikan pusat pertumbuhan dengan cara membandingkan antara laju pertumbuhan kecamatan dengan laju pertumbuhan kabupaten dan pendapatan per kapita kecamatan dengan pendapatan per kapita kabupaten.

5.2.1. Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB per kapita digunakan sebagai dasar sistem klasifikasi negara maju, berkembang, dan terbelakang sehingga dengan itu dapat mengetahui klasifikasi perkembangan dan pembangunan wilayah juga tercermin dari tinggi rendahnya pendapatan per kapita. Semakin tinggi PDRB per kapita semakin tinggi tingkat perekonomian wilayah dan semakin maju. Rumus untuk menentukan PDRB per kapita dapat diketahui dibawah ini sebagai berikut.

Selanjutnya adalah menentukan PDRB Per Kapita di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 dan 2018 dengan perolehan hasil sebagai berikut :

a. PDRB Per Kapita Tiap Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014

Hasil dari analisis PDRB per kapita pada Tahun 2014 berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.7. PDRB Per Kapita Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kecamatan	Jumlah Penduduk Kabupaten	PDRB Kabupaten	PDRB Per Kapita
1.	Pangkalan Kerinci	96.127	367.724	31.018.734,42	8.108.630,07
2	Langgam	27.303	367.724	31.018.734,42	2.303.098,26
3	Ukui	37.320	367.724	31.018.734,42	3.148.065,31
4	Bandar Sei Kijang	24.768	367.724	31.018.734,42	2.089.262,64
5	Pangkalan Kuras	54.181	367.724	31.018.734,42	4.570.346,37
6	Bunut	14.046	367.724	31.018.734,42	1.184.826,51
7	Kuala Kampar	17.877	367.724	31.018.734,42	1.507.984,02
8	Kerumutan	20.072	367.724	31.018.734,42	1.693.139,52
9	Bandar Petalangan	13.862	367.724	31.018.734,42	1.169.305,50
10	Pelalawan	18.117	367.724	31.018.734,42	1.528.228,81
11	Teluk Meranti	14.558	367.724	31.018.734,42	1.228.015,40
12	Pangkalan Lesung	29.493	367.724	31.018.734,42	2.487.832,00
Jumlah		367.724	367.724	31.018.734,42	31.018.734,42

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Dari tabel diketahui hasil dari PDRB Per Kapita di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2014 bahwa kecamatan yang memiliki nilai PDRB tertinggi terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan PDRB Per Kapita sebesar 8.108.630,07 dan kecamatan yang memiliki nilai PDRB Per Kapita tertinggi kedua terdapat di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan nilai PDRB sebesar 4.570.346,37. Dan kecamatan yang memiliki nilai PDRB Per Kapita terkecil terdapat di Kecamatan Bandar Petalangan dengan nilai PDRB sebesar 1.169.139,52.

b. PDRB Per Kapita Tiap Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Hasil dari analisis PDRB per kapita pada Tahun 2018 berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.8. PDRB Per Kapita Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Kecamatan	Jumlah Penduduk Kabupaten	PDRB Kabupaten	PDRB Per Kapita
1.	Pangkalan Kerinci	124.974	438.788	43.862.109,69	12.492.646,33
2	Langgam	31.971	438.788	43.862.109,69	3.195.883,91
3	Ukui	40.258	438.788	43.862.109,69	4.024.268,69
4	Bandar Sei Kijang	37.233	438.788	43.862.109,69	3.721.883,76
5	Pangkalan Kuras	61.055	438.788	43.862.109,69	6.103.177,63
6	Bunut	15.929	438.788	43.862.109,69	1.592.294,10
7	Kuala Kampar	18.126	438.788	43.862.109,69	1.811.910,54
8	Kerumutan	24.546	438.788	43.862.109,69	2.453.666,34
9	Bandar Petalangan	14.368	438.788	43.862.109,69	1.436.253,48
10	Pelalawan	20.165	438.788	43.862.109,69	2.015.732,98
11	Teluk Meranti	17.581	438.788	43.862.109,69	1.757.431,27
12	Pangkalan Lesung	32.582	438.788	43.862.109,69	3.256.960,67
	Jumlah	438.788	438.788	43.862.109,69	43.862.109,69

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Dari tabel diketahui hasil dari PDRB Per Kapita di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2018 bahwa kecamatan yang memiliki nilai PDRB tertinggi terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan PDRB Per Kapita sebesar 12.492.646,33 dan kecamatan yang memiliki nilai PDRB Per Kapita tertinggi kedua terdapat di Kecamatan Pangkalan Kuras dengan nilai PDRB sebesar 6.103.177,63. Dan kecamatan yang memiliki nilai PDRB Per Kapita terkecil terdapat di Kecamatan Bandar Petalangan dengan nilai PDRB sebesar 1.436.253,48.

5.2.2. Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja perekonomian wilayah dan tujuan pembangunan wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai kenaikan kapasitas. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 5.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	PDRB Tahun Akhir (tn)	PDRB Tahun Awal (to)	Laju Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata (r)	Presentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata (%)
1.	Pangkalan Kerinci	12.492.646,33	8.108.630,07	1,11410658	11,4
2	Langgam	3.195.883,91	2.303.098,26	1,085349553	8,5
3	Ukui	4.024.268,69	3.148.065,31	1,06331223	6,3
4	Bandar Sei Kijang	3.721.883,76	2.089.262,64	1,155293798	15,5
5	Pangkalan Kuras	6.103.177,63	4.570.346,37	1,074983316	7,5
6	Bunut	1.592.294,10	1.184.826,51	1,076693599	7,7
7	Kuala Kampar	1.811.910,54	1.507.984,02	1,046971845	4,7
8	Kerumutan	2.453.666,34	1.693.139,52	1,097187091	9,7
9	Bandar Petalangan	1.436.253,48	1.169.305,50	1,052751273	5,3
10	Pelalawan	2.015.732,98	1.528.228,81	1,0716702	7,2
11	Teluk Meranti	1.757.431,27	1.228.015,40	1,09375143	9,4
12	Pangkalan Lesung	3.256.960,67	2.487.832,00	1,069665198	7,0
Kabupaten Pelalawan		43.862.109,69	31.018.734,42	1,090476625	9,0

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Dari tabel diketahui hasil laju pertumbuhan ekonomi rata-rata (r) di kecamatan di Kabupaten Pelalawan bahwa kecamatan yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi terletak di Kecamatan Bandar Sei Kijang dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 12,2 % dan kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi kedua terdapat di Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 9,0 %. Sedangkan kecamatan yang memiliki.

5.2.3. Analisis Tipologi Klassen

Analisis tipologi klassen digunakan untuk menentukan kondisi struktur pertumbuhan ekonomi per kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Prinsip dari pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan kondisi struktur pertumbuhan ekonomi ini adalah membandingkan antara laju pertumbuhan kecamatan dengan laju pertumbuhan kabupaten dan pendapatan per kapita kecamatan dengan pendapatan per kapita kabupaten. Untuk lebih jelasnya tabel berikut ini mengakomodir perbandingan tersebut sehingga nantinya dapat diklasifikasikan hasilnya dalam bentuk kuadran.

a. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten dengan Kecamatan

Perbandingan PDRB perkapita kabupaten dengan kecamatan dapat diketahui dengan membandingkan $Y_i > Y$ (PDRB per kapita kecamatan lebih besar dari PDRB per kapita kabupaten) dan $Y_i < Y$ (PDRB per kapita kecamatan lebih kecil dari PDRB per kapita kabupaten). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.10. Perbandingan PDRB Kapita Kecamatan dengan PDRB Kabupaten di Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan	PDRB Per Kapita Kecamatan (Y _i)	PDRB Per Kapita Kabupaten (Y)	Y _i > Y	Y _i < Y
1.	Pangkalan Kerinci	12.492.646,33	43.862.109,69	-	√
2	Langgam	3.195.883,91		-	√
3	Ukui	4.024.268,69		-	√
4	Bandar Sei Kijang	3.721.883,76		-	√
5	Pangkalan Kuras	6.103.177,63		-	√
6	Bunut	1.592.294,10		-	√
7	Kuala Kampar	1.811.910,54		-	√
8	Kerumutan	2.453.666,34		-	√
9	Bandar Petalangan	1.436.253,48		-	√
10	Pelalawan	2.015.732,98		-	√
11	Teluk Meranti	1.757.431,27		-	√
12	Pangkalan Lesung	3.256.960,67		-	√

Sumber: Hasil Analisis, 2019

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten dengan kecamatan dapat diketahui dengan membandingkan $r_i > r$ (laju pertumbuhan ekonomi kecamatan lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi kabupaten) dan $r_i < r$ (laju pertumbuhan ekonomi kecamatan lebih kecil dari laju pertumbuhan ekonomi kabupaten). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.11. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan PDRB Kecamatan (r_i)	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten (r)	$r_i > r$	$r_i < r$
1.	Pangkalan Kerinci	11,4	9,0	√	-
2	Langgam	8,5		-	√
3	Ukui	6,3		-	√
4	Bandar Sei Kijang	15,5		√	-
5	Pangkalan Kuras	7,5		-	√
6	Bunut	7,7		-	√
7	Kuala Kampar	4,7		-	√
8	Kerumutan	9,7		√	-
9	Bandar Petalangan	5,3		-	√
10	Pelalawan	7,2		-	√
11	Teluk Meranti	9,4		√	-
12	Pangkalan Lesung	7,0		-	√

Sumber: Hasil Analisis, 2019

c. Analisis Tipologi Klassen

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB per kapita kecamatan dan kabupaten Tahun 2018 dan hasil perhitungan laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 maka dapat diketahui bahwa diperoleh kriteria kecamatan-kecamatan yang dapat di jelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.12. Kriteria Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Pelalawan

Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB per Kapita (Y)	
	Yi > Y	Yi < Y
ri > r	-	a. Pangkalan Kerinci b. Bandar Sei Kijang c. Kerumutan d. Teluk Meranti
ri < r		a. Langgam b. Ukui c. Pangkalan Kuras d. Bunut e. Kuala Kampar f. Bandar Petalangan g. Pelalawan h. Pangkalan Lesung

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Dari analisis tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kecamatan yang diklasifikasi sebagai kecamatan majudan tumbuh cepat, kecamatan maju tapi tertekan, kecamatan berkembang cepat, serta kecamatan yang relatif tertinggal. Hasil analisis tipologi klassen berdasarkan pada Tabel 5.10 dapat diketahui sebagai berikut.

1. Kecamatan maju tumbuh cepat

Kecamatan yang berada pada klasifikasi ini merupakan kecamatan yang mengalami pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata kabupaten. Kecamatan ini adalah kecamatan paling maju dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi dan jika dimanfaatkan dengan baik akan membuat kesejahteraan masyarakat meningkat. Kecamatan yang berada di klasifikasi ini tidak terdapat pada kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

2. Kecamatan maju tapi tertekan

Kecamatan yang berada pada klasifikasi ini merupakan kecamatan yang mengalami pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata kabupaten dan laju pertumbuhan kecamatan lebih rendah dari laju pertumbuhan kabupaten. Kecamatan yang berada pada klasifikasi ini merupakan kecamatan yang relatif maju akan tetapi laju pertumbuhan ekonominya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Kecamatan yang berada di klasifikasi ini tidak terdapat pada kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

3. Kecamatan berkembang cepat

Kecamatan yang berada pada klasifikasi ini merupakan kecamatan yang memiliki potensi pengembangan sangat besar namun belum dapat dikelola dengan baik. Jadi walaupun memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah. Kecamatan yang berada pada klasifikasi ini adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Teluk Meranti.

Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan ibukota kecamatan di Kabupaten Pelalawan dan Pangkalan Kerinci merupakan salah satu kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan sebesar 11,4 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp.12.492.646,33 dengan nilai PDRB Tahun 2018 sebesar Rp.43.862.109,69. Serta Kecamatan Bandar Sei Kijang memiliki laju pertumbuhan sebesar 15,5% dan pendapatan per kapita sebesar Rp.3.721.883,76 dengan nilai PDRB tahun 2018 Rp.43.862.109,69.

Kecamatan Kerumutan merupakan salah satu kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan sebesar 9,7% dan pendapatan per kapita sebesar Rp.2.453.666,34 dengan nilai PDRB Tahun 2018 sebesar Rp.43.862.109,69. Dan Kecamatan Teluk Meranti memiliki laju pertumbuhan sebesar 9,4% dan pendapatan per kapita sebesar Rp.1.757.431,27 dengan nilai PDRB Tahun 2018 Rp.43.862.109,69. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk dan kelengkapan sarana yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki jumlah penduduk sebanyak 124.974 jiwa dengan sarana yang lengkap.

4. Kecamatan yang relatif tertinggal

Kecamatan yang berada pada klasifikasi ini merupakan kecamatan yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapitanya dibawah rata-rata. Ini berarti tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonominya berada dibawah rata-rata Kabupaten Pelalawan. Kecamatan yang berada di klasifikasi ini adalah Kecamatan Langgam, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Pelalawan dan pangkalan Lesung.

Kecamatan Langgam merupakan salah satu kecamatan yang memiliki nilai laju pertumbuhan sebesar 8,5 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp.3.195.883,91 dengan PDRB Tahun 2018 sebesar Rp.43.862.109,69. Lalu Kecamatan Ukui memiliki laju pertumbuhan sebesar 6,3 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp.4.024.268,69 dengan PDRB Tahun 2018 sebesar Rp.4.3862.109,69.

Kecamata Pangkalan Kuras memiliki nilai laju pertumbuhan sebesar 7,5 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp.6.103.177,63 dengan PDRB

Tahun 2018 sebesar Rp.43.862.109,69. Kemudian kecamatan Bunut memiliki nilai laju pertumbuhan sebesar 7,7 % dan pendapatan per kapita Rp.1.592.294,10 dengan PDRB Tahun 2018 sebesar Rp.43.862.109,69. Kecamatan Kuala kampar memiliki laju pertumbuhan sebesar 4,7 % dan pendaatan per kapita sebesar Rp.1.811.910,54 dengan PDRB Tahun 2018 sebesar Rp.43.862.109,69.

Kecamatan Bandar Petalangan memiliki laju pertumbuhan sebesar 5,3 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp.1.436.253,48 dengan PDRB Tahun 2018 sebesar Rp.43.862.109,69. Kemudian Kecamatan Pelalawan memiliki laju pertumbuhan sebesar 7,2 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp.2.015.732,98 dengan PDRB Tahun 2018 sebesar Rp.43.862.109,69. Serta Kecamatan Pangkalan Lesung memiliki laju pertumbuhan sebesar 7,0 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp.3.256.960,67 dengan PDRB Tahun 2018 sebesar Rp.43.862.109,60.

Delapan kecamatan ini memiliki nilai pendapatan per kapita di bawah Kabupaten Pelalawan yaitu sebesar Rp.48.862.209,69 dan laju pertumbuhan juga berada di bawah Kabupaten Pelalawan sebesar 7,2 %. Angka PDRB pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa PDRB kecamatan tersebut berada dibawah rata-rata Kabupaten Pelalawan sebesar Rp.43.862.109,69, maka dengan kondisi ekonomi seperti disebutkan sebelumnya kedelapan kecamatan ini tidak layak menjadi pusat pertumbuhan.

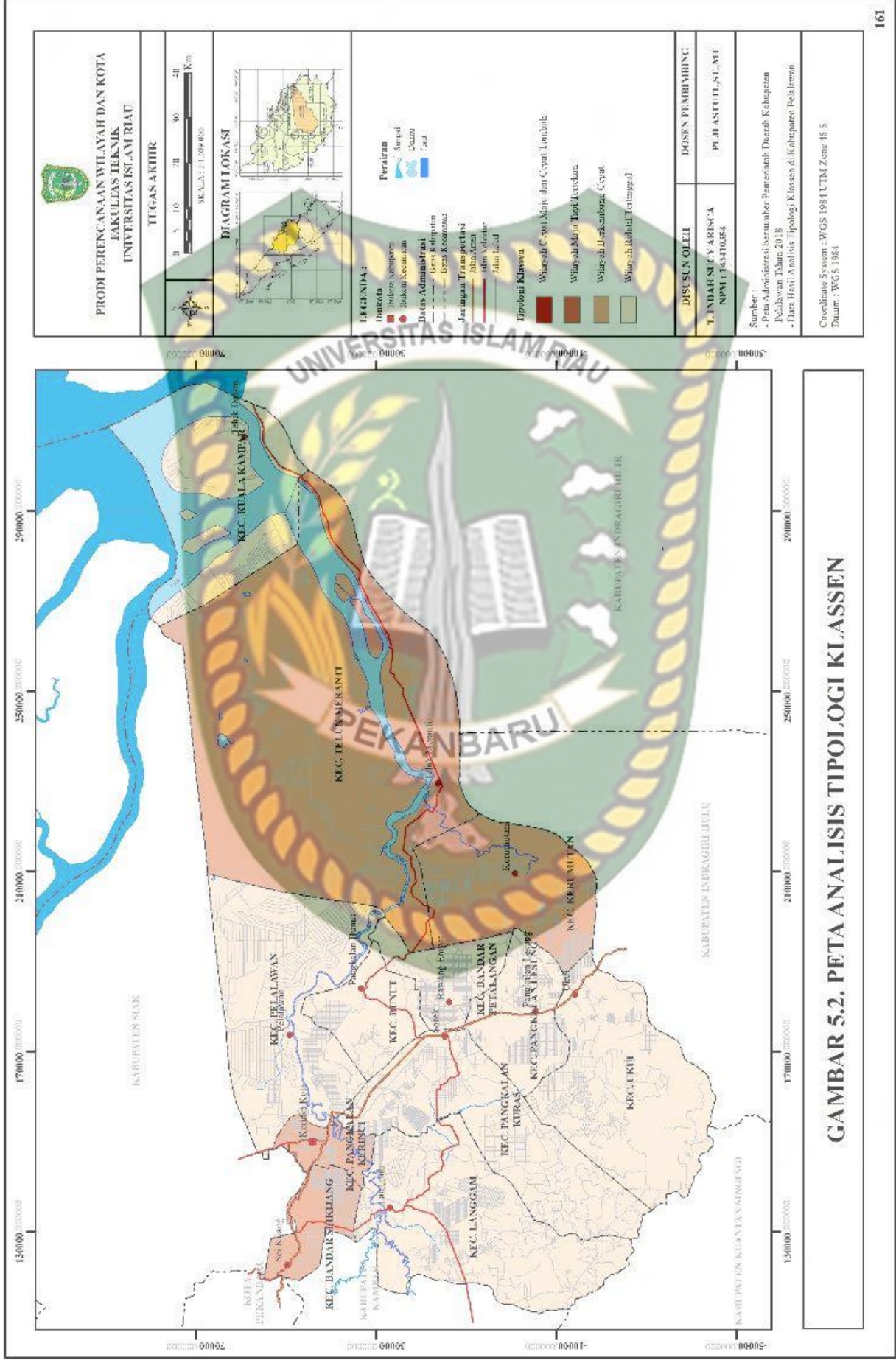
Dari keseluruhan detail yang diuraikan diatas maka kecamatan yang berada pada klasifikasi kecamatan maju dan tumbuh cepat serta kecamatan-kecamatan yang berkembang cepat merupakan kecamatan yang layak sebagai

pusat pertumbuhan yaitu terdiri dari Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Kerumutan, dan Kecamatan Teluk Meranti.

Sedangkan kecamatan yang berada pada pada klasifikasi kecamatan maju tapi tertekan serta kecamatan tertinggal merupakan kecamatan merupakan kecamatan yang tidak layak menjadi pusat pertumbuhan yaitu terdiri dari Kecamatan Langgam, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Pelalawan dan pangakalan Lesung.

Sehingga dari 12 kecamatan yang dianalisis terdapat delapan kecamatan yang tidak layak menjadi pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Langgam, Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Pelalawan dan pangakalan Lesung. Dan empat kecamatan layak menjadi pusat pertumbuhan adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kecamatan Kerumutan, dan Kecamatan Teluk Meranti.

Dokumen ini adalah Arsip Miilk :



5.3. Hasil Perbandingan Hirarki dengan Tipologi Kassen dan RTRW di Kabupaten Pelalawan

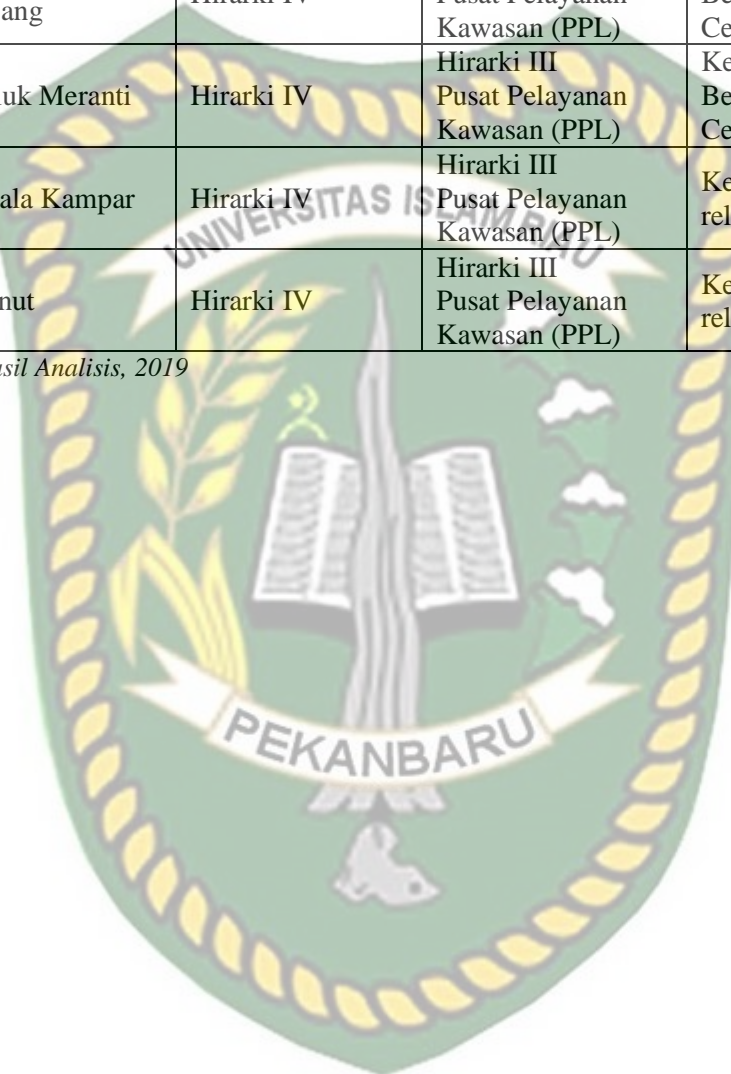
Penentuan hirarki pusat-pusat pertumbuhan di Pelalawan di prioritaskan pada hasil hirarki menggunakan analisis skalogram dan indeks sentralis karena analisis menunjukkan tingkatan kecamatan berdasarkan pada jumlah jenis/fungsi sarana sekaligus menunjukkan kemampuan dalam melayani. Sementara itu hasil analisis tipologi klassen sebagai pendukung dalam upaya penentuan pusat-pusat pertumbuhan. RTRW Kabupaten Pelalawan juga sebagai pendukung penentuan pusat-pusat pertumbuhan. Berikut ini Tabel 5.9 hasil analisis hirarki, struktur ekonomi, dan RTRW Kabupaten Pelalawan.

Tabel 5.9. Perbandingan Hirarki dengan Tipologi Klassen dan RTRW di Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	Hasil Analisis Skalogram dan Indeks Sentralis	Hasil Rekomendasi RTRW	Hasil Analisis Tipologi Klassen
1.	Pangkalan Kerinci	Hirarki I	Hirarki I Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kecamatan Berkembang Cepat
2.	Pangkalan Kuras	Hirarki II	Hirarki II Pusat Kegiatan Promosi Lokal (PKLp)	Kecamatan yang relatif tertinggal
3.	Ukui	Hirarki II	Hirarki II Pusat Kegiatan Promosi Lokal (PKLp)	Kecamatan Yang relatif tertinggal
4.	Langgam	Hirarki III	Hirarki III Pusat Pelayanan Kawasan (PPL)	Kecamatan Yang relatif tertinggal
5.	Kerumutan	Hirarki III	Hirarki III Pusat Pelayanan Kawasan (PPL)	Kecamatan Berkembang Cepat
6.	Pangkalan Lesung	Hirarki III	Hirarki III Pusat Pelayanan Kawasan (PPL)	Kecamatan Yang relatif tertinggal
7.	Bandar Petalangan	Hirarki IV	Hirarki III Pusat Pelayanan Kawasan (PPL)	Kecamatan Yang relatif tertinggal

No.	Kecamatan	Hasil Analisis Skalogram dan Indeks Sentralis	Hasil Rekomendasi RTRW	Hasil Analisis Tipologi Klassen
8.	Pelalawan	Hirarki IV	Hirarki III Pusat Pelayanan Kawasan (PPL)	Kecamatan Yang relatif tertinggal
9.	Bandar Sei Kijang	Hirarki IV	Hirarki III Pusat Pelayanan Kawasan (PPL)	Kecamatan Berkembang Cepat
10.	Teluk Meranti	Hirarki IV	Hirarki III Pusat Pelayanan Kawasan (PPL)	Kecamatan Berkembang Cepat
11.	Kuala Kampar	Hirarki IV	Hirarki III Pusat Pelayanan Kawasan (PPL)	Kecamatan Yang relatif tertinggal
12.	Bunut	Hirarki IV	Hirarki III Pusat Pelayanan Kawasan (PPL)	Kecamatan Yang relatif tertinggal

Sumber: Hasil Analisis, 2019



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan terhadap Perkembangan Wilayah di Kabupaten Pelalawan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Berdasarkan analisis skalogram dan indeks sentralitas kecamatan yang layak menjadi pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Pelalawan berdasarkan ketersediaan sarana sosial ekonomi terdiri dari 3 kecamatan yaitu :
 - a. Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai Hirarki I sehingga layak menjadi pusat pertumbuhan karena memiliki sarana sosial ekonomi yang paling lengkap antara kecamatan lainnya yaitu sebanyak 15 unit.
 - b. Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai Hirarki II sehingga layak sebagai pusat pertumbuhan karena memiliki jumlah sarana sosial ekonomi sebanyak 13 unit dari 15 unit yang ada sehingga Kecamatan Pangkalan Kuras bisa menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan jumlah sarana dan memiliki nilai indeks sentralitas yang tinggi. Serta dengan perbandingan dengan RTRW Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2031.
 - c. Kecamatan Ukui sebagai Hirarki II sehingga layak menjadi pusat pertumbuhan karena memiliki jumlah sarana sosial ekonomi sebanyak 14 unit dari 15 unit yang ada sehingga Kecamatan Ukui bisa menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan jumlah sarana dan nilai indeks

sentralitas. Serta dengan perbandingan dengan RTRW Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2031.

2. Berdasarkan analisis tipologi klassen kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Pelalawan berdasarkan struktur pertumbuhan ekonomi terdiri dari 4 kecamatan yaitu:
 - a. Kecamatan Pangkalan Kerinci layak menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan struktur pertumbuhan ekonomi dan menurut analisis tipologi klassen Kecamatan Pangkalan termasuk dalam kecamatan yang berkembang cepat sehingga layak menjadi pusat pertumbuhan.
 - b. Kecamatan Bandar Sei Kijang layak menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan struktur pertumbuhan ekonomi dan menurut analisis tipologi klassen Kecamatan Bandar Sei Kijang termasuk dalam kecamatan yang berkembang cepat sehingga layak menjadi pusat pertumbuhan.
 - c. Kecamatan Kerumutan layak menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan struktur pertumbuhan ekonomi dan menurut analisis tipologi klassen Kecamatan Kerumutan termasuk dalam kecamatan yang berkembang cepat sehingga layak menjadi pusat pertumbuhan.
 - d. Kecamatan Teluk Meranti layak menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan struktur pertumbuhan ekonomi dan menurut analisis tipologi klassen Kecamatan Teluk Meranti termasuk dalam kecamatan yang berkembang cepat sehingga layak menjadi pusat pertumbuhan.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk mengatasi kelemahan studi yang ada yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa masih banyak kecamatan yang belum layak menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana yang ada di tiap kecamatan yang belum mencukupi untuk itu pemerintah Kabupaten Pelalawan perlu melakukan upaya peningkatan dan penyediaan sarana sosial ekonomi agar pembangunan di tiap kecamatan merata sehingga tidak terjadi kesenjangan dan tiap kecamatan bisa menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana.
2. Hasil dari analisis tipologi klassen bahwa masih banyak kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan belum layak menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan struktur pertumbuhan ekonomi karena kecamatan yang di kabupaten pelalawan masih memiliki nilai PDRB per kapita yang rendah di bandingkan dengan PDRB Kabupaten Pelalawan untuk itu pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu melakukan upaya dalam meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi pada tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan sehingga bisa membantu pertumbuhan di Kabupaten pelalawan melalui struktur pertumbuhan ekonomi pada tiap Kecamatan.
3. Bagi pemerintah Kabupaten Pelalawan hendaknya rekomendasi pusat pertumbuhan ini dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan tata ruang kabupaten kedepannya, sehingga tercipta sistem perkotaan yang merata pembangun sehingga tidak terjadinya kesenjangan antar kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan.

4. Pemerintah Kabupaten Pelalawan diharapkan terus melakukan proses pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di tiap kecamatan, sehingga dampak positif dari pengembangan pusat-pusat pertumbuhan terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Pelalawan dapat terwujud.
5. Mengingat keterbatasan peneliti, maka disarankan kepada peneliti yang mempunyai keterkaitan terhadap pusat-pusat pertumbuhan dan perkembangan wilayah baik di wilayah lain ataupun di Kabupaten Pelalawan untuk meneliti lebih lanjut lagi dengan variabel yang lebih kompleks di kesempurnaan kajian wilayah ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Asih, Widi (2015). “Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2013”. Yogyakarta: Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Asteriani, Febby. (2011). “Preferensi Penghuni Perumahan di Kota Pekanbaru dalam Menentukan Lokasi Perumahan”. Pekanbaru: Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1 hlm.77-91. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- Al Qur’an Surah Al-A’raf (7) Ayat 10. “Tentang Pembangunan Ekonomi di Masyarakat”.
- Badan Pusat Statistik. “Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2014”
- Badan Pusat Statistik. “Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2015”
- Badan Pusat Statistik. “Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2016”
- Badan Pusat Statistik. “Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2017”
- Badan Pusat Statistik. “Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2018”
- Budiharjo, Eko (1995). “Pendekatan Sistem Dalam Tata Ruang Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional”. Yogyakarta; Gadjah Mada Universitas Press.
- Damarjati, Annisa Ganis (2010). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah”. Jawa Tengah: Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

- Dewi, Oktavina Mustika (2013). “Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah dan Hubungannya Dengan Kesenjangan Antar Wilayah di Kabupaten Kudus Tahun 2005 dan 2010” Kudus: Skripsi Jurusan Geografis Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Ermawati (2010). “Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah”. Surakarta: Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Fadli, Akmal (2017). “Kajian Pusat-Pusat Pelayanan dan Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kampar”. Kampar: Skripsi. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
- Gaffara, Ghefra Rizkan, Ahmad Fathu dan Fatih (2015). “Kajian Skalogram Guttman Dan Indeks Sentralitas Marshall Untuk Penentuan Pusat-Pusat Pelayanan Wilayah Studi Kasus Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatra Utara”. Sleman : Kampus Terpadu.
- Hamid, Muh (2017). “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat”. Makassar: Skripsi. Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Huda, Al (2018). “ Kajian Indeks Pembangunan Wilayah Ditinjau Dari Sektor Ekonomi Di Kabupaten Pelalawan”. Pelalawan: Skripsi. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.

Mulyono, Sadyohutomo (2008). "Manajemen Kota dan Wilayah", Bandung: Bumi Aksara.

Mut'ali, Lutfi (2015). "Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan". Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPPG).

Nainggolan, Pandapotan T.P (2011). "Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun".

Nirwani, Lirih Mega (2014). "Analisis Hierarki Pusat Pelayanan Sebagai Arah Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Magetan Tahun 2013". Surakarta: Skripsi Universitas Sebelas Maret.

Nugroho, Iwan & Dahuri Rochmin (2004). "Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan". Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia Anggota Ikapi.

Pane, Teguh Achmad (2013). "Kajian Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai". Medan: Tesis. Universitas Sumatera Utara.

Pasaribu, Ermawati (2015). "Dampak *Spillover* dan Multipolaritas Pengembangan Wilayah Pusat-Pusat Pertumbuhan Kalimantan". Bogor: Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16 Tahun 2009. "Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008. "Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional".

Perloff, Harvey and Wingo Jr Lowdon (1961). "Natural Resources Endowment and Regional Economic Growth". In Natural Resources and Economic Growth Ed, Joseph J. Spengler. Washington DC: Resources for the Future pp.191-212.

Rahayu, Eta & Santoso Eko Budi (2014). "Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Wilayah di Kabupaten Gunung Kidul". Surabaya: Jurnal Teknik POMITS Volume 03 Nomor 2. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. ITS.

Rotinsulu, Fanly A , Ir. Papia J. C. Franklin M.Si & Sembel Amanda S (2017). "Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana Permukiman di Kecamatan Kalawat". Manado: Jurnal Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado & Staff Pengajar Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi Manado.

Rustiadi, Saefulhakim & Panuju (2009). "Perencanaan dan Pengembangan Wilayah", Bogor: *Crestpent Press* dan Yayasan Obor Indonesia.

Sangadji, E.M dan Sopiah. (2010). "Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian". ANDI Yogyakarta.

Setiawan, Muhammad Aris. (2015). "Konsep Kota Layak Huni (*Livable City*) Dalam Al-Qur'an". Semarang: Skripsi. Fakultas Ushuluddin. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Soegimo, Dibyo Purwanto (2009). "Geografis Untuk SMA/MA Kelas XI". Jakarta: Mefi Cakara.

Standar Nasional Indonesia No. 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

Subandi (2011). “Ekonomi Pembangunan (Cetakan Kesatu)” Bandung: Alfabeta.

Tambunan, Tulus (2009). “Perekonomian Indonesia”. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tarigan, Robinson (2005). “Perencanaan Pembangunan Wilayah”. Edisi Revisi.
Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro & Smith (2006). “Pembangunan Ekonomi (terjemahan)”. Edisi
Kesembilan. Jakarta: Erlangga.

Luturkey, Angelina K (2016). “Analisis Pengaruh Pusat Pertumbuhan Terhadap
Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus: Kecamatan Tampan, Kota
Pekanbaru)” Pekanbaru: Skripsi Program Studi Perencanaan Wilayah
dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.

Undang Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 “Tentang Penataan
Ruang”.

Yulianto, Rahmat Andi (2015). “Analisis Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru di
Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Tengah Kabupaten Brebes”.
Semarang: Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Diponegoro.

Yunus, Hadi Sabari (1999). “Struktur Tata Ruang Kota”. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.